

# KAJIAN IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2017**

---

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

**Kajian Implementasi Program Indonesia Pintar**

Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud, 2017  
V, 105h

ISBN: 978-602-8613-85-9

1. Program Indonesia Pintar (PIP)
2. Efektivitas
3. Siswa Penerima PIP 2015
4. Prestasi Siswa

I. JUDUL

II. PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
BALITBANG, KEMDIKBUD

III. SERI PENELITIAN KEBIJAKAN

Tim Penyusun : Dr. Herlinawati  
Dr. Bambang Indriyanto  
Catur Dyah Fajarini, S.E., M.Si.  
Sudiyono, S.Pd., M.Pd.

Tim Penyunting : Dr. Iskandar Agung, M.Si.  
Ir. Yendri Wirda, M.Si.

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2017

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Diperbolehkan mengutip dengan menyebut sumber.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan  
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud  
Gedung E, Lantai 19  
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 021-5736365; Faks. 021-5741664  
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>  
e-mail: [puslitjakbud@kemdikbud.go.id](mailto:puslitjakbud@kemdikbud.go.id)

---

## KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Tahun 2017 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang merupakan hasil kegiatan Tahun 2016. Penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini dimaksudkan antara lain untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai wujud akuntabilitas publik Puslitjakdikbud, Balitbang, Kemendikbud, sesuai dengan Renstra Puslitjak Tahun 2016.

Buku Laporan Hasil Penelitian yang diterbitkan tahun ini terkait prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Masyarakat; dan Bidang Kebudayaan.

Kami menyambut gembira atas terbitnya Buku Laporan Hasil Penelitian ini dan mengharapkan informasi hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini.

Jakarta, Desember 2017

plt, Kepala Pusat,



Dr. Ir. Bastari, M.A.

NIP. 196607301990011001

---

## KATA PENGANTAR

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan (Puslitjakdikbud Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 melakukan Kajian Tentang Implementasi Program Indonesia Pintar. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh bahan masukan/informasi guna merumuskan strategi pemberian subsidi yang efektif kepada siswa miskin yang dapat mendukung siswa menyelesaikan dan melanjutkan pendidikan secara lancar dengan prestasi yang baik

Program Indonesia Pintar dinilai efektif jika memenuhi kriteria pencapaian tujuan program tersebut. Pada saat ini dari sisi kriteria keefektifan (*effectiveness*) belum dipahami secara komprehensif, bagaimanakah ketepatan pelaksanaan PIP berdasarkan karakteristik siswa, jumlah/besaran dana yang diterima, dan ketepatan waktu penerimaan dana serta pemanfaatan dana PIP oleh siswa? Selanjutnya, dari aspek dampak, pada saat ini belum dijelaskan/dipahami secara rinci, bagaimanakah dampak pemberian bantuan pendanaan kepada siswa dari keluarga miskin melalui skema KIP terkait dengan disiplin siswa/ absensi siswa, motivasi, prestasi belajar siswa; serta keberlanjutan pendidikan siswa?

Oleh karena itu, Pemahaman tentang aspek keefektifan (*effectiveness*) dan dampak (*efficacy*) terhadap penyelenggaraan PIP ini penting guna memberikan rekomendasi kebijakan tentang strategi pemberian subsidi yang efektif kepada siswa miskin yang dapat mendukung siswa menyelesaikan pendidikan secara lancar dan dengan prestasi yang baik. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan studi ini. Saran dan perbaikan akan terus dilakukan agar menjadi laporan yang lebih sempurna.

Jakarta, Desember 2017

Tim Peneliti

---

## DAFTAR ISI

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA SAMBUTAN</b>                                               | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                              | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                                | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                                               | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b>                                               | <b>vi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                           | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                           | 1          |
| 1.2 Pertanyaan Kebijakan.....                                      | 10         |
| 1.3 Tujuan.....                                                    | 11         |
| 1.4 Limitasi .....                                                 | 11         |
| 1.5 Hasil Yang Diharapkan .....                                    | 12         |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                                       | <b>13</b>  |
| 2.1 Perluasan dan Pemerataan Akses Memperoleh Pendidikan .....     | 14         |
| 2.2 Konsep dan Pengukuran Kemiskinan .....                         | 15         |
| 2.3 Karakteristik Kebijakan Pendidikan.....                        | 19         |
| 2.4 Pembiayaan Pendidikan .....                                    | 23         |
| 2.5 Intervensi Kebijakan Pendidikan Melalui Sistem Pendanaan ..... | 27         |
| 2.6 Pelaksanaan Program Indonesia Pintar .....                     | 29         |
| 2.7 Efektivitas Program.....                                       | 41         |
| 2.8 Hasil Penelitian Terdahulu/Analisis Data Sekunder .....        | 43         |
| 2.9 Kerangka Pikir Studi .....                                     | 49         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                   | <b>51</b>  |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....                           | 51         |
| 3.2 Populasi dan Sampel .....                                      | 51         |
| 3.3 Teknik Pengambilan Sampel .....                                | 51         |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data.....                                   | 58         |
| 3.5 Teknik Analisis Data.....                                      | 59         |
| 4.1 Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) .....               | 62         |
| 4.2 Dampak Program PIP .....                                       | 80         |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>                                    | <b>93</b>  |
| 5.1 Simpulan .....                                                 | 93         |
| 5.2 Saran.....                                                     | 99         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                         | <b>103</b> |

---

## DAFTAR TABEL

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1: Perkembangan APS Tahun 2010/2011 - 2014/2015 .....                                 | 4  |
| Tabel 1.2: Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS):<br>APK dan APM..... | 5  |
| Tabel 1.3: Dana Bantuan Siswa Miskin (Program Indonesia Pintar/PIP)<br>Tahun 2015 .....       | 7  |
| Tabel 2.1: Data Anak Usia Sekolah 6-12 Tahun Berdasarkan Persentil<br>Kesejahteraan .....     | 19 |
| Tabel 3.2: Pembagian Kuartil Kabupaten/Kota Berdasarkan Kuota PIP                             | 52 |
| Tabel 3.3: Kabupaten/Kota Berdasarkan Kuartil Terpilih.....                                   | 52 |
| Tabel 3.4: Total Sekolah Berdasarkan Sampel Terpilih.....                                     | 53 |
| Tabel 3.5: Jenis dan Jumlah Reponden Masing-Masing<br>Kabupaten/Kota.....                     | 55 |
| Tabel 3.6: Rincian Jumlah Responden Seluruh Kabupaten/Kota.....                               | 55 |
| Tabel 3.7: Variabel, Dimensi Variabel, Data yang Dibutuhkan, dan<br>Sumber Data .....         | 56 |
| Tabel 3.8: Rincian Jumlah Peserta DKT di Kabupaten/Kota Sampel .....                          | 59 |
| Tabel 4.1: Alokasi PIP 2015-2016 .....                                                        | 64 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1: Alur Diagram Mekanisme Pelaksanaan PIP ..... | 34 |
| Gambar 2: Akses VIP/Dapodik.....                       | 37 |
| Gambar 3: Kerangka Pikir Studi .....                   | 49 |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1 : Orang Tua Siswa yang Memiliki KPS/KKS .....               | 64 |
| Grafik 2 : Distribusi Pemenuhan Persyaratan Siswa Penerima PIP ..... | 65 |
| Grafik 3 : Rerata Penghasilan Ortu (dalam ribu).....                 | 66 |
| Grafik 4 : Pekerjaan Ortu Siswa<br>(Ibu).....                        | 61 |
| Grafik 5 : Pekerjaan Ortu Siswa (Ayah).....                          | 68 |

---

|           |                                                                                          |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 6  | : Pendidikan Ortu Siswa (Ayah)                                                           | 62 |
| Grafik 7  | : Pendidikan Ortu Siswa (Ibu)                                                            | 69 |
| Grafik 8  | : Rata-rata Jumlah Siswa yang Diusulkan dan Diterima/Memperoleh PIP (Resp. Kepsek, n=45) | 71 |
| Grafik 9  | : Persentase siswa penerima PIP yang Sesuai dengan Ketentuan                             | 73 |
| Grafik 10 | : Kesesuaian Jumlah Dana PIP yang diterima Siswa dengan Ketentuan                        | 74 |
| Grafik 11 | : Rerata Jumlah Dana PIP yang Diterima Tahun 2015 (senyatanya)                           | 75 |
| Grafik 12 | : Penggunaan Dana PIP Selain untuk Biaya Pribadi Siswa (Responden : Siswa)               | 76 |
| Grafik 13 | : Urutan Prioritas Penggunaan Dana (Responden Siswa)                                     | 76 |
| Grafik 14 | : Kecukupan Uang PIP untuk Biaya Pribadi Siswa (Orang Tua)                               | 77 |
| Grafik 15 | : Uang PIP agar Cukup untuk Biaya Pribadi Siswa (Orang Tua)                              | 78 |
| Grafik 16 | : Ketepatan Waktu Penerimaan Dana PIP (Resp Siswa)                                       | 79 |
| Grafik 17 | : Kesenambungan Penerimaan PIP antar Jenjang Pendidikan (Siswa)                          | 82 |
| Grafik 18 | : Keberlanjutan Pendidikan Siswa yang Diinginkan Orang Tua (Responden Orang Tua)         | 83 |
| Grafik 19 | : Nilai Rapor Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sebelum dan Setelah PIP (Siswa)            | 84 |
| Grafik 20 | : Nilai Rapor Mata Pelajaran Bahasa Inggris Sebelum dan Setelah PIP (Siswa)              | 84 |
| Grafik 21 | : Nilai Rapor Mata Pelajaran Matematika Sebelum dan Setelah PIP (Siswa)                  | 85 |
| Grafik 22 | : Nilai Rapor Mata Pelajaran Bahasa Indonesia                                            | 86 |
| Grafik 23 | : Nilai Rapor Mata Pelajaran Bahasa Inggris Sebelum dan Setelah PIP (Resp Siswa)         | 86 |
| Grafik 24 | : Nilai Rapor Mata Pelajaran Matematika Sebelum dan Setelah PIP (Resp. Siswa)            | 87 |
| Grafik 25 | : Peningkatan Hasil Belajar untuk Nilai Matematika                                       | 88 |
| Grafik 26 | : Peningkatan Hasil Belajar Siswa untuk Nilai B.Indonesia                                | 89 |
| Grafik 27 | : Peningkatan Hasil Belajar Siswa untuk Nilai IPA                                        | 90 |
| Grafik 28 | : Peningkatan Hasil Belajar Displin dan Motivasi Belajar Siswa                           | 91 |
| Grafik 29 | : Peningkatan Displin dan Motivasi Belajar Siswa (Orangtua)                              | 91 |

---

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD'45 diamanatkan, bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Amanat tersebut diejawantahkan ke dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, dan pemerintah terus berupaya setiap warga negara Indonesia memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Untuk mewujudkannya pemerintah mencanangkan kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang di arahkan pada tersedia dan terjangkau nya layanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota yang dilakukan antara lain melalui strategi pemberian subsidi (Kemendikbud, 2015). Pencanaan kebijakan tersebut telah senada dan seirama dengan salah satu dari Sembilan Cita dalam Nawacita yang dicanangkan presiden Joko Widodo di bidang pendidikan yakni “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” yang secara spesifik dilaksanakan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Salah satu arah kebijakan dan strategi pendidikan adalah anak Indonesia dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, dengan memberikan peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak yang berada di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); serta penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Realisasi kebijakan dilaksanakan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) pada pendidikan dasar dengan memberikan Kartu Indonesia Pintar (Kemendikbud, 2015). Pemberian subsidi kepada siswa melalui PIP merupakan salah satu kebijakan penting yang menjadi *quality assurance* guna menjamin pemberian akses pendidikan yang luas dan bermutu bagi semua kelompok masyarakat yang menjangkau masyarakat miskin. Keberpihakan kepada masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi tersebut, dimaksudkann untuk menghilangkan

---

hambatan biaya (*cost barrier*) pendidikan, serta terciptanya peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi siswa untuk tetap terus bersekolah (Dikdasmen, 2015)

Disadari bahwa salah satu tantangan terbesar dari pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini ialah bagaimana layanan pendidikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama oleh lapisan masyarakat yang memiliki kendala ekonomi. Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung peserta didik. Biaya langsung peserta didik meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung peserta didik meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (*drop out*), sehingga berpengaruh terhadap APK.

Untuk menjawab tantangan itu, berbagai kebijakan dan program terus diupayakan oleh Pemerintah di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut. Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, untuk membangun Keluarga Produktif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan PIP. Program ini dimaksudkan untuk menjamin akses layanan pendidikan dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat yang memiliki kendala ekonomi, melalui pemberian bantuan biaya pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga miskin/rentan miskin. Lebih spesifik tujuan program ini antara lain: (1) meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun; (2) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; (3) menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan (Dikdasmen, 2015).

Program Indonesia Pintar menjangkau siswa dari jalur pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) dan non formal (SKB/PKBM,

---

Lembaga Kursus dan Pelatihan). Implementasi PIP merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sekaligus untuk mendorong implementasi Pendidikan Menengah Universal/rintisan wajib belajar 12 tahun. Dengan besarnya sasaran PIP 2015 yang mencapai 20,3 juta anak/siswa usia sekolah baik di sekolah/lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (17,9 juta anak/siswa) maupun Kementerian Agama (2,4 juta anak/siswa), diharapkan akan dapat mengatasi rendahnya APK sekaligus sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan yang lebih baik.

Sasaran PIP adalah anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan: (1) penerima BSM 2014 pemegang KPS; (2) siswa/anak dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP yang belum menerima BSM 2014; (3) siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS; siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan; (4) siswa/anak yang terkena dampak bencana alam; (5) anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah (*drop-out*) yang diharapkan kembali bersekolah; (6) siswa/anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau siswa/ anak dengan pertimbangan khusus lainnya (seperti kelainan fisik, korban musibah, orang tua PHK, berada di daerah konflik, dari keluarga terpidana, memiliki lebih dari 3 saudara, siswa SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang tertentu); dan (7) peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya (Dikdasmen, 2015).

Kebijakan pemberian subsidi kepada siswa miskin ini strategis mengingat siswa yang berasal dari keluarga miskin ditengarai rawan terhadap terjadinya putus sekolah dan mengulang kelas. Indikasinya tampak dari hasil Susenas tahun 2011 (TNP2K, 2012) yang mengungkapkan bahwa terjadinya putus sekolah sebagian besar (75%) disebabkan oleh alasan ekonomi, yaitu karena tidak memiliki biaya (67%) dan karena anak harus bekerja (9%). Kendati pemerintah secara bertahap telah membebaskan seluruh beban biaya operasi satuan pendidikan menuju pendidikan dasar bebas biaya, namun masih banyak keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi biaya pribadi yang harus dikeluarkan oleh siswa seperti untuk biaya transport, seragam, perlengkapan sekolah dan lain-lain. Kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan jika tidak

dibantu subsidi oleh pemerintah. Keadaan tersebut akan berdampak pada menurunnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin terutama disebabkan oleh banyaknya siswa putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga jenjang pendidikan menengah. Oleh sebab itu, diharapkan pemberian subsidi kepada siswa miskin dapat efektif agar siswa tetap bersekolah dan melanjutkan pendidikannya tanpa dihalangi oleh masalah ekonomi. Langkah tersebut tampaknya tepat, mengingat hasil studi Baines (1999) menemukan bahwa bantuan finansial kepada siswa menunjukkan pengaruh positif terhadap menurunnya angka putus sekolah (APS) hingga mencapai 2%. Bahkan Linda Hemasaputri (2010) pada tahun 2010 yang melakukan studi di Pacitan Jawa Timur, menemukan adanya pengaruh positif subsidi siswa miskin terhadap prestasi belajar siswa. Oleh sebab itu, Pemerintah terus berupaya memberikan subsidi kepada siswa miskin guna mengurangi APS.

**Tabel 1.1: Perkembangan APS Tahun 2010/2011 - 2014/2015**

| No | Satuan Pendidikan | Tahun Ajaran<br>09/10--10/11 |      | Tahun Ajaran<br>10/11--11/12 |      | Tahun Ajaran<br>11/12--12/13 |      | Tahun Ajaran<br>12/13--13/14 |      | Tahun Ajaran<br>13/14--14/15 |      |
|----|-------------------|------------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|------|
|    |                   | Jumlah                       | %    | Jumlah                       | %    | Jumlah                       | %    | Jumlah                       | %    | Jumlah                       | %    |
| 1  | SD/MI             | 439.033                      | 1,61 | 248.988                      | 0,90 | 352.673                      | 1,28 | 294.045                      | 1,10 | 176.909                      | 0,67 |
| 2  | SMP               | 166.328                      | 1,80 | 146.871                      | 1,57 | 134.824                      | 1,43 | 137.436                      | 1,42 | 85.000                       | 0,87 |
| 3  | SMA               | 139.998                      | 3,55 | 47.709                       | 1,16 | 42.471                       | 1,01 | 42.008                       | 0,98 | 68.219                       | 1,59 |
| 4  | SMK               | 98.640                       | 2,97 | 124.792                      | 3,34 | 124.791                      | 3,10 | 129.037                      | 3,08 | 86.282                       | 2,05 |

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud (2015)

Data APS Pusat Data dan Statistik Pendidikan (Kemdikbud, 2015) menunjukkan dari tahun ke tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung terjadi penurunan yang berarti, terutama untuk jenjang SD dan SMP (Tabel 1.1) APS SD dan SMP pada tahun 2015 yakni 0,67% dan 0,87%, merupakan penurunan yang cukup signifikan dari APS pada tahun sebelumnya (2014) yakni SD sebesar 1,10% dan SMP 1,42%. Jika angka tersebut akurat maka APS untuk SD dan SMP pada tahun 2015 tersebut telah melampaui target yang dicanangkan dalam Renstra 2010-2014, yakni SD sebesar 1,1% dan SMP sebesar 1,6%. Kendati demikian APS di sekolah menengah menunjukkan angka yang masih tinggi, yakni SMA 1,59% dan SMK 2,05%. APS di pendidikan menengah ini masih termasuk tinggi dan menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan faktor putus sekolah ini dalam upaya mewujudkan pelaksanaan Wajar 12 tahun dan keberhasilannya.

Angka putus sekolah memiliki hubungan yang erat dengan angka partisipasi pendidikan. Besarnya APS memberikan kontribusi terhadap angka partisipasi pendidikan. Ini terkait dengan target angka partisipasi pendidikan yang dicanangkan harus tercapai pada tahun 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Renstra Kemdikbud 2014-2019. Kondisi awal, yakni pada tahun 2014 rata-rata APK SD baru mencapai 97,31%, APK SMP 74,29%, APK SM 68,92%; sedangkan target APK yang harus tercapai pada tahun 2019 relatif cukup besar yakni SD 100,55%, SMP 83,77%, dan SM 85,71%. Demikian halnya dengan kondisi APM pada tahun 2014 dan target APM yang perlu dicapai pada tahun 2019, masih terjadi kesenjangan yang cukup besar (lihat Tabel 1.2). Masalah krusial lain yang masih perlu mendapatkan perhatian untuk ditangani yaitu terjadinya disparitas angka partisipasi pendidikan antarwilayah, antarpenduduk, kaya-miskin. Rata-rata angka partisipasi pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah di Wilayah Timur Indonesia sebagian besar berada di bawah rata-rata angka partisipasi pendidikan nasional, dan jauh lebih rendah dari provinsi lain di Bagian Barat. Secara nasional, disparitas di tingkat sekolah menengah antar kabupaten/kota juga masih tinggi. yakni sebesar 29,0%. (Kemdiknas, 2010 dan Renstra Kemendikbud 2014-2019).

**Tabel 1.2: Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS):  
APK dan APM**

| SS/IKSS                                                                              | Sat   | Kondisi Awal |       |       |       |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                                                                      |       | 2014         | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019   |
| APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%                                       | %     | 97,31        | 97,65 | 97,85 | 98,02 | 99,92 | 100,55 |
| APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,2%                                                 | %     | 81,92        | 82,00 | 82,51 | 82,88 | 84,52 | 85,20  |
| APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%                                      | %     | 74,29        | 80,73 | 81,89 | 82,40 | 83,61 | 83,77  |
| APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%                                              | %     | 59,18        | 71,88 | 72,69 | 73,07 | 73,70 | 73,72  |
| Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin & 20% penduduk terkaya sebesar 0,9 | Rasio | 0.85         | 0.86  | 0.87  | 0.88  | 0.89  | 0.9    |
| APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,7 %                                   | %     | 68,92        | 75,70 | 79,31 | 82,15 | 84,09 | 85,71  |

| SS/IKSS                                                                                   | Sa<br>t | Kondisi Awal |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                           |         | 2014         | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,5%                                                 | %       | 60,56        | 63,76 | 66,87 | 69,49 | 71,12 | 73,05 |
| Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,6 | Rasio   | 0.53         | 0.54  | 0.55  | 0.57  | 0.58  | 0.60  |

Sumber Renstra Kemdikbud 2014-2019

Menyikapi masih tingginya APS dan permasalahan disparitas APK dan APM, pada tahun 2013 Kemendikbud pernah mencanangkan dimulainya Gerakan Anti Putus Sekolah. Lebih-lebih pada tahun 2012 terdapat tidak kurang dari 1,5 juta anak tidak dapat sekolah dan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. *Treatment* yang ditawarkan untuk menekan angka putus sekolah, selain memperbaiki mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), juga memberikan bantuan kepada siswa miskin. Pada saat itu tercatat telah ada sebanyak 8 juta anak penerima subsidi siswa miskin dengan total anggaran sekitar Rp 4 triliun dari siswa SD hingga SMA yang telah menerima subsidi, namun jumlah tersebut belum dapat menjangkau seluruh siswa miskin yang berada di satuan pendidikan tersebut (Koran Pendidikan Kemdikbud, 2013). Jumlah anggaran subsidi siswa pada tahun 2013 tersebut jauh lebih besar jika dibanding dengan subsidi tahun 2012 yang total anggarannya Rp 2.816.529.200.000 dengan jumlah penerima subsidi sebanyak 5.753.860 siswa. Pada era pemerintahan Jokowi saat ini, anggaran PIP ditingkatkan dengan jumlah yang jauh lebih besar, yakni hampir dua kali lipat dari tahun 2013. Pada tahun 2015 ini besaran dana BSM/PIP 2015 yaitu sebesar Rp. 11.099.032.750.000,- dengan sasaran sebanyak 17.920.270 siswa yang rinciannya tersaji pada Tabel 1.3 sebagai berikut.

**Tabel 1.3: Dana Bantuan Siswa Miskin (Program Indonesia Pintar/PIP)  
Tahun 2015**

| Jenjang Pendidikan | DIPA APBN       |                   | DIPA APBD       |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                    | Sasaran BSM/PIP | Anggaran (Rp.000) | Sasaran BSM/PIP | Anggaran (Rp.000) |
| <b>SD</b>          | 6.046.921       | 2.721.114.450     | 10.470.610      | 4.711.774.500     |
| <b>SMP</b>         | 4.249.607       | 1.627.417.500     | 2.169.890       | 3.187.205.250     |
| <b>SMA</b>         | 425.033         | 425.033.000       | 1.353.515       | 1.353.51          |
| <b>SMK</b>         | 550.000         | 550.000.000       | 1.846.538       | 1.846.538.000     |
| <b>Jumlah</b>      | 9.191.844       | 5.323.564.950     | 17.920.270      | 11.099.032.750    |

Sumber: Dirjen Dikdasmen (2015)

Pada tahun ajaran 2014/2015, secara garis besar diberikan dana PIP kepada siswa SD sebesar Rp. 450.000, siswa SMP sebesar Rp 750.000, siswa SMA dan SMK sebesar Rp1.000.000 per siswa per tahun. Ada catatan bagi siswa yang berada di kelas akhir pada setiap jenjang pendidikan, hanya memperoleh setengah dari jumlah dana PIP per tahun. Besaran dana PIP per siswa tersebut sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah dinilai penting agar dapat mencukupi biaya pribadi siswa, seperti untuk uang transpor, biaya seragam, perlengkapan sekolah dan lain-lain. Peningkatan pemberian subsidi siswa miskin tersebut didasarkan pada hasil evaluasi yang mengindikasikan jumlah subsidi yang telah diberikan tersebut belum dapat menutup beban biaya pribadi siswa. Bank Dunia (dalam TNP2K, 2012) menemukan bahwa satuan biaya SSM diketahui belum dapat mencakup seluruh biaya pribadi pendidikan siswa miskin.

Program Indonesia Pintar bagi siswa miskin terus semakin ditingkatkan baik dari segi jumlah penerima maupun besaran dana per siswa. Ini dilakukan sebagai *quality assurance* terutama untuk menjamin siswa miskin tetap bersekolah, mampu melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, bahkan dengan prestasi yang tinggi. Pelaksanaan program subsidi siswa dapat dinilai berhasil manakala program tersebut mencapai sasaran serta berdampak positif sebagaimana direncanakan yakni terwujudnya kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan agar siswa mampu menyelesaikan pendidikan

---

dan berpeluang melanjutkan pendidikan. Kemendikbud terus mengintegrasikan data penerima PIP dari SD, SMP, dan SM untuk merancang keberlangsungan belajar bagi siswa miskin hingga Perguruan Tinggi (Kemendikbud, 2012). Namun, hingga saat ini tampaknya belum dipahami secara komprehensif apakah program tersebut telah dilaksanakan secara efektif serta berkontribusi terhadap peningkatan pemerataan dan perluasan akses Pendidikan. Demikian pula, pelaksanaan Program Indonesia Pintar ini juga melibatkan berbagai instansi terkait dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dari proses merencanakan, melaksanakan hingga mengevaluasinya. Begitu pula dengan pihak-pihak yang terkait di program ini, apakah telah melaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajibannya?.

Disadari bahwa dalam pelaksanaannya PIP terkadang masih belum sesuai dengan rencana, baik disimak dari sasaran, mekanisme penyaluran, besaran dana dan pemanfaatannya, serta bentuk penyimpangan lainnya. Gejala adanya penyimpangan pelaksanaan PIP dan kurang efektifnya program tersebut terkadang dilontarkan oleh berbagai pihak. Komisi X DPR bahkan menyarankan agar dilakukan evaluasi PIP lebih cermat. Dari sisi sasaran, hasil kunjungan Komisi X di Kalimantan Barat dan Bengkulu misalnya, menemukan data PIP yang tidak akurat sehingga tidak tepat sasaran. Sejumlah siswa semestinya memperoleh dana bantuan PIP, ternyata siswa tidak mendapatkannya. Sebaliknya Siswa yang tidak berhak malah menerima dana tersebut. Persoalan lain ditemukan di Provinsi Lampung, diterima laporan tentang adanya pemotongan dana PIP siswa di Kota Bandarlampung, sebagaimana diberitakan pula di media massa lokal Lampung pada awal Januari 2016. Selain pemotongan dana, pada mekanisme penyalurannya juga terjadi penyimpangan. Anggota Komisi X Elviana menyampaikan kepada Mendikbud bahwa dalam proses penyaluran dana PIP yang bekerja dengan Bank melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), masih terdapat kesalah pahaman dalam mekanisme penyaluran pencairan dana yang disampaikan dengan ilustrasi sebagai berikut.

“Misalnya, Bank BRI memperlakukan siswa seperti nasabah biasa, sehingga jika ada data yang kurang seperti KTP, maka dana itu tidak bisa cair. Bank BRI juga tidak tahu jika KIP juga ada untuk anak – anak yang putus sekolah,” tegas Elviana, di Gedung Nusantara I, Rabu (2/09/15).”.

---

Selanjutnya Anggota DPR tersebut menyayangkan terjadinya pemotongan dan masalah penyaluran dana PIP dengan menyampaikan seperti berikut.

"Padahal tidak boleh ada pemotongan apa pun dalam program pemerintah pusat ini, sehingga kalau ada oknum tertentu yang melakukan pemotongan terhadap dana bantuan PIP itu, harus dilaporkan kepada pihak berwajib. Siapa pun tidak boleh melakukan pemotongan dengan alasan apa pun, karena menurutnya tidak ada biaya administrasi untuk pencairan dana tersebut. Pihak bank penyalur pun tidak boleh memotong, apalagi pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan, apalagi jika ada oknum lain yang meminta uang yang sudah menjadi hak siswa itu. Jadi, orang tua jangan takut, harus berani melaporkan, itu hak rakyat, program tsb pembiayaannya berasal dari uang pajak rakyat, jadi jangan takut utk melaporkan semua tindakan yg salah," kata Dwita Ria pula. (<http://www.antaranews.com/berita/541543/anggota-dpr-sayangkan-pemotongan-program-indonesia-pintar> (18/4 2016 pk 15.10))

Terjadinya gejala adanya penyimpangan pelaksanaan PIP juga menjadi perhatian para pejabat daerah. Misalnya di Malang, Bupati Malang akan segera bertindak melakukan evaluasi pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini dilakukan setelah ada laporan terjadinya pemotongan dana yang diterima lewat KIP di wilayahnya. Ini dilakukan mengingat PIP dinilai sebagai “keputusan politik yang harus dikawal” yang tujuannya untuk meringankan beban rakyat dalam memperoleh pendidikan. Seharusnya setiap siswa semestinya memperoleh kemudahan dan menerimanya secara utuh, tidak boleh ada potongan berupa apa pun. Jangan sampai KIP menjadi sumber pemotongan dana tidak resmi. Berpijak dari temuan dan gejala penyimpangan pelaksanaan PIP tersebut, perlu dikaji apakah program ini telah dilaksanakan sesuai dengan yang dicanangkan, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu. Lebih dari itu perlu dikaji pula tentang bagaimanakah bantuan siswa miskin program PIP ini berdampak terhadap aktivitas siswa, absensi siswa/disiplin dan motivasi, prestasi belajar siswa; serta keberlanjutan pendidikan siswa?”

---

## 1.2 Pertanyaan Kebijakan

Pemerintah telah melaksanakan PIP dengan pemberian subsidi siswa miskin dalam jumlah dana yang cukup besar. Program tersebut pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terlaksanakannya program pemerataan pendidikan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang bermutu, khususnya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, peluang keberlanjutan sekolah, pengurangan angka putus sekolah, dan peningkatan prestasi.

Program Indonesia Pintar dinilai efektif jika memenuhi kriteria pencapaian tujuan program tersebut. Pada saat ini dari sisi kriteria keefektifan (*effectiveness*) belum dipahami secara komprehensif bagaimanakah ketepatan pelaksanaan PIP berdasarkan karakteristik siswa, besaran dana yang diterima, dan ketepatan waktu penerimaan, serta pemanfaatan dana PIP oleh siswa (dan orangtua siswa)? Begitu juga, dari sisi kriteria dampak, pemahamannya belum secara komprehensif, bagaimanakah dampak pemberian bantuan pendanaan kepada siswa dari keluarga miskin melalui skema KIP terkait dengan aktivitas siswa, absensi siswa, keberlangsungan belajar siswa mencakup disiplin dan motivasi, serta prestasi belajar siswa?

Pemahaman tentang aspek keefektifan (*effectiveness*) dan dampak terhadap penyelenggaraan PIP ini penting guna memberikan rekomendasi kebijakan tentang strategi pemberian subsidi yang efektif kepada siswa miskin yang dapat mendukung siswa menyelesaikan pendidikan secara lancar dan dengan prestasi yang baik. Di dalam konteks tersebut studi ini mengkaji permasalahan yang secara spesifik dirumuskan dalam pertanyaan kebijakan sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah efektivitas PIP telah mencapai sasaran bagi anak usia sekolah (SD, SMP, SMA/SMK) dari keluarga tidak mampu; dan bagaimana ketepatan besarnya dana, ketepatan waktu serta ketepatan penggunaan?
- b. Bagaimanakah dampak PIP bagi siswa miskin dilihat dari aspek prestasi belajar, disiplin dan motivasi belajar, serta aktivitas dalam program sekolah ?

---

## 1.3 Tujuan

### a. Tujuan Umum

Mengetahui dan mengukur aspek efektivitas program PIP bagi siswa miskin guna memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan strategi pemberian subsidi (PIP) yang efektif kepada siswa miskin yang dapat mendukung siswa menyelesaikan dan melanjutkan pendidikan secara lancar dengan prestasi yang baik.

### b. Tujuan khusus

- 1) Mengetahui efektifitas PIP kepada siswa tidak mamapu terkait dengan:
  - a) Sasaran penerima;
  - b) Waktu penerimaan dana ;
  - c) pemanfaatan dana tunai PIP terkait kebutuhan pendidikan/ pribadi siswa (biaya transport, buku, seragam, dan uang saku)
- 2) Mengetahui dampak PIP terkait dengan:
  - a) Disiplin/absensi siswa
  - b) Motivasi belajar,
  - c) prestasi belajar siswa

## 1.4 Limitasi

Kajian ini membatasi hal-hal sebagai berikut.

- a. Fokus jenjang pendidikan meliputi satuan pendidikan formal SD, SMP, SMA, dan SMK.
- b. Sasaran penerima bantuan adalah siswa penerima subsidi pada tahun 2015 yang bersekolah di sekolah negeri dan swasta.

- 
- c. Guna memahami dan mengukur dampak PIP terhadap prestasi belajar, dan Keberlanjutan ke jenjang pendidikan berikutnya, perlu ditelusuri siswa penerima bantuan PIP pada tahun 2015, serta siswa penerima Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SD dan SMP serta Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk SMA/SMK, sebelum tahun 2015.

## **1.5 Hasil Yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan mengenai strategi pemberian subsidi yang efektif kepada siswa miskin yang dapat mendukung siswa menyelesaikan pendidikan dengan prestasi yang baik.

---

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Program Indonesia Pintar merupakan bentuk pendanaan pendidikan yang diberikan langsung kepada siswa. Mereka yang menerima adalah siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Dengan adanya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun dan kemudian akan dilanjutkan menjadi Wajib belajar 12 tahun, mengharuskan pemerintah untuk turun tangan dalam pembiayaan. Hal ini dilakukan karena jika tidak dilakukan maka kecil kemungkinan target Wajar Dikdas 9 Tahun dan Wajar 12 tahun dapat dicapai. Realitas stratifikasi sosial berdasarkan status sosial ekonomi masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa banyaknya orang tua siswa usia pendidikan dasar dan menengah yang tidak dapat membiayai pendidikan anak. Di lain pihak, dengan diselenggarakannya kedua program tersebut pendidikan tidak saja wajib, tetapi menjadi hak bagi setiap anak usia pendidikan dasar dan menengah tanpa diskriminasi berdasarkan pada suku bangsa, agama, maupun stratifikasi sosial.

Pendanaan pendidikan pada tingkat siswa bukan merupakan program yang bersifat eksklusif untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan siswa, tetapi ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan siswa sampai selesai jenjang pendidikan menengah baik satuan pendidikan negeri maupun swasta. Namun demikian meskipun pemerintah juga telah menyelenggarakan program pendanaan dengan satuan pendidikan sebagai basis, yaitu program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), skema pendanaan ini belum dapat menjamin keberlangsungan pendidikan anak usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi sampai selesai. Skema pendanaan yang ditujukan pada satuan pendidikan dalam rangka untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan serta biaya manajemen yang menyertainya.

PIP merupakan skema pendanaan yang secara langsung memberikan dukungan dana tidak langsung bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Program tersebut bersifat *complementary* terhadap program yang dialokasikan untuk satuan pendidikan.

Dengan argumentasi tersebut bagian pertama dari Bab ini menyajikan konteks konseptual kebijakan pendidikan dikaitkan dengan perluasan dan

---

akses memperoleh pendidikan serta kebijakan pendanaan pendidikan. Pembahasan pada bagian ini mendasarkan diri pada suatu *premise* bahwa kebijakan pendidikan bersifat *non-diskriminatif*. Dalam konsep kebijakan pendidikan, konsep yang diajukan adalah *equity*.

Bagian kedua menyajikan strategi pendanaan pendidikan untuk menjamin *equity* seperti yang diketengahkan pada bagian sebelumnya serta pelaksanaan program PIP. Dalam hal ini, PIP sebagai bagian dari pendanaan pendidikan diarahkan untuk menjamin *equity* tersebut.

## **2.1 Perluasan dan Pemerataan Akses Memperoleh Pendidikan**

Secara umum perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama, terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat di daerah terpencil. Pemerataan pendidikan formal terdiri dari pemertaaan pendidikan di tingkat prasekolah, sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi.

Prinsip dasar pemerataan ini sangat penting guna memberikan kesempatan bagi semua golongan masyarakat, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. Kedua, ada alasan ideologis dibalik gerakan protes itu. Selama ini, yang bisa menikmati pendidikan tinggi adalah orang-orang yang berasal dari keluarga kelas menengah. Bagi orang-orang yang berasal dari kelas bawah (keluarga miskin) mengalami kesulitan mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan biaya yang mahal itu (Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2010).

Perluasan dan pemerataan akses memperoleh pendidikan memiliki tiga arti, yaitu a) persamaan kesempatan (*equality opportunity*), b) aksesibilitas (*equality of access*), dan c) keadilan dan kewajiban (*equity*).

Persamaan kesempatan dimaksudkan agar setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan. Aksesibilitas berarti bahwa setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua satuan, jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Keadilan mengandung implikasi adanya perbedaan perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik. Keadilan dalam memperoleh pendidikan meninjau apakah kesempatan memperoleh

---

pendidikan telah sama antar-berbagai kelompok. Tinjauan keadilan ini dapat dilakukan dengan membandingkan antar jenjang pendidikan, antar-jender (pria/wanita), antar status ekonomi keluarga, dan lokasi geografis (antar provinsi, antar kabupaten/kota, antar kecamatan, antara daerah pedesaan dan perkotaan).

Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua seratus persen (100 %) penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan untuk menikmati pendidikan. Ketika 100 persen penduduk usia sekolah telah memperoleh pendidikan maka dapat dikatakan bahwa keadilan telah tercapai.

Pada saat penduduk usia sekolah hanya memperoleh kesempatan untuk menikmati pendidikan baru mencapai 80 persen, maka timbul pertanyaan apakah semua kelompok memperoleh kesempatan yang sama. Di sinilah aspek keadilan menjadi lebih nyata. Kemungkinan yang dapat terjadi misalnya, 90 persen pria usia sekolah telah menikmati pendidikan, sementara wanita baru mencapai 70 persen. Dari sini tampak adanya ketidakadilan dalam kesempatan memperoleh pendidikan. Data penduduk menurut jender (pria dan wanita) dan penduduk menurut lokasi geografis tempat tinggal (kota dan desa) biasanya ada di statistik yang dikeluarkan oleh BPS. Data siswa menurut jender biasanya ada di sekolah, Dinas Pendidikan Kecamatan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Dinas Pendidikan Provinsi. Data siswa menurut lokasi geografis agak sulit dicari, karena biasanya tidak tersedia setiap saat. Data yang sulit dicari, karena biasanya tidak tersedia adalah data penduduk dan data siswa menurut status ekonomi (kaya dan miskin).

## **2.2 Konsep dan Pengukuran Kemiskinan**

Ada dua permasalahan strategis yang saling terkait antara kebijakan peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber dana. yaitu kemiskinan dan keterisolasian geografis. Faktor kemiskinan dijadikan pertimbangan karena berkaitan dengan kemampuan orang tua untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk membiayai sekolah anaknya. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomis lalu didiskriminasikan dari pelayanan pendidikan.

---

Permasalahan berikutnya yaitu keterisolasian geografis yang sudah ada sejak Indonesia merdeka. Pengabaian terhadap masalah ini mempunyai konsekuensi terhadap efektivitas pencapaian kebijakan pendidikan. Mereka juga warga Indonesia yang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Dengan demikian muncul pertanyaan yang dianggap krusial yaitu Bagaimana pendidikan dapat mengentaskan kemiskinan? Ini tentu sesuai kebijakan pendidikan yang diarahkan oleh pemerintah. Pemberian subsidi bagi siswa miskin misalnya, merupakan intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmatif.

Konsep kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang diartikan secara relatif sesuai dengan persepsi dirinya. Kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi tersebut mencakup berbagai aspek baik kebutuhan ekonomi, sosial, politik, emosional maupun spiritual.

Konsep kemiskinan menurut BPS, terkait dengan kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun bukan berupa makanan. Seseorang atau rumahtangga dikatakan miskin bila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang disertakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan (Riant Nugroho, 2007).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (1993) mendefinisikan kemiskinan sebagai “suatu situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekurangan yang apa adanya”.

Menurut Suparlan (1995) dalam kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian miskin dalam arti luas tersebut tidak cukup operasional dalam analisis program kebijakan. Kalau kemiskinan diartikan dalam pengertian luas seperti itu maka akan mengalami kesulitan teknis ketika harus menentukan siapa sebenarnya yang masuk kategori penduduk miskin. Oleh karena itu dalam banyak analisis, kemiskinan lebih diartikan secara sempit yaitu miskin secara ekonomis.

---

Pengkajian kemiskinan sedikitnya ada sembilan dimensi yang perlu dipertimbangkan yakni: 1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang dan perumahan), 2) aksesibilitas yang rendah terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi yang baik, air bersih dan transportasi), 3) lemahnya kemampuan untuk melakukan akumulasi kapital, 4) rentan terhadap faktor goncang faktor eksternal yang bersifat individual maupun masal, 5) rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penguasaan sumber daya alam, 6) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, 7) terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan, 8) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, dan 9) ketidakmampuan dan ketidak beruntungan secara sosial (Rusastra, 2006).

Bappenas (2004) menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dan pendekatan pendapatan (*income approach*). Pendekatan kebutuhan dasar (*Basic Need Approach*), melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Pendekatan pendapatan (*Income Approach*), melihat kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat.

Sampai saat ini BPS (2005) menggunakan batas garis kemiskinan berdasarkan data konsumsi dan pengeluaran komoditas pangan dan non pangan. Komoditas pangan terpilih terdiri dari 52 macam, sedangkan komoditas non pangan terdiri dari 27 jenis untuk kota dan 26 jenis untuk desa. Garis kemiskinan yang telah ditetapkan BPS dari tahun ketahun mengalami perubahan. Seperti menurut *Indonesian Nutrition Network* (INN) tahun 2003 adalah Rp. 96.956 untuk perkotaan dan Rp. 72.780 untuk pedesaan. Garis kemiskinan yang diterapkannya adalah keluarga yang memiliki penghasilan di bawah Rp. 150.000 perbulan. Bahkan Bappenas yang sama mendasarkan pada indikator BPS tahun 2005 batas 180.000 perbulan.

Untuk mengukur kemiskinan dalam arti luas jelas sulit dilakukan. Sulit untuk menentukan siapakah yang masuk kategori miskin secara politik, sosial apalagi spiritual. Oleh karena itu pembahasan dalam ukuran kemiskinan disini

---

diartikan secara sempit yaitu dalam arti ekonomis. Kemiskinan dalam arti ekonomis yaitu ketidakmampuan ekonomis seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satu kebutuhan dasar jika dikaitkan dengan kajian ini adalah kebutuhan untuk mengakses pendidikan.

Keterbatasan terhadap akses pendidikan merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahalnya biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan (Harniati, 2010).

Hasil diskusi dengan TN2PK memberikan gambaran tentang proses identifikasi siswa miskin yang didasarkan pada sensus data penduduk miskin. Berdasarkan pada data yang terkumpul tersebut ditentukan percentile 40% bawah sebagai target penerima Program Indonesia Pintar.

Dalam penjelasan tersebut dijelaskan juga metode pengumpulan data dan variable-variabel yang dikumpulkan. Sasaran dari pengumpulan data adalah 97 juta rumah tangga. Dijelaskan bahwa pengertian rumah tangga adalah satu keluarga baik *nuclear* maupun *extended family*. Untuk menentukan tingkat kemiskinan variable yang dijadikan untuk pengumpulan data antara lain kondisi bangunan rumah, konsumsi keluarga, dan penghasilan keluarga.

Pemberian bantuan kepada siswa didasarkan pada tingkat kemiskinan keluarga. Ketika keluarga dinyatakan miskin yakni keluarga yang masuk dalam *range percentile* 40% bawah, maka semua anaknya yang sekolah secara otomatis mendapatkan dana Program Indonesia Pintar. Berikut data anak usia sekolah yang dihitung berdasarkan persentil kesejahteraan 20 %, 25% dan 40%.

**Tabel 2.1: Data anak usia sekolah 6-12 tahun berdasarkan Persentil Kesejahteraan**

| No                                 | Jenjang Pendidikan | Persentil 20 % |                    | Persentil 25 % |                    | Persentil 40 % |                    |
|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                                    |                    | Bersekolah     | Tidak Sekolah Lagi | Bersekolah     | Tidak Sekolah Lagi | Bersekolah     | Tidak Sekolah Lagi |
| Kemendikbud                        |                    |                |                    |                |                    |                |                    |
| 1                                  | SD&SDLB            | 6,679,302      | 1,789,594          | 7,672,155      | 1,959,926          | 9,466,285      | 2,209,011          |
| 2                                  | SMP&SMPLB          | 2,721,227      | 1,152,230          | 3,164,110      | 1,374,855          | 3,982,660      | 1,761,590          |
| 3                                  | SMA&SMALB          | 1,155,826      | 654,877            | 1,444,436      | 870,728            | 2,104,054      | 1,443,596          |
| Total Kemendikbud                  |                    | 10,556,355     | 3,596,701          | 12,280,701     | 4,205,509          | 15,552,999     | 5,414,197          |
| Kemenag                            |                    |                |                    |                |                    |                |                    |
| 1                                  | MI                 | 319,998        | 71,527             | 364,731        | 77,730             | 444,976        | 86,087             |
| 2                                  | MTs                | 356,978        | 156,384            | 408,900        | 182,795            | 501,551        | 227,676            |
| 3                                  | MA                 | 89,904         | 45,427             | 109,618        | 58,980             | 152,297        | 92,643             |
| Total Kemenag                      |                    | 766,880        | 273,338            | 883,249        | 319,505            | 1,098,824      | 406,406            |
| Kemendikbud & Kemenag              |                    | 11,323,235     | 3,870,039          | 13,163,950     | 4,525,014          | 16,651,823     | 5,820,603          |
| Total Bersekolah dan Tidak Sekolah |                    | 15,193,274     |                    | 17,688,964     |                    | 22,472,426     |                    |

Sumber: Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin 2015/PPLS 2015

## 2.3 Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Prinsip yang berlaku pada kebijakan publik berlaku juga pada kebijakan pendidikan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebijakan pendidikan memberikan pelayanan kepada sekitar 37 juta peserta didik dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah, serta sekitar 3 juta guru yang tersebar di seluruh teritori Indonesia. Berdasarkan pada besarnya sasaran, maka jumlah tersebut dapat dikategorikan sebagai publik. Fakta yang menunjukkan bahwa adanya peserta didik yang tinggal di daerah pinggiran dan pedesaan, demikian juga dengan guru yang mengajar di daerah pedesaan atau bahkan daerah terisolasi, maka maksimalisasi hasil implementasi kebijakan pendidikan perlu untuk memasukkan kriteria equity.

Prinsip equity dalam pendidikan adalah bahwa setiap anak dari berbagai latar belakang keluarga dan latar belakang tempat tinggal berhak mendapatkan pelayanan pendidikan bermutu. Demikian juga dengan guru. Dimanapun mereka mengajar setiap guru mempunyai hak yang sama untuk meningkatkan kompetensinya. Dengan diberlakukannya jabatan profesionalisme guru, maka peningkatan kompetensi mengantarkan setiap guru pada pencapaian profesionalisme yang pada tingkat berikutnya untuk mendapatkan

---

penghasilanya yang layak. Untuk menjamin equity dalam implementasi kebijakan pendidikan, para ahli kebijakan pendidikan, menyarankan strategi *affirmative action* (Hatcher, 1998). Dengan strategi ini prioritas kebijakan diutamakan kepada subyek kebijakan pendidikan (peserta didik dan guru) yang berasal dari kelompok marginal baik berdasarkan kriteria ekonomi maupun geografis. Tanpa intervensi dari pemerintah mereka yang berada pada kondisi marjinal tidak pernah akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Dalam jangka panjang kondisi marjinal akan tetap menjadi bagian dari kehidupannya. Coleman, (2003) mengindikasikan adanya polemik yang muncul dengan kebijakan *affirmative action*. Oleh karena kebijakan ini mencerminkan preferensi terhadap kelompok sosial stratifikasi bawah, terutama kelompok marginal, maka apakah hal ini memperkecil kesempatan bagi mereka yang berada pada stratifikasi sosial atas untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Kedua, apakah dengan mendapatkan kesempatan pelayanan pendidikan maka kelompok marjinal akan dapat berprestasi sebagai mana kelompok dari stratifikasi sosial atas.

Permasalahan semacam ini muncul dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia ketika salah satu kebijakan Presiden Joko Widodo yang diekspresikan dalam Nawa Cita mengkombinasikan antara perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan menjadi satu tema kebijakan. Secara eksplisit kebijakan tersebut muncul pada Cita nomer 5 yang berbunyi: Kami akan meningkat kualitas hidup manusia Indonesia: Program “Indonesia Pintar” melalui Wajib Belajar 12 tahun bebas pungutan.

Dengan Cita nomor 5 ini maka tema kebijakan adalah perluasan pendidikan yang bermutu. *Affirmative action* masih menjadi kebijakan relevan tetapi kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari kelompok marjinal baik dalam arti geografis maupun sosial ekonomi, tetapi juga jaminan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada mereka sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk berprestasi dengan rekan mereka dari kelompok kelas atas atau yang tinggal di daerah perkotaan.

Konsekuensi dari implementasi kebijakan ini tercermin dari skema pendanaan pendidikan. Dengan tetap mempertimbangkan *affirmative action* menjadi tidak adil jika sistem pendanaan pendidikan menganut sistem *flat rates*. Dengan berdasarkan pada sistem ini semua peserta didik akan mendapat porsi yang sama tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan lokasi

---

geografis tempat tinggal peserta didik. Sistem pendanaan pendidikan dianggap mempertimbangkan aspek keadilan dengan melalui sistem *regressive rates*. Mereka yang berasal dari kelompok marjinal berhak untuk mendapat alokasi pendanaan yang lebih banyak dibanding dengan dari kelompok yang lebih beruntung.

Sistem pendidikan untuk mendukung pelayanan pendidikan yang bermutu dan lebih berkeadilan tidak hanya memusatkan pada peserta didik dan guru tetapi pada kelembagaan pelayanan pendidikan. Dalam hal ini pengertian kelembagaan tidak diartikan sebagai sekolah, tetapi sistem pelayanan pendidikan yang mapan dan berkelanjutan. Dengan pengertian seperti ini, maka pelayanan pendidikan dapat menjangkau semua peserta didik dari kelompok marjinal. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 13 mengindikasikan bahwa jalur pendidikan terdiri dari formal, non-formal, dan informal. Dengan diselenggarakannya tiga jenis jalur diharapkan dapat mengakomodasikan peserta didik dari berbagai latar belakang dan stratifikasi sosial. Peserta didik dari kelompok marjinal dapat diakomodasikan pada jalur nonformal.

Pada skala makro affirmative action terefleksi Cita nomor 3 yang berbunyi: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan: Desentralisasi Asimetris; Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dengan kawasan perbatasan”. Cita ini memang tidak secara eksplisit mengarah pada sektor pendidikan secara eksklusif, tetapi kata “pemerataan pembangunan” merupakan konsep inklusif dan pendidikan termasuk di dalamnya.

Realitas bahwa kapasitas fiskal setiap kabupaten/kota tidak sama menjadi dasar untuk memberlakukan kebijakan affirmative action pada tingkat daerah. Sebaliknya realitas ini tidak menjadi justifikasi untuk mendiskriminasikan peserta didik yang bertempat tinggal pada kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal rendah. Merupakan suatu strategi yang tepat jika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengarahkan pembangunan dari pinggiran. Strategi semacam ini tidak merupakan strategi yang hanya terjadi di Indonesia. Hasil reuiu pendanaan pendidikan di Cambodia oleh Pheng; Sovonn; dan Soly. (2001) dan Ba Can, et.al. (2001) di Vietnem menunjukkan bahwa pendanaan pendidikan di kedua negara ini mempertimbangkan disparitas kemampuan daerah dalam pendanaan pendidikan. Pendanaan

---

dengan skema semacam ini tidak hanya menjadi ciri khas negara-negara berkembang. Fakta bahwa terdapat kapasitas fiskal yang berbeda juga terjadi pada negara maju. Artikel yang ditulis Kearney (1994) tentang sistem pendanaan pendidikan pada negara bagian Michigan, Amerika Serikat mengikuti strategi yang sama ketika terdapat perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Hal ini nampak dari pernyataan sebagai berikut: *“the basic concept undergirding Michigan’s new foundation program is that the state will guarantee a district a basic level of funding per pupil provided the district levies a local voter-approved property tax at millage rate set by the legislature”* (Kearney, 1994:92).

Penyelenggaraan pendidikan bermutu yang merata bagi semua peserta didik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dari perspektif ekonomi, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tidak hanya memberikan nilai balik bagi individu peserta didik tetapi juga bagi negara Indonesia. Pada tingkat individu peserta didik nilai balik diwujudkan dalam peningkatan taraf kehidupannya, dan pada tingkat negara diwujudkan pada pertumbuhan ekonomi dan demokratisasi dalam kehidupan politik dan harmonisasi kehidupan sosial. Dalam konteks ini, mutu pendidikan merupakan dasar bagi peningkatan relevansi pendidikan.

Dengan merujuk pada misi Cita nomor 5, sistem pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan bagi peserta didik dari kelompok marjinal melalui jalur non-formal maupun sistem non-konvensional seperti SMP-Terbuka tetap memperhatikan karakteristik sosial peserta didik. Bagaimanapun mutu pelayanan pendidikan merupakan pre-requisite bagi setiap bentuk pelayanan pendidikan kepada semua peserta didik. Keberhasilan setiap pendidikan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar merupakan bekal bagi mereka ketika mereka memasuki dunia kerja.

Pelayanan pendidikan yang bermutu kepada semua peserta didik secara non-diskriminatif sebagai modalitas untuk menghasilkan rakyat Indonesia yang kompeten mempunyai keterkaitan dengan Cita nomor 6 yang berbunyi: “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya: Membangun sejumlah Science and technopark di kawasan Politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana teknologi terkini”. Secara spesifik Cita ini mengarahkan pada pengembangan program-program pendidikan kejuruan, namun berdasarkan pada argumentasi theory of human capital, peningkatan

---

produktivitas tidak harus secara spesifik hanya didukung oleh program-program pendidikan kejuruan, tetapi juga pendidikan umum sepanjang kriteria mutu pelayanan pendidikan menjadi dasarnya. Dalam konteks Cita nomor 6 tersebut penguatan program pendidikan kejuruan melalui penyediaan Science and technopark di kawasan Politeknik dan SMK-SMK merupakan prioritas. Dengan kata lain prioritas ini tidak secara otomatis menegasi pentingnya peningkatan mutu pendidikan.

Efektivitas peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan paling tidak berkaitan dengan tiga sektor lainnya yaitu kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Ketertkaitan sektor kesehatan adalah status gizi anak. Argumentasi yang dikemukakan oleh Ritonga (2014) status gizi menentukan ketahanan anak melakukan berbagai kegiatan. Dalam konteks pendidikan ketahanan ini juga meliputi ketahanan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan kemampuan berkonsentrasi dalam memahami setiap penjelasan yang dilakukan oleh guru.

Kondisi infrastruktur memfasilitasi bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dalam arti memberi kemudahan bagi peserta didik untuk berangkat ke sekolah atau lembaga pendidikan. Suatu daerah dikatakan terisolasi secara geografis bukan karena posisinya, tetapi karena tidak tersedianya infrasturktur yang memadai menuju ke daerah tersebut. Dengan kondisi yang terisolir tidak hanya menghambat bagi peserta didik untuk menuju ke sekolah, tetapi juga menjadikan biaya ke sekolah menjadi lebih mahal jika kondisi infrastruktur menunjuk ke sekolah tidak memadai. Media Indonesia (2012) memberitakan akibat permasalahan infrastruktur pembangunan sekolah dapat terhambat sehingga ribuan peserta didik tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Dalam alasan yang sama, dengan kasus yang berbeda, Baily dan Palter (2014) mengindikasikan bahwa keterlambabatan dalam pembangunan infrastruktur mempunyai dampak domino terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **2.4 Pembiayaan Pendidikan**

Pemerataan pendidikan merupakan amanat Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB III Pasal 4 tentang Prinsip

---

Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi; “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Hal ini juga tercantum dalam BAB IV Pasal 5 Bagian Kesatu tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara yang berbunyi;”

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Oleh karena itu undang-undang mengamanatkan agar pemerintah memperhatikan anak-anak usia sekolah agar dapat mengikuti pendidikan dasar tanpa dibebani biaya yang dapat menghambat proses pendidikan. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”

Kalau kita kaji isi dari pasal tersebut banyak makna yang terkandung di dalamnya, di antaranya : (1) Dana untuk pendidikan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah; (2) Anak usia sekolah yaitu usia tujuh sampai lima belas tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar tanpa dikenakan biaya; (3) Anak yang berhak mendapatkan pendidikan dasar tanpa biaya ini tidak memandang dari golongan miskin atau kaya. Mereka semua merupakan tanggung jawab pemerintah. Dasar kebijakan tersebut di antaranya adalah :

1. Amanat UUD 1945 pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”
2. Pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”

- 
3. Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”

Berdasarkan undang-undang tersebut seharusnya pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakannya. Karena selain tuntutan dari undang-undang, pendidikan juga dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.

Wajib belajar ala Indonesia tidak identik dengan wajib belajar (*compulsory education*) seperti yang dipersepsi oleh negara-negara maju, yang secara ekonomis telah lebih makmur. Dalam pengertian negara maju, *compulsory education* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah; (2) diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar; (3) tolok ukur keberhasilan wajib belajar adalah tiadanya orangtua yang terkena sanksi karena telah mendorong anaknya bersekolah; dan (4) ada sanksi bagi orangtua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah.

Adapun ciri-ciri wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Indonesia ialah: (1) tidak bersifat paksaan, melainkan himbauan; (2) tidak ada sanksi hukum, dan yang lebih menonjol adalah aspek moral, yakni orangtua dan peserta didik merasa terpenggil untuk mengikuti pendidikan dasar karena berbagai kemudahan telah disediakan; (3) tidak diatur dengan undang-undang tersendiri; dan (4) keberhasilan diukur dengan angka partisipasi dalam pendidikan.

Untuk jenjang pendidikan dasar, pandangan yang paling dominan di banyak negara sejak tahun 1940-an adalah bahwa pendidikan dasar harus bebas biaya (Bray, 2002:31). Dengan kata lain, pemerintah harus membiayai sepenuhnya pendidikan tingkat dasar. Pandangan ini antara lain terlihat dari *Artikel 26 United Nation Declaration of Human Rights* yang menyatakan: “*Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages.*”

Menurut Woodhall dalam Psacharopoulos (1985), *cost-effectiveness analysis* adalah suatu teknik untuk mengukur hubungan antara total input atau biaya-biaya dari suatu proyek atau kegiatan dengan output atau hasil yang diperoleh. *Cost* dan *effectiveness*, keduanya harus diukur secara kuantitatif, namun tidak perlu dihitung dalam satuan uang (*monetary terms*). Oleh karena itu, analisis *cost-effectiveness* perlu dibedakan dengan analisis *cost-benefit*

---

yang mengukur biaya dan manfaat suatu proyek dalam satuan uang (*monetary terms*) untuk mengetahui tingkat balikan (*rate of return*).

UU Pendidikan No. 20 tahun 2003 secara eksplisit mewajibkan pemerintah untuk memberikan beasiswa yang dapat menjamin kesempatan yang sama bagi semua anak (serta bagi semua warga negara) dalam memperoleh Pendidikan Dasar. Sebuah program baru bantuan sekolah di tahun 2005 - Bantuan Operasi Sekolah (BOS) –diperkenalkan sebagai bentuk dukungan pendidikan secara langsung kepada rumah tangga agar dapat terus mengirimkan anak mereka bersekolah tanpa harus membayar biaya sekolah seperti biaya SPP. Kemudian pada tahun 2008, Program Bantuan Siswa Miskin/BSM juga diperkenalkan dengan tujuan agar dapat membantu siswa miskin dalam mengatasi permasalahan tingginya biaya pendidikan lainnya. Sebelumnya program ini dikenal dengan Program Beasiswa. Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 16 IPB/2012 mengatur mengenai pencairan dan penyaluran dana BSM dan Bea Siswa Bakat dan Prestasi yang bersumber dari APBN kepada penerima dana termasuk pertanggungjawabannya.

Menurut Beeby (1975) penyebab utama anak Indonesia tidak bersekolah adalah masalah pembiayaan. Sementara, menurut data Balitbang Kemdikbud (2010) penyebab anak Indonesia tidak bersekolah berkaitan dengan analisis Biaya Satuan Pendidikan (BSP) untuk pendidikan dasar dan menengah, biaya yang dikeluarkan meliputi: (1) buku dan alat tulis; (2) pakaian dan perlengkapan sekolah; (3) akomodasi; (4) transportasi; (5) konsumsi; (6) kesehatan; (7) karyawisata; (8) uang saku; (9) kursus; (10) iuran sekolah; (11) *Foregone earning*

Semua biaya tersebut tidak bisa dibebankan pada orangtua, mengingat masih banyak rakyat Indonesia yang miskin. Keadaan ini tampak sekali masih banyak anak yang putus sekolah, pengangguran dan sebagainya karena hanya alasan tanpa biaya. Biaya merupakan faktor penting dalam pendidikan. Namun memenuhi hajat hidup dalam hal ini kebutuhan pokok lebih penting. Hal ini yang menyebabkan banyak orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya. Banyak sekali anak usia sekolah yang harus membantu orangtuanya mencari nafkah.

---

## 2.5 Intervensi Kebijakan Pendidikan Melalui Sistem Pendanaan

Pendanaan pendidikan merupakan strategi intervensi pendidikan yang dapat diarahkan untuk peningkatan akses maupun mutu pendidikan. Pendanaan pendidikan merupakan bagian dari strategi intervensi perluasan akses pendidikan jika pendanaan pendidikan diarahkan pada penyediaan prasarana pendidikan, sedangkan pendanaan pendidikan menjadi strategi intervensi peningkatan mutu pendidikan ketika dialokasikan untuk penyediaan sarana pendidikan.

PIP dapat menjadi strategi untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan. PIP menjadi strategi intervensi akses karena tujuan dari PIP untuk membantu siswa dari keluarga miskin untuk dapat menyelesaikan pendidikannya pada jenjang tertentu. Namun demikian efektivitas PIP sebagai intervensi kebijakan untuk mendukung keberhasilan siswa dalam menyelesaikan pendidikannya dan mendukung potensi akademisnya tergantung pada keputusan keluarga. Argumentasi yang dikemukakan oleh Fernandez dan Rogerson (1997) dan Schneider (2001) keluarga mempunyai preferensi terhadap pendidikan anak. Preferensi tersebut didasarkan pada pertimbangan keuntungan relatif yang akan dicapai dengan anak mengikuti proses pendidikan. Searah dengan argumentasi tersebut, Peacock (1983) menyatakan bahwa sistem pendanaan pendidikan pada tingkat individual (voucher) tidak dapat mengubah consumer choice (dalam hal ini orang tua) terhadap pilihan untuk menyekolahkan anaknya atau tidak sepanjang orang tua mempunyai persepsi bahwa tidak menyekolahkan anak, paling tidak dalam jangka pendek, merupakan pilihan yang lebih baik dibanding dengan menyekolahkan anaknya.

Program PIP ini bukan merupakan sistem pendanaan baru. Di Indonesia sistem ini sudah mulai populer sekitar tahun 70an dengan sistem beasiswa, dan sejak terjadinya krisis ekonomi pada dekade 90 akhir sistem pendanaan ini diselenggarakan secara masif melalui program bantuan siswa miskin. Di Amerika program ini berlangsung sejak pertengahan tahun 60-an sebagai bagian dari kebijakan disegraasi. Di Amerika Serikat sistem pendanaan yang ditujukan kepada siswa disebut dengan sistem voucher. Sistem ini mempunyai dua tujuan yaitu untuk menjamin keberlangsungan pendidikan siswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomis, dan meningkatkan preferensi

---

pendidikan bagi anaknya dari orang tua dari keluarga tidak mampu secara ekonomi (Sandier dan Kapel, 1988). Oleh karena sistem voucher ini diperkenalkan sebagai bagian dari *affirmative action*, sehingga voucher merupakan daya ungkit bagi orang tua untuk membiayai pendidikan anaknya dan dapat bersaing untuk mendapatkan pendidikan dari sekolah yang berkualitas. Namun Peacock (1983) menyangsikan peran daya ungkit ini, karena pendidikan, terutama pendidikan yang dilayani oleh sekolah swasta, cenderung bersifat komersial meskipun pendidikan merupakan *public goods*.

PIP memang merupakan sistem pendanaan pendidikan yang ditujukan untuk menanggung biaya tidak langsung terhadap pendidikan anak. Dalam konsep ekonomi pendidikan meliputi dua jenis. Pertama, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk membiayai kebutuhan yang secara langsung berkaitan dengan biaya operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah contohnya adalah biaya pembelian buku, biaya transport dari rumah ke sekolah. Bentuk kedua adalah kesempatan mendapat penghasilan yang hilang karena anak harus mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Biaya ini disebut sebagai *foregone earning*.

Dengan menggunakan argumentasi yang dikemukakan oleh Sandier dan Kapel (1988) PIP memang dapat meningkatkan daya beli orang tua terhadap pendidikan anaknya, karena PIP dapat mengkompensasi kebutuhan pendidikan anak di luar biaya operasional kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, PIP belum dapat mengkompensasi *foregone earning*. Bagi orang tua dengan status ekonomi rendah, anak mempunyai fungsi ekonomi yang tinggi untuk mendukung keberlangsungan kehidupan keluarga. Dengan kata lain jika anak tidak bekerja maka akan mengurangi porsi pendapatan keluarga. Semakin rendah status ekonomi keluarga, semakin tinggi porsi pendapatan keluarga jika anak harus mengikuti proses belajar mengajar di sekolah.

Jika PIP diberikan secara langsung kepada anak terdapat kemungkinan, sebagian dari PIP tersebut akan digunakan untuk kepentingan keluarga. Berdasarkan dari maksud pemberian PIP hal ini merupakan penyimpangan, namun secara natural hal ini sebagai cara untuk mengkompensasi *foregone earning* yang terjadi karena anak harus sekolah.

Terdapat dua solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini. Solusi yang pertama adalah solusi sektor publik yang tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Kemendikbud tetapi kementerian lain.

---

Arahnya adalah mengkompensasi *foregone earning* karena anaknya sekolah, dengan cara memberikan kesempatan kerja bagi orang tuanya sehingga penghasilannya dapat meningkat. Solusi kedua adalah solusi manajerial yang sepenunhnya berada dalam kendali Kemdikbud. Pihak sekolah secara intensif melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap penggunaan dana PIP. Jika hal ini dilakukan PIP diharapkan dapat menghantarkan siswa penerima dana PIP menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sampai dengan jenjang pendidikan menengah.

## **2.6 Pelaksanaan Program Indonesia Pintar**

Hingga saat ini disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK bagi keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain.

Untuk membantu meningkatkan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, Pemerintah membuat Program Indonesia Pintar sebagaimana yang tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2014. Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan maksud untuk menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan sampai lulus ke jenjang pendidikan menengah.

Cakupan Program Indonesia Pintar mencapai 20,3 Juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. KIP mencakup pula anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak-anak, anak yang berada di panti asuhan dan anak disable. KIP berlaku juga

---

kepada anak yang berada di pondok pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan anak yang berada di Balai Latihan Kerja (BLK).

### **2.6.1 Cakupan dan Tujuan PIP**

Cakupan penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi siswa Sekolah Dasar (SD), siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga warga belajar/peserta yang berada di PKBM dan BLK. Tujuan dari program antara lain:

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
3. Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan.

### **2.6.2 Sasaran PIP**

Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) baik siswa sekolah formal maupun anak didik dari lembaga pendidikan non formal (SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan) diprioritaskan kepada:

1. Penerima BSM 2014 Pemegang KPS yang ada dalam Dapodik;
2. Siswa/anak dari keluarga pemegang KPS/(Kartu Perlindungan Sosial) KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang belum menerima BSM 2014;
3. Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS;
4. Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan;
5. Siswa/anak yang terkena dampak bencana alam;

- 
6. Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (*drop-out*) yang diharapkan kembali bersekolah;
  7. Siswa/anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah;
  8. Siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan.
  9. Siswa dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis dan Agroteknologi) Perikanan, Peternakan, kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Siswa/anak yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:

1. Siswa Pendidikan Formal:
  - a. Terdaftar sebagai siswa/peserta didik pada sekolah;
  - b. Terdaftar dalam Dapodik sekolah;
  - c. Diusulkan oleh sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemdikbud;
2. Anak Didik Lembaga Pendidikan Non-Formal:
  - a. Terdaftar sebagai anak didik pada SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan;
  - b. Diusulkan oleh SKB/PKBM/Lembaga kursus dan pelatihan melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemdikbud;
3. Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah:
  - a. Terdaftar kembali di sekolah/SKB/PKBM/Lembaga kursus dan pelatihan.
  - b. Diusulkan oleh sekolah/SKB/PKBM/Lembaga kursus dan pelatihan melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemdikbud;

Besaran dana BSM/PIP 2015 adalah sebesar Rp. 11.099.032.750.000,- dengan sasaran sebanyak 17.920.270 siswa dengan rincian sebagai berikut:

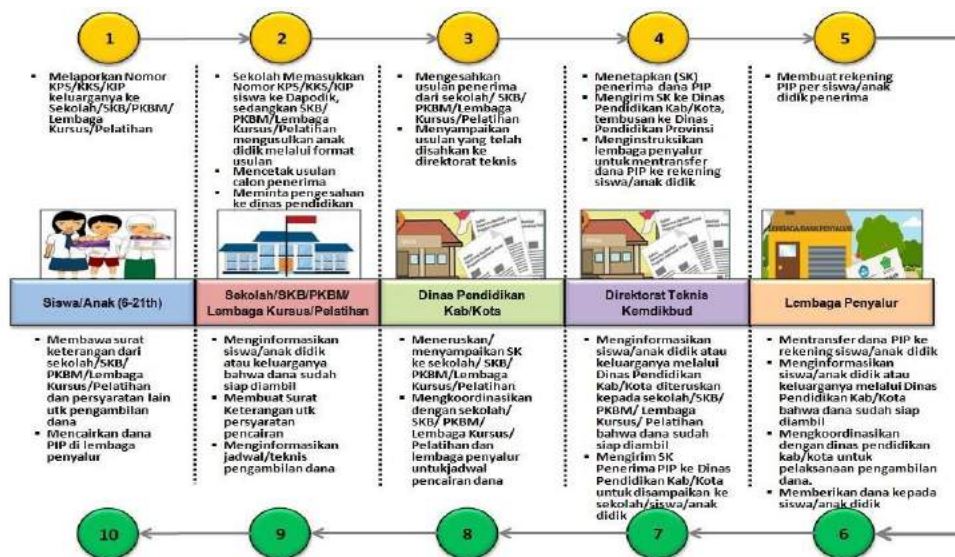
| Jenjang Pendidikan | DIPA APBN        |                      | DIPA APBNP        |                           |
|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
|                    | Sasaran BSM      | Anggaran (Rp.000)    | Sasaran BSM/PIP   | Alokasi Dana PIP (Rp.000) |
| SD                 | 6.046.921        | 2.721.114.450        | 10.470.610        | 4.711.774.500             |
| SMP                | 2.169.890        | 1.627.417.500        | 4.249.607         | 3.187.205.250             |
| SMA                | 425.033          | 425.033.000          | 1.353.515         | 1.353.515.000             |
| SMK                | 550.000          | 550.000.000          | 1.846.538         | 1.846.538.000             |
| <b>Jumlah</b>      | <b>9.191.844</b> | <b>5.323.564.950</b> | <b>17.920.270</b> | <b>11.099.032.750</b>     |

Selanjutnya dana PIP yang diberikan per siswa dari masing-masing direktorat teknis, adalah sebagai berikut:

1. Jenjang Sekolah Dasar (SD):
  - a. Siswa Kelas I, II, III, IV dan V Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 450.000,-;
  - b. Siswa Kelas VI Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 225.000,-;
  - c. Siswa Kelas I Tahun Ajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 225.000,-;
2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP):
  - a. Siswa Kelas VII dan VIII Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 750.000,-;
  - b. Siswa Kelas IX Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 375.000,-;
  - c. Siswa Kelas VII Tahun Ajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 375.000,-;
3. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA):
  - a. Siswa Kelas X dan XI Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 1.000.000,-;

- 
- b. Siswa Kelas XII Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;
  - c. Siswa Kelas X Tahun Ajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
- a. Program 3 Tahun
    - 1) Siswa SMK Kelas X dan XI Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 1.000.000,-;
    - 2) Siswa SMK Kelas XII Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;
    - 3) Siswa SMK Kelas X Tahun Ajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;
  - b. Program 4 tahun
    - 1) Siswa SMK Kelas X, XI dan XII Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 1.000.000,-;
    - 2) Siswa SMK Kelas XIII Tahun Ajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;
    - 3) Siswa SMK Kelas X Tahun Ajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait antara lain mencakup tingkat sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, direktorat teknis, lembaga penyalur sebagaimana alur diagram pada gambar 2.1.



**Gambar 1:** Alur diagram mekanisme pelaksanaan PIP

### 2.6.3 Mekanisme Pengusulan

Usulan penerima dana BSM/PIP 2015 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Siswa/anak dari Keluarga Pemilik KPS/KKS/KIP
  - a. Untuk siswa sekolah formal, sekolah mengentri/meng-up-date data siswa (nomor KPS/KKS/KIP) calon penerima PIP 2015 yang memiliki KPS/KKS/KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap. Data ini sekaligus berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/ kota dan direktorat teknis.
  - b. Untuk anak didik yang belajar di pendidikan non-formal, SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan menyampaikan usulan calon penerima PIP 2015 sesuai dengan Format Usulan Lembaga ke dinas pendidikan kabupaten/ kota.
  - c. Dinas pendidikan kabupaten/kota menyampaikan/meneruskan usulan calon penerima dari sekolah/SKB/PKBM/lembaga kursus

---

dan pelatihan yang telah disetujui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota tersebut sebagai usulan ke direktorat teknis.

- d. Untuk anak yang tidak bersekolah dan tidak juga belajar di pendidikan non formal manapun, dapat diusulkan dengan syarat mendaftarkan diri ke sekolah formal atau pendidikan non formal dengan menunjukkan KPS/KKS/KIP.

## 2. Siswa/anak Yang Tidak Memiliki KPS/KKS/KIP

Baik siswa sekolah formal maupun anak didik dari lembaga pendidikan non formal (SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan) dari keluarga miskin/rentan miskin yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP, seluruhnya dapat diusulkan oleh sekolah/lembaga pendidikan non formal setelah seluruh siswa/anak dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP ditetapkan sebagai penerima BSM/PIP 2015 pada tenggat waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sekolah/lembaga pendidikan non formal (SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan) menseleksi dan menyusun daftar siswa/anak didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP sebagai calon penerima dana BSM/PIP 2015 berdasarkan alokasi sementara sasaran per kabupaten/kota yang ditetapkan oleh direktorat teknis dengan prioritas sebagai berikut:
- 1) Siswa/anak yang berasal dari rumah tangga terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
  - 2) Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan;
  - 3) Siswa/anak yang terkena dampak bencana alam;
  - 4) Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (*drop-out*) yang diharapkan kembali bersekolah;
  - 5) Siswa/anak miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah;
  - 6) Siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, dsb;
  - 7) Siswa dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis dan

---

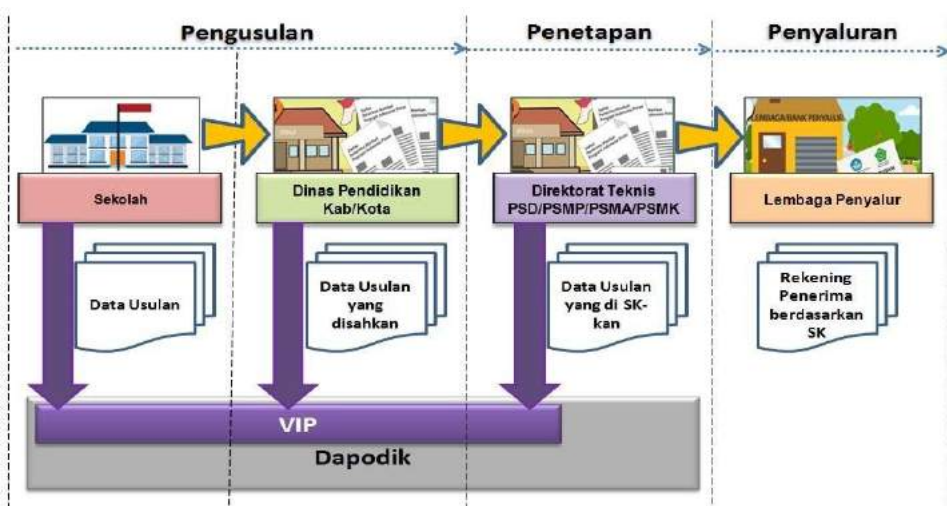
Agroteknologi) Perikanan, Peternakan, kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

- b. Sekolah mengusulkan siswa hasil seleksi sebagai penerima PIP 2015 melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar (VIP) yang tersedia di laman: [pip.kemdikbud.go.id](http://pip.kemdikbud.go.id) ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Sedangkan lembaga pendidikan non formal (SKB/PKBM/lembaga kursus dan pelatihan) dapat mengusulkan sesuai Format Usulan Lembaga ke dinas pendidikan kabupaten/kota.
- c. Dinas pendidikan kabupaten/kota menyampaikan/meneruskan usulan siswa (baik siswa sekolah formal maupun anak didik dari lembaga pendidikan non formal) calon penerima dari sekolah dan disetujui oleh dinas pendidikan kabupaten/ kota sebagai usulan ke direktorat teknis.

### **3. Siswa yang diusulkan oleh pemangku kepentingan**

Siswa calon penerima PIP dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan ke direktorat teknis sesuai dengan prioritas sasaran dan persyaratan yang ditetapkan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data usulan terhadap Dapodik. Seluruh pengusulan dari sekolah dapat dilakukan melalui VIP/Dapodik.

Diagram dapat dilihat pada gambar 2.



**Gambar 2: Akses VIP/Dapodik**

#### 2.6.4 Mekanisme Penetapan Penerima

Penetapan penerima dana BSM/PIP 2015 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Direktorat teknis menerima usulan calon siswa penerima PIP dari dinas pendidikan kabupaten/kota/pemangku kepentingan;
2. Direktorat teknis menetapkan siswa penerima PIP yang berasal dari usulan sekolah yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan usulan dari pemangku kepentingan dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan. Untuk usulan SMK yang berada dibawah binaan provinsi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Siswa SMK penerima PIP yang menempuh studi keahlian kelompok (bidang Agrobisnis dan Agroteknologi) Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman yang ada dalam aplikasi Dapodik dapat langsung ditetapkan sebagai penerima PIP sepanjang alokasi terpenuhi.
4. Untuk peserta Kejar Paket A/B/C, penetapan penerima BSM/PIP dilakukan oleh Direktorat PSD, PSMP, PSMA setelah menerima

---

surat keputusan penetapan penerima BSM/PIP dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud.

5. Untuk peserta kursus/pelatihan penetapan penerima BSM/PIP dilakukan oleh Direktorat Teknis terkait setelah menerima surat keputusan penetapan penerima BSM/PIP dari Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemdikbud.

### **2.6.5 Mekanisme Penyaluran**

Dana BSM/PIP 2015 disalurkan langsung ke siswa penerima melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Direktorat teknis memberikan daftar penerima yang tercantum dalam SK ke lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening.
2. Direktorat teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SK.
3. KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur.
4. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindah bukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan/memindah bukuan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening siswa penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara direktorat teknis dengan lembaga penyalur.
5. Direktorat teknis menginformasikan daftar siswa penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan SK penerima.
6. Siswa mengambil/mencairkan dana BSM/PIP di lembaga penyalur.

### **2.6.6. Mekanisme Pengambilan Dana**

Pengambilan/pencairan dana BSM/PIP 2015 dilakukan oleh siswa di lembaga penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membawa dokumen:

| SD                                                                                                                             | SMP                                                                                                                            | SMA                                                                     | 1. SMK                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Surat keterangan kepala sekolah<br>2. Foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap dengan nama sekolah, NPSN dan NISN | 1. Surat Keterangan Kepala Sekolah<br>2. Foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap dengan nama sekolah, NPSN dan NISN | 1. Surat Keterangan Kepala Sekolah<br>2. Identitas siswa/ Kartu Pelajar | Surat Keterangan Kepala Sekolah<br>Identitas siswa/ Kartu Pelajar |

2. Menandatangani bukti penerimaan dana BSM/PIP 2015 yang disediakan oleh Lembaga Penyalur.
3. Untuk SD dan SMP, pengambilan dana beberapa siswa harus didampingi minimal satu orang guru/orang tua/wali.
4. Bagi siswa yang berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal siswa sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan dana PIP dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah atau bendahara sekolah dengan syarat/ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut:
  - a. Surat kuasa kolektif dari orang tua siswa penerima BSM/PIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan.
  - b. Sekolah menyampaikan surat permohonan pencairan kolektif ke dinas pendidikan kabupaten/kota.  
 Dinas pendidikan kabupaten/kota mengajukan surat permohonan pencairan kolektif ke direktorat teknis dengan melampirkan data nama sekolah. Surat rekomendasi persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada kepala sekolah.

- 
- c. Kepala sekolah yang telah menerima rekomendasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM/PIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai (Format terlampir).
  - d. Penerima kuasa menunjukkan identitas seperti KTP atau SIM asli pada saat pengambilan dana secara kolektif di lembaga penyalur.

Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan kepada siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

#### **2.6.7 Kewajiban Siswa Penerima BSM/PIP 2015**

Siswa penerima BSM/PIP 2015 mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menggunakan dana PIP 2015 sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana;
2. Terus bersekolah dengan rajin dan tekun;
3. Menunjukkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah;
4. Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela.

#### **2.6.8. Pemanfaatan Dana PIP**

Dana BSM/PIP 2015 dimanfaatkan siswa untuk:

1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah;
2. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
3. Transportasi siswa ke sekolah;
4. Uang saku siswa ke sekolah;
5. Biaya kursus/les yang tidak diselenggarakan oleh sekolah;
6. Khusus SMK dibolehkan untuk membayar iuran bulanan sekolah (SPP).

---

## 2.7 Efektivitas Program

Bantuan subsidi kepada siswa miskin ditujukan selain untuk memberikan kesempatan pendidikan yang luas, merata, dan adil kepada warga masyarakat yang kurang mampu juga sebagai upaya untuk mencapai Efektivitas pendidikan yang maksimal.

Umumnya Efektivitas merupakan taraf tercapainya hasil. Efektivitas juga sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan.

Menurut Barnard (Nurudin, 2007), menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

*"When a specific desired and is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desired end and are dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motivates of the aim, whatever it is effective or not."*

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa bila suatu tujuan tertentu dapat dicapai, kita bisa mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif. Namun bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan ketidakpuasan, maka kegiatan tersebut efektif namun tidak efisien. Bila akibat-akibat yang tidak dicari itu tidak penting, sementara hasilnya yang dicapai memuaskan, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Sementara sesuatu itu efisien bila hasilnya memuaskan sebagai pendorong pencapaian tujuan, terlepas ia efektif atau tidak.

Menurut Nurudin (2007), Efektivitas berarti sejauhmana kita mencapai tujuan, sementara efisiensi berarti bagaimana kita mengelola sumberdaya yang

---

ada dengan cermat. Efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai suatu tujuan menggunakan sumberdaya yang berlebihan atau biasa disebut ekonomi biaya tinggi, sementara efisien namun tidak efektif berarti dapat mengelola sumber daya yang ada dengan baik namun sasaran tidak tercapai. Efektif lebih mengarah pada pencapaian sasaran, sementara efisien mengarah pada kemampuan menggunakan sumber daya yang ada secara baik (tidak berlebih) untuk mencapai produktivitas yang tinggi.

Kebijakan pemberian subsidi pada dasarnya adalah suatu keputusan untuk memastikan terlaksanakannya program pemerataan pendidikan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang bermutu khususnya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, peluang keberlanjutan sekolah, pengurangan angka putus sekolah, dan peningkatan prestasi, yang dilakukan oleh instansi berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pendidikan. Dua unsur utama dari kebijakan pemberian subsidi adalah sejumlah tujuan pendidikan dan sejumlah alat/instrument untuk mencapai tujuan tersebut.

Efektivitas dalam program pendidikan, dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauhmana sasaran program yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dalam mengukur dimensi atau kriteria Efektivitas, dikemukakan oleh Campbell (dalam Steers 1985), bahwa kualitas, produktivitas, kesiagaan, efisiensi, laba atau penghasilan, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, perputaran atau keluar masuknya pekerja, kemangkiran, kecelakaan, semangat kerja, motivasi, kepuasan, penerimaan tujuan organisasi, kepaduan-konflik-kompak, keluwesan-adaptasi, penilaian dari pihak luar.

Arikunto dan Jabar (2008) mengemukakan bahwa kriteria atau tolak ukur yang dalam program kebijakan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: (1) peraturan atau ketentuan yang telah diterbitkan, (2) dalam menindaklanjuti peraturan atau ketentuan tersebut perlu adanya petunjuk pelaksanaan, (3) jika tidak ada petunjuk pelaksanaan maka dapat menggunakan konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku ilmiah, (4) atau dapat menggunakan hasil penelitian, (5) atau kriteria dapat ditentukan menggunakan nalar.

Berdasarkan beberapa kriteria ukuran Efektivitas di atas, paling tidak terdapat sejumlah kriteria yang dapat dijadikan ukuran Efektivitas dalam pelaksanaan program pemberian subsidi siswa miskin yaitu kebijakan

---

pemerintah, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, tingkat kepuasan, formulasi, implementasi dan evaluasi.

Berkaitan dengan Efektivitas dalam program pemberian subsidi siswa miskin, karakteristik program tersebut pada umumnya tidak untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu pengukuran Efektivitas program pemberian subsidi siswa miskin adalah bagaimana program tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian pelaksanaan program yang efektif ditandai oleh beberapa hal antara lain: ketepatan waktu, SDM yang mengelola program, mekanisme kerja yang baik, mengedepankan kerjasama dan komunikasi diantara para tim program, penyaluran dana yang benar, tidak adanya penyimpangan, perlunya monitoring dan evaluasi untuk melihat umpan balik (*feed back program*).

Dalam kaitan dengan ini (Soeharto, 2006) mengungkapkan suatu pengendalian program yang efektif ditandai hal-hal berikut ini; (1) tepat waktu dan peka terhadap penyimpangan, (2) bentuk tindakan yang diadakan tepat dan benar, (3) terpusat pada masalah atau titik yang sifatnya strategis, dilihat dari segi penyelenggaraan program, (4) mampu mengetengahkan dan mengkomunikasikan masalah dan penemuan, sehingga dapat menarik perhatian pimpinan maupun pelaksana program yang bersangkutan, agar tindakan koreksi yang diperlukan segera dapat diselesaikan, (5) kegiatan pengendalian tidak lebih dari yang diperlukan, yakni biaya yang dipakai untuk kegiatan pengendalian tidak boleh melampaui faedah atau hasil dari kegiatan tersebut dan (6) dapat memberikan petunjuk berupa pikiran hasil pekerjaan yang akan datang, bilamana pada saat pengecekan tidak mengalami perubahan.

## **2.8 Hasil Penelitian Terdahulu/Analisis Data Sekunder**

Pada tahun 2015 Direktorat Dikdasmen melakukan monitoring dan evaluasi PIP. Hasil monev menjelaskan bahwa informasi dari Kepsek hanya 34,1% menyatakan kuota yang diberikan sesuai dengan jumlah siswa miskin yang ada di Sekolah. Sisanya sebanyak 65,9% menyatakan bahwa kuota yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah siswa miskin yang ada di Sekolah. Sejalan dengan hal tsb, tampak juga adanya ketidaksesuaian dari sasaran penerima PIP yaitu

---

sebanyak 28,7% orangtua siswa tidak memiliki KPS dan tidak termasuk peserta PKH. Selain itu 42,3% orangtua siswa memiliki KPS dan termasuk peserta PKH. Sebanyak 5,3% orangtua siswa memiliki KPS dan sebanyak 23,8% orangtua siswa termasuk peserta PKH.

Begitu pula untuk ketepatan waktu, data dari hasil rekapitulasi penyaluran dan pencairan dana, dimana yang seharusnya untuk waktu pencairan dana adalah pada awal tahun ajaran, namun kenyataannya banyak siswa menerima dana PIP pada waktu yang tidak menentu. Selanjutnya terkait dengan jumlah penyaluran dana PIP di tiap provinsi, DKI Jakarta walaupun jumlah kuota PIP nya kecil namun menempati urutan persentase tertinggi dalam pencairan dana PIP (93,55%). Demikian pula Prov. DI Yogyakarta dengan persentase 80,55% pencairannya. Sementara Prov. Jawa Tengah memiliki kuota terbesar (1.579.087) namun persentase jumlah pencairannya baru mencapai 73,03%. Dan hasil rekap tersebut juga menyatakan bahwa sebanyak 58% siswa telah menerima dana Program Indonesia Pintar pada tahun 2015 (<http://pipsd.kemdikbud.go.id/pelaporan/index.php?>) Namun yang menarik adalah 23% siswa menyatakan tidak menerima nominal dana PIP secara utuh. Dari 23% siswa yang menjawab “tidak”, ternyata memang masih banyak siswa yang belum mengambil atau menerima dana PIP sehingga siswa tidak mengetahui nominal dana yang diberikan. Beberapa siswa ada yang belum menerima informasi pencairan. Ada yang sudah mengetahui tetapi belum diambil di Bank. Ada orang tua siswa yang tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana proses pencairan di bank meskipun sekolah sudah menawarkan bantuan. Adapula siswa yang baru diusulkan ( Direktorat Pembinaan SMP, 2015).

Terkait dengan pemanfaatan dana BSM/PIP-SD, Informasi yang diperoleh dari orangtua siswa, digunakan untuk; (1) membeli buku tulis 86,0%, (2) membeli buku pelajaran 65,3%, (3) membeli alat dan bahan belajar 82,6%, (4) membeli tas sekolah 81,9%, (5) membeli seragam sekolah 83,8%, (6) membeli sepatu 48,3%, (7) biaya transportasi ke sekolah 28,3%, (8) membayar biaya kursus/les 22,6%, (9) ditabung 14,3%, (10) membeli pulsa HP 9,4%, (11) uang jajan 16,2% dan (12) lainnya 7,5%. Data yang diperoleh merupakan sebaran pemanfaatan, bukan merupakan pilihan. Oleh karena itu jumlah untuk setiap komponen cukup besar.

Pada tahun 2006, SMERU melakukan kajian cepat terhadap manfaat penerima Bantuan Khusus bagi Siswa Miskin di 5 provinsi, yaitu Jawa Timur,

---

Banten, Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan NTB. Hasil kajian menjelaskan bahwa berdasarkan data yang disusun sekolah, jumlah siswa miskin di sekolah sampel di masing-masing provinsi, berkisar antara 17 persen-34 persen dari total siswa. Dari total siswa miskin tersebut hanya sekitar 12 persen-33 persen yang mendapat bantuan khusus. Di antara lima provinsi sampel kajian cepat SMERU, cakupan pemberian manfaat tambahan bagi siswa miskin yang terendah adalah di Provinsi Banten, sementara yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Secara total, dari semua sekolah sampel yang tersedia datanya, siswa miskin yang mendapat bantuan khusus hanya sekitar 22,6 persen dari jumlah siswa miskin.

Kajian tersebut juga menyebutkan bahwa dibandingkan BKM, cakupan BOS lebih luas/merata, dan semua siswa, terutama yang miskin dapat dipastikan menerima manfaatnya. Dalam pelaksanaan Program BKM ditemukan banyak keluhan tentang kurangnya kuota jumlah siswa miskin penerima program dan kesalahan sasaran akibat kriteria siswa miskin yang kurang jelas. Karena besarnya cakupan sasaran Program BOS dan kecenderungan adanya kepastian bahwa semua siswa miskin akan mendapatkan manfaat berupa biaya sekolah yang menjadi lebih murah, para peserta diskusi kelompok dalam studi ini, baik di kota maupun di kabupaten, menilai bahwa Program BOS bermanfaat bagi masyarakat miskin.

Penilaian tersebut juga diperkuat dengan pernyataan beberapa orang tua siswa yang anaknya pernah menerima BKM bahwa mereka cenderung lebih memilih BOS daripada BKM. Walaupun dapat dipastikan bahwa semua siswa menerima manfaat Program BOS, akan lebih tepat jika sekolah memberikan manfaat tambahan bagi siswa miskin. Hal ini juga diakui oleh sebagian orang tua siswa yang tergolong mampu. Alasan yang dikemukakan antara lain untuk lebih membantu siswa miskin agar dapat terus bersekolah, atau setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar.

Hasil studi evaluasi program yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2012, menyimpulkan bahwa:

- a. Tingkat ketidaktepatan sasaran BSM masih cukup tinggi. Hasil evaluasi pelaksanaan program BSM terkait mekanisme penetapan sasaran yang berjalan, menunjukkan masih tingginya ketidaktepatan sasaran, baik *inclusion error* (penerima manfaat program bukan siswa dari keluarga

---

miskin) maupun *exclusion error* (anak-anak dari keluarga miskin yang seharusnya mendapatkan manfaat program BSM malah tidak mendapatkannya). BSM SD dan SMP hanya menjangkau rumah tangga miskin dan rentan miskin dengan anak usia SD sebanyak 4 persen. Tingkat dan cakupan RT dengan anak usia SMA bahkan lebih rendah lagi. BSM masih diterima oleh siswa dari rumah tangga mampu. Separuh kuota diterimakan pada 40 persen siswa miskin dan separuhnya lagi untuk 60 persen siswa mampu. Sebanyak 30 persen siswa miskin menerima kurang dari dua kali bagian yang diterima dari 30 persen terkaya. Program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin di Indonesia termasuk BSM mungkin bagus dibandingkan dengan pencapaian secara internasional, tetapi kebocoran kepada kelompok yang paling kaya lebih tinggi dari program-program di negara lainnya.

- b. Pelaksanaan program BSM selama ini belum dapat memastikan keberlanjutan subsidi antar jenjang pendidikan (terutama bagi siswa yang berada di masa transisi: dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA). Nilai bantuan BSM selama ini hanya menutup kurang dari separuh biaya pendidikan dan hanya 5 persen dari garis kemiskinan rumah tangga (sekitar 15-30 persen pengeluaran garis kemiskinan individu). Bagi rumah tangga miskin, biaya pendidikan SMP atau SMA sekitar 30 persen dari seluruh pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu rumah tangga atau keluarga paling miskin akan membutuhkan bantuan dalam jumlah yang lebih besar, padahal di sisi lain anak peserta PKH yang terbukti berasal dari rumah tangga/keluarga paling miskin yang bersekolah selama ini justru tidak menerima BSM.
- c. Ketepatan waktu penyaluran BSM masih perlu diperbaiki. Ketepatan waktu ini dapat membantu keberlanjutan sekolah siswa dari keluarga miskin, baik antar jenjang kelas maupun antar jenjang pendidikan. Pasalnya, tingkat putus sekolah cenderung lebih tinggi pada kelompok masyarakat dengan pendapatan yang lebih rendah. Siswa dari kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah umumnya mulai keluar sekolah pada kelas 3 SD. Oleh sebab itu waktu kritis kebutuhan dana pendidikan adalah pada bulan Mei hingga Juni dan awal tahun ajaran (bulan Juli), terutama saat transisi jenjang pendidikan dari SD ke SMP, dan SMP ke

---

SMA/SMK. Selama ini penyaluran BSM dilakukan pada Maret/April untuk SD dan September/Oktober untuk SMP.

- d. Diperlukan peningkatan biaya administrasi. Selama ini biaya administrasi Program BSM sangat tidak signifikan untuk memastikan kinerja program yang baik. Kementerian Pendidikan hanya mengeluarkan biaya administrasi Rp 5.000 per penerima BSM per tahun

Hasil Penelitian Prihatin (2006) yang berjudul Kajian Pengaruh Pengelolaan Subsidi Biaya Pendidikan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar bertujuan untuk: 1) menganalisa seberapa besar pengaruh pengelolaan subsidi biaya pendidikan terhadap kinerja penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta wilayah kotamadya Jakarta Timur; 2) mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta wilayah kotamadya Jakarta.

Penelitian ini adalah penelitian hubungan sebab-akibat yang berusaha menemukan pengaruh dari pengelolaan subsidi biaya pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar di Jakarta Timur, yang dilakukan dengan menggunakan metode survei. Pengelolaan subsidi biaya pendidikan sebagai variabel bebas terdiri dari perencanaan penyaluran, pelaksanaan penyaluran, pengawasan penyaluran, besar dana yang diterima, penggunaan petunjuk teknis, akuntabilitas, dan sumbangan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan, maka masukan berupa saran yang dapat diberikan bagi peningkatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar Propinsi DKI Jaarta wilayah kotamadya Jakarta Timur adalah sebagai berikut : (1) Agar para pengelola baik di tingkat dinas maupun sekolah dalam mengelola subsidi biaya pendidikan, tidak hanya banyak berperan pada tahap perencanaan tetapi juga lebih berperan terhadap proses selanjutnya, sehingga penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar bisa berjalan dengan optimal, (2) variabel penggunaan juknis, akuntabilitas dan sumbangan masyarakat hendaknya dapat diperbaiki dalam pelaksanaannya di lapangan sehingga penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar akan berjalan dengan baik dan besarnya dana yang diterima oleh sekolah dapat dimaksimalkan pemanfaatannya.

Penelitian Hemasaputri (2010) yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Dana Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA

---

Negeri 1 Pacitan, bertujuan mengetahui apakah terdapat pengaruh pemanfaatan dana Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) terhadap prestasi belajar akuntansi siswa SMA Negeri 1 Pacitan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanasi (*Explanatory Research*). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket dan dokumentasi. Populasi data dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI yang menerima dana BKSM yang berjumlah 60 siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada akhir bulan Maret sampai April 2010.

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh hasil bahwa pemanfaatan dana Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) mempunyai pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Implikasinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan dana BKSM terhadap prestasi belajar siswa. Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa siswa kelas X dan XI SMA Negeri 1 Pacitan memiliki prestasi belajar dalam kriteria tinggi sedangkan pemanfaatan dana BKSM berada dalam kriteria cukup. Peneliti menyarankan agar pihak sekolah diharapkan mampu mempertahankan keefektifan pemanfaatan dana Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM). Pemanfaatan dana BKSM secara efektif terbukti telah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

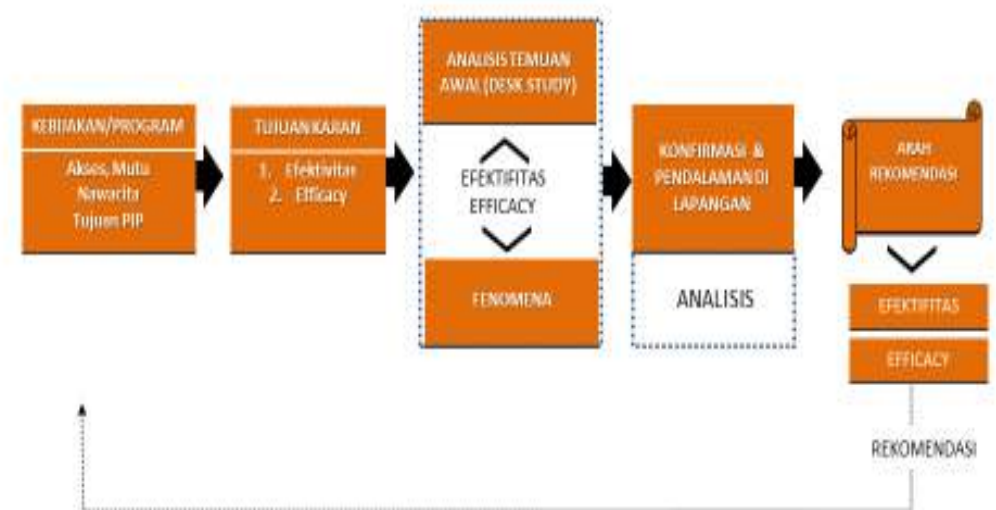
Kajian yang dilakukan oleh Balitbang, Kemdikbud tahun 2011, bertujuan untuk: 1) mengevaluasi sejauhmana program beasiswa BKM dan BSM telah tepat sasaran, 2) mengevaluasi sejauhmana program beasiswa BKM dan BSM ini telah tepat waktu, dan 3) mengetahui sejauh mana dampak pemberian beasiswa ini bagi para penerima beasiswa, dalam hal: (a) kelangsungan pendidikannya (*retention rate*), (b) motivasi belajarnya, (c) prestasi akademisnya, (d) disiplin belajar, (e) perilaku sosial: aktivitas di kelas, di kegiatan sekolah, dan (f) waktu kerja di luar jam sekolah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

- 1) Ketepatan sasaran penerima beasiswa bahwa mayoritas dinas pendidikan kabupaten/kota sudah menyalurkan beasiswa selama waktu 4 tahun dan mempertimbangan jumlah penerima beasiswa berdasarkan data siswa tidak mampu pada suatu sekolah untuk SD dan SMP serta didasarkan pada karakteristik siswa, jumlah anggota keluarga, tempat tinggal dan indikator lain yang terkait dengan prestasi di mana hal ini memungkinkan dapat digeneralisasi.
- 2) Pemberian bantuan beasiswa lain oleh Dinas Pendidikan sudah dilakukan oleh 71 persen Kabupaten/Kota atau sebanyak 10 Kabupaten/Kota yang tersurvey. Pemberian bantuan beasiswa lain memberikan dampak positif terhadap pengurangan *dropout* namun di sisi lain berdampak negatif, seperti kecemburuan sosial.

- 3) Berkenaan dengan data ketepatan waktu, bahwa penyaluran beasiswa belum sepenuhnya tepat waktu, khususnya dinas pendidikan kabupaten dan kota yang menggunakan periode waktu pemberian yang kurang tepat seperti pemberian beasiswa yang hanya dilakukan setahun sekali sedangkan kebutuhan paling tidak sebulan sekali. Namun, dalam hal waktu pendidikan, pemberian terjadi bervariasi, seperti untuk siswa SD menerima mulai kelas 4 atau 5 sedangkan untuk siswa SMP mulai kelas 7.
- 4) Berkaitan dengan ketepatan penggunaan oleh siswa (orang tua penerima) bahwa dari hasil survey menunjukkan bahwa pemanfaatan bantuan beasiswa digunakan oleh siswa untuk membeli buku pelajaran, membeli alat-alat tulis dan juga pakaian untuk sekolah yang secara umum data tentang hal tersebut dapat digeneralisasikan

## 2.9 Kerangka Pikir Studi

Berikut ini digambarkan kerangka kerja studi tentang Efektivitas Pemberian Subsidi Siswa yang diawali dari kebijakan pemerintah tentang subsidi siswa, kondisi dan permasalahan terkait dengan Efektivitas program pemberian subsidi, analisis terhadap kondisi serta permasalahan sampai dengan rekomendasi perbaikan program.



**Gambar 3: Kerangka Pikir Studi**

---

Pemerintah telah menetapkan kebijakan pemberian bantuan dana siswa miskin yang bertujuan untuk memastikan terlaksanakannya program pemerataan pendidikan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang bermutu, khususnya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, peluang keberlanjutan sekolah, pengurangan angka putus sekolah, dan peningkatan prestasi.

Kebijakan yang telah dilakukan perlu dikaji untuk mengetahui efektivitas dari segi proses, yakni terkait dengan sasaran penerima, jumlah penerima, besaran dana dan waktu penerimaan dana. Selain itu perlu dikaji pula dampaknya terhadap prestasi belajar, disiplin dan motivasi belajar, aktivitas dalam program sekolah. Informasi tentang efektivitas program pemberian bantuan PIP tersebut dianalisis guna memperoleh bahan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan strategi pemberian PIP yang lebih efektif di masa yang akan datang.

---

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah *descriptive research* yang bertujuan mengidentifikasi dan mengukur keefektifan Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah berjalan saat ini serta bagaimana dampak pemberian bantuan PIP terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pendidikan serta peningkatan prestasi belajar. Jenis penelitian ini bersifat evaluatif, yaitu mengkaji pelaksanaan PIP untuk memperoleh masukan guna menyempurnakan program subsidi siswa yang lebih efektif di masa depan. Evaluasi kebijakan menggali data dan informasi yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kebijakan dan menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif (Suharto, 2006).

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang penggalan datanya melalui diskusi kelompok terpumpun (DKT/FGD) dan juga pengisian kuesioner.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam studi ini adalah siswa SD, SMP, SMA dan SMK yang menerima dana bantuan subsidi dari pemerintah pusat dalam bentuk PIP di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa di satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK di kabupaten/kota yang terpilih untuk mewakili seluruh Indonesia dengan asumsi terdapat siswa penerima PIP.

#### **3.3 Teknik Pengambilan Sampel**

##### **3.3.1 Penentuan sampel Kabupaten/Kota**

Penentuan sampel dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan penentuan sendiri atau sengaja dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus. Pertimbangan yang dimaksud adalah pemilihan terhadap daerah berdasarkan banyaknya kuota penerima dana program PIP yang pelaksanaannya berjalan dengan baik/lancar dan juga yang pelaksanaannya kurang berhasil/tidak lancar

serta letak geografis daerah penerima PIP. Dengan mengabaikan DKI Jakarta sebagai daerah penerima PIP, terdapat 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang menerima program PIP. Kabupaten/kota tersebut dibagi menjadi empat kelompok (kuartil) berdasarkan kriteria menerima PIP dalam kelompok kuota terbanyak sampai terkecil.

Selanjutnya kabupaten/kota dalam masing-masing kuartil tersebut diurutkan berdasarkan jumlah penerima kuota PIP. Pembagian kuartil kabupaten/kota berdasarkan kuota penerima PIP disajikan pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2: Pembagian Kuartil Kabupaten/Kota Berdasarkan Kuota PIP**

| Kuartil | No Urut Kabupaten/kota | Kuota PIP |          |
|---------|------------------------|-----------|----------|
|         |                        | Tertinggi | Terendah |
| 1       | 1 – 127 (Kuartil 1)    | 143.530   | 22.246   |
| 2       | 128 – 254 (Kuartil 2)  | 22.087    | 97.73    |
| 3.      | 255 – 381 (Kuartil 3)  | 9.360     | 5.092    |
| 4       | 382 – 508 (Kuartil 4)  | 5.060     | 414      |

Sumber: data diolah

Dari setiap kuartil ditentukan 2 (dua) kabupaten/kota berdasarkan kuota terbanyak (pelaksanaannya berjalan dengan baik/berhasil/efektif) dan sedikit (kurang berhasil dalam pelaksanaannya) dan juga mempertimbangkan letak geografis yang mudah terjangkau dan sulit terjangkau. Sampel dipilih sebanyak 6 kabupaten/kota sampel. Masing-masing kabupaten/kota tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3: Kabupaten/Kota Berdasarkan Kuartil Terpilih**

| No | Kuartil   | Provinsi          | Kabupaten/Kota  | Kuota   | Penyaluran | Pencairan |
|----|-----------|-------------------|-----------------|---------|------------|-----------|
| 1  | Kuartil 1 | Jawa Barat        | Kota. Bogor     | 143.530 | 167.092    | 91.046    |
| 2  | Kuartil 1 | Jawa Tengah       | Kab. Temanggung | 28.483  | 24.833     | 14.776    |
| 3  | Kuartil 2 | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka     | 16.740  | 20.095     | 16.112    |
| 4  | Kuartil 3 | Lampung           | Kota Metro      | 5.824   | 5.503      | 3.914     |

|   |           |                |                  |       |       |       |
|---|-----------|----------------|------------------|-------|-------|-------|
| 5 | Kuartil 3 | Bengkulu       | Kab. Kepahiang   | 6.270 | 8.460 | 7.357 |
| 6 | Kuartil 4 | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | 2.132 | 2.434 | 1.929 |

Sumber: Data diolah

### 3.3.2 Penentuan Sampel Sekolah

Dari masing-masing kabupaten/kota sampel terpilih, ditentukan sampel sekolah dengan kriteria sebagai berikut.

- Satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK sampel merupakan sekolah yang telah menerima Program Indonesia Pintar yang sebelumnya juga menerima Bantuan Subsidi Siswa Miskin (BSM) paling kurang selama 2 tahun.
- Jumlah sekolah yang dipilih pada masing-masing kabupaten/kota sebanyak 8 sekolah, yaitu 2 SD, 2 SMP, 2 SMA dan 2 SMK.

Selain itu, sekolah yang dipilih adalah sekolah yang memiliki jumlah penerima PIP terbanyak dan sedikit di tiap Kabupaten/Kota dengan alasan agar sekolah terpilih tersebut dapat merefleksikan dampak yang lebih jelas dari program PIP terhadap dampak siswa.

Total sekolah di tiap Kabupaten/Kota yang terpilih sebagai sampel adalah sebanyak 48 sekolah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.4: Total Sekolah berdasarkan Sampel Terpilih**

| No     | Provinsi          | Kabupaten/Kota   | SD | SMP | SMA | SMK | JUMLAH    |
|--------|-------------------|------------------|----|-----|-----|-----|-----------|
| 1      | Jawa Barat        | Kota. Bogor      | 2  | 2   | 2   | 2   | 8         |
| 2      | Jawa Tengah       | Kab. Temanggung  | 2  | 2   | 2   | 2   | 8         |
| 3      | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka      | 2  | 2   | 2   | 2   | 8         |
| 4      | Lampung           | Kota Metro       | 2  | 2   | 2   | 2   | 8         |
| 5      | Bengkulu          | Kab. Kepahiang   | 2  | 2   | 2   | 2   | 8         |
| 6      | Sumatera Barat    | Kota Bukittinggi | 2  | 2   | 2   | 2   | 8         |
| JUMLAH |                   |                  | 12 | 12  | 12  | 12  | <b>48</b> |

Sumber: data diolah

---

### 3.3.3 Pemilihan Responden

Selain siswa yang menjadi responden utama, studi ini juga memilih pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah, dan orang tua siswa sebagai responden. Pemilihan ketiga kelompok responden ditujukan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang dampak program PIP yang tidak diperoleh melalui siswa. Selain itu juga yang akan dijadikan responden adalah pejabat/pegawai yang menangani PIP di bank lokal sebagai bank penyalur dana PIP, yang mengetahui penyaluran dan pencairan dana PIP.

Responden dinas pendidikan adalah kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang mengelola PIP, sedangkan responden kepala sekolah adalah kepala sekolah dari sekolah sampel. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota ditetapkan sebagai sampel dengan pertimbangan mengetahui mekanisme dan pengelolaan PIP yang diterima oleh kabupaten/kota, sedangkan kepala sekolah ditetapkan sebagai sampel dengan pertimbangan bahwa sekolah adalah tempat merealisasikan PIP dan kepala sekolah mengetahui tentang realisasi PIP di sekolahnya.

Responden guru adalah guru kelas atau walikelas siswa yang memperoleh manfaat PIP. Guru ditetapkan sebagai responden karena guru lebih mengetahui dampak perkembangan pendidikan siswa baik sebelum maupun setelah menerima manfaat PIP di sekolah.

Sementara, responden siswa setiap jenjang pendidikan adalah sepuluh siswa yang menerima BSM/PIP pada tiga tahun terakhir, sedangkan responden orang tua adalah 1 orang tua/wali dari sepuluh siswa yang menjadi responden. Siswa dipilih sebagai sampel untuk memeriksa ulang pemanfaatan dan penggunaan dana PIP tersebut, sedangkan orang tua siswa ditetapkan sebagai sampel dengan pertimbangan bahwa orang tua siswa dapat digali informasinya tentang motivasi, prestasi belajar siswa dan penggunaan dana PIP serta mengetahui perkembangan dan dampak penerimaan PIP oleh siswa.

Total responden di setiap kabupaten/kota berjumlah 98 responden dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.5: Jenis dan Jumlah Responden masing-masing kabupaten/kota**

| No.   | Responden           | Jumlah          |
|-------|---------------------|-----------------|
| 1     | Dinas Pendidikan    | 1 orang         |
| 2.    | Kepala Sekolah      | 8 orang         |
| 3.    | Guru/wali kelas     | 8 orang         |
| 4.    | Orang Tua Siswa     | 40 orang        |
| 5.    | Siswa               | 40 orang        |
| 6.    | Bank Penyalur local | 1 orang         |
| Total |                     | <b>98 orang</b> |

Dengan demikian, secara total, rincian jumlah responden adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6: Rincian Jumlah Responden seluruh Kabupaten/Kota**

| No    | Kab./Kota        | Bank | Kadis | SD    |      |           |       | SMP   |      |           |       | SMA   |      |           |       | SMK   |      |           |       | TOTAL |
|-------|------------------|------|-------|-------|------|-----------|-------|-------|------|-----------|-------|-------|------|-----------|-------|-------|------|-----------|-------|-------|
|       |                  |      |       | Kasek | Guru | Orang Tua | Siswa | Kasek | Guru | Orang Tua | Siswa | Kasek | Guru | Orang Tua | Siswa | Kasek | Guru | Orang Tua | Siswa |       |
| 1     | Kota Bogor       | 1    | 1     | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 98    |
| 2     | Kab. Temanggung  | 1    | 1     | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 98    |
| 3     | Kab. Kolaka      | 1    | 1     | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 98    |
| 4     | Kota Metro       | 1    | 1     | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 98    |
| 5     | Kab. Kepahiang   | 1    | 1     | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 98    |
| 6     | Kota Bukittinggi | 1    | 1     | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 2     | 2    | 10        | 10    | 98    |
| TOTAL |                  | 6    | 6     | 12    | 12   | 60        | 60    | 12    | 12   | 60        | 60    | 12    | 12   | 60        | 60    | 12    | 12   | 60        | 60    | 588   |

Sumber: data diolah

### 3.3.4 Variabel dan Kebutuhan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu, kualitas variabel yang digunakan dalam penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas variabel penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas variabel sedangkan kualitas pengumpulan data berkenaan cara-cara yang

digunakan untuk mengumpulkan data (Newman, 2008). Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitas-nya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan data.

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini sesuai dengan objek penelitian, yaitu variabel yang terkait dengan efektivitas pemberian PIP. Berikut rincian variabel yang diteliti dan sumber data.

**Tabel 3.7: Variabel, Dimensi Variabel, Data yang Dibutuhkan, dan Sumber Data**

| Variabel Tujuan         | Sub Variabel                                   | Data yang Dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber data                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efektivitas Program PIP | 1. Sasaran (ketepatan persyaratan penerima)    | 1.Kesesuaian Jumlah penerima PIP yang ada di Kemendikbud dan di sekolah pada tahun 2015                                                                                                                                                                                                    | 1.Kepala Sekolah<br>2.Pejabat Dinas Kab/kota<br>3.Dir. Dikdasmen                                         |
|                         |                                                | 2.Ketepatan segi kemampuan ekonomi dan sosial:<br>a. Kemiskinan keluarga<br>b.Potensi <i>Drop Out</i> karena biaya<br>c. Keluarga tertimpa musibah, PHK<br>d.Status anak terkait keberadaan Ortu: anak yatim dan/piatu<br>e.Jumlah anak<br>f. Status Penerima PIP lain<br>g.Kriteria lokal | 1.Kepala Sekolah/Guru kelas<br>2.Orangtua Siswa/Wali<br>3.Pejabat Dinas Kab/kota<br>4.Siswa penerima PIP |
|                         |                                                | 3.Latar belakang Ortu Siswa<br>a. Pendidikan<br>b.Pekerjaan<br>c. Penghasilan/pendapatan<br>d.Pengeluaran biaya hidup<br>e.Kondisi social lainnya                                                                                                                                          | Orangtua Siswa/Wali                                                                                      |
|                         | 2. Jumlah Penerima (ketepatan jumlah penerima) | 1. Jumlah siswa yang diajukan untuk menerima PIP<br>2. Jumlah penerima PIP (yang seharusnya)<br>3. Jumlah penerima PIP yang senyatanya<br>4. Alasan jika tidak senyatanya                                                                                                                  | 1. Kepala Sekolah<br>2. Pejabat Dinas Kab/kota                                                           |
|                         | 3. Jumlah Dana (ketepatan besaran dana )       | 1.Jumlah dana PIP yang diterima per siswa (yang seharusnya)<br>2.Jumlah dana PIP yang diterima per siswa yang senyatanya<br>3.Alasan jika tidak senyatanya                                                                                                                                 | 1. Kepala Sekolah<br>2. Orangtua Siswa/Wali<br>3. Pejabat Dinas Kab/kota<br>4. Siswa penerima PIP        |

| <b>Variabel Tujuan</b>    | <b>Sub Variabel</b>                                    | <b>Data yang Dibutuhkan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Sumber data</b>                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <b>4. Waktu penerimaan dana</b>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu dan frekuensi penerimaan dana PIP yang diterima per siswa (yang seharusnya)</li> <li>2. Waktu dan frekuensi penerimaan dana PIP yang diterima per siswa yang senyatanya</li> <li>3. Alasan jika tidak senyatanya</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sekolah</li> <li>2. Orangtua Siswa/Wali</li> <li>3. Pejabat Dinas Kab/kota</li> <li>4. Siswa penerima PIP</li> </ol> |
| <b>Dampak Program PIP</b> | <b>1. Prestasi Belajar</b>                             | 1. Hasil belajar siswa penerima PIP sebelum dan sesudah menerima PIP pada mata pelajaran yang di UN kan (Nilai Rapor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sekolah</li> <li>2. Wali Kelas</li> <li>3. Siswa penerima PIP</li> <li>4. Pejabat Dinas Kab/kota</li> </ol>          |
|                           | <b>2. Disiplin/ norma sekolah dan Motivasi belajar</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin/norma sekolah sebelum dan sesudah menerima PIP:: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat absensi/kehadiran siswa penerima PIP di sekolah</li> <li>b. Tingkat perilaku siswa penerima PIP “membolos “</li> <li>c. Ketaatan mengerjakan tugas PR bagi penerima PIP</li> <li>d. Perilaku Disiplin/norma lainnya (perkelahian, kesusilaan, dan narkoba)</li> </ol> </li> <li>2. Motivasi belajar sebelum dan sesudah menerima PIP: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dorongan belajar</li> <li>b. Keteraturan belajar</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sekolah</li> <li>2. Wali Kelas</li> <li>3. Orangtua Siswa/Wali</li> <li>4. Siswa penerima PIP</li> </ol>             |
|                           | <b>3. Aktivitas dalam Program Sekolah</b>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler sebelum dan sesudah menerima PIP: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Olah raga</li> <li>b. Kesenian</li> <li>c. Lainnya</li> </ol> </li> <li>2. Kegiatan sekolah lainnya <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Karya wisata</li> <li>b. Kegiatan sosial</li> <li>c. Kegiatan keagamaan</li> <li>d. Lainnya</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sekolah</li> <li>2. Wali Kelas</li> <li>3. Siswa penerima PIP</li> </ol>                                             |
|                           | <b>4. Kebutuhan dana pendidikan pribadi</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan dana PIP</li> <li>2. Besaran bantuan PIP terhadap pengeluaran keluarga</li> <li>3. Implikasi bantuan PIP terhadap kesibukan/peran siswa dalam ekonomi keluarga</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sekolah</li> <li>2. Orangtua Siswa/Wali</li> <li>3. Pejabat Dinas Kab/kota</li> <li>4. Siswa penerima PIP</li> </ol> |

---

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data dan belum diolah oleh pihak mana pun. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah *self-administered* kuesioner dan DKT.

Data terkait efektivitas program pemberian subsidi siswa, diperoleh melalui pengisian kuisisioner kepada kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, orang tua siswa dan siswa penerima PIP dengan diukur melalui ketercapaian ketepatan: a) sasaran (jumlah penerima PIP dan jenis PIP, kemampuan ekonomi dan sosial, kedisiplinan, dan latar belakang orang tua siswa); b) jumlah penerima (jumlah siswa yang diajukan utk menerima PIP, jumlah penerima PIP seharusnya, jumlah penerima PIP riil); c) Jumlah Dana (jumlah dana yang diterima siswa seharusnya, jumlah dana yang diterima siswa riil, dan d) waktu penerimaan dana (waktu dan frekuensi penerimaan dana PIP oleh siswa seharusnya, waktu dan frekuensi penerimaan dana PIP oleh siswa senyatanya. Pengisian kuisisioner dilakukan oleh pihak dinas pendidikan, guru/walikelas, orang tua dan siswa. Kuesioner penelitian dibangun dan dirancang dengan struktur pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan tertutup menggunakan *rating scale* dengan skala respon ordinal dan nominal.

Selain kuesioner, data diperoleh melalui diskusi kelompok terpumpun (DKT) untuk menggali persepsi kolektif mengenai pelaksanaan dan manfaat PIP. Total peserta DKT yang dilaksanakan di setiap kabupaten/kota berjumlah 18 orang, yang terdiri dari 3 orang narasumber pusat, 2 orang dari unsur Dinas Pendidikan, dan 8 orang kepala sekolah dari sekolah yang siswanya penerima PIP, satu orang dari bank penyalur, serta 4 orang tua siswa penerima PIP.

**Tabel 3.8: Rincian Jumlah Peserta DKT di Kabupaten/Kota Sampel**

| No.   | Provinsi          | Kab./Kota        | Nara<br>sumber<br>Pusat | Disdik | Kepala Sekolah |     |     |     | Bank<br>Penyalur | Ortu<br>siswa | Total |
|-------|-------------------|------------------|-------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|------------------|---------------|-------|
|       |                   |                  |                         |        | SD             | SMP | SMA | SMK |                  |               |       |
| 1     | Jawa Barat        | Kota. Bogor      | 3                       | 2      | 2              | 2   | 2   | 2   | 1                | 4             | 18    |
| 2     | Jawa Tengah       | Kab. Temanggung  | 3                       | 2      | 2              | 2   | 2   | 2   | 1                | 4             | 18    |
| 3     | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka      | 3                       | 2      | 2              | 2   | 2   | 2   | 1                | 4             | 18    |
| 4     | Lampung           | Kota Metro       | 3                       | 2      | 2              | 2   | 2   | 2   | 1                | 4             | 18    |
| 5     | Bengkulu          | Kab. Kepahiang   | 3                       | 2      | 2              | 2   | 2   | 2   | 1                | 4             | 18    |
| 6     | Sumatera Barat    | Kota Bukittinggi | 3                       | 2      | 2              | 2   | 2   | 2   | 1                | 4             | 18    |
| TOTAL |                   |                  | 18                      | 12     | 12             | 12  | 12  | 12  | 6                | 24            | 108   |

Sementara, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang menyangkut Program Indonesia Pintar, hasil-hasil penelitian yang relevan dari perpustakaan maupun media daring, serta laporan evaluasi program PIP dari Kemendikbud.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam kajian ini menggunakan teknik statistika deskriptif dan teknik *directed content analysis*. Teknik statistika deskriptif digunakan untuk mentabulasi, menghitung, dan menampilkan distribusi frekuensi untuk setiap item kuesioner dengan format pertanyaan/ Pernyataan tertutup. Output analisis statistika ini akan menampilkan frekuensi setiap aspek implementasi program PIP. Sebagai analisis tambahan, efektivitas PIP dapat pula diukur dan ditampilkan dengan menggunakan diagram kartesius, yaitu pemetaan kategorisasi efektivitas pelaksanaan PIP berdasarkan wilayah kabupaten/kota dan atau berdasarkan jenjang pendidikan.

Sementara, seluruh data yang terkumpul melalui kuesioner dengan format pertanyaan terbuka dan Diskusi kelompok terpumpun (DKT), akan dianalisis menggunakan teknik *directed content analysis*, yaitu peneliti menggunakan kerangka konseptual yang ada (yaitu konsep Program Indonesia Pintar) untuk mengeksplorasi berbagai kendala dan capaian pelaksanaan program PIP.

---

Tahapan teknik *directed content analysis* dimulai dengan mengidentifikasi berbagai kata kunci dalam data yang diperoleh dari DKT dan kuesioner format pertanyaan terbuka. Identifikasi kata kunci ini kemudian akan diverifikasi menggunakan teknik *qualitative factor analysis* (QFA). Seluruh kata kunci yang teridentifikasi, akan dipetakan dan disajikan ke dalam diagram kartesius untuk mempertegas temuan yang diperoleh melalui kuesioner format pernyataan tertutup. Teknik QFA ini juga memungkinkan penelitian ini menghasilkan instrumen baru pengukuran efektivitas program PIP, selain instrumen yang telah ada dalam penelitian ini.

Terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan dari dua teknik analisis (distribusi frekuensi + diagram kartesius, dan *qualitative faktor analysis* + diagram kartesius) tentang efektivitas pelaksanaan program PIP. Kompilasi kedua teknik analisis diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lengkap, baik secara statistis (kuantitatif) maupun secara deskriptif (kualitatif).

Aspek yang dianalisis dalam efektivitas program pemberian subsidi siswa mencakup: a) kesesuaian/perbandingan kondisi sosial ekonomi orang tua (tepat jika penerima PIP dari keluarga dengan tingkat sosial ekonomi orang tua miskin/lemah); b) kesesuaian/perbandingan kondisi absensi siswa penerima PIP dengan persyaratan (tepat jika kehadiran siswa minimal 75 persen); c) kesesuaian/perbandingan kondisi ketaatan siswa penerima PIP pada norma/tata tertib dengan persyaratan PIP (tepat jika penerima taat dan tertib); d) perbandingan latar belakang orangtua dengan persyaratan penerima PIP; e) kesesuaian/perbandingan kondisi jumlah penerima PIP (yang seharusnya) dengan jumlah penerima PIP yang senyatanya (tepat jika jumlah penerima sesuai); f) kesesuaian/perbandingan jumlah dana PIP yang diterima per siswa (yang seharusnya) dengan jumlah dana PIP yang diterima per siswa yang senyatanya (tepat jika jumlah dana per siswa sesuai).

Untuk mengetahui dampak program pemberian subsidi siswa, data diperoleh melalui pengisian kuisisioner kepada kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, orang tua siswa dan siswa penerima PIP dengan indikator-indikator pengukur antara lain: a) prestasi belajar; b) disiplin/norma sekolah dan motivasi belajar; c) aktifitas dalam program sekolah; d) prestasi belajar.

Aspek yang dianalisis dari dampak pelaksanaan program pemberian Program Indonesia Pintar mencakup:

- 
- a. Besarnya siswa yang menerima PIP dari SD , SMP, SMA hingga SMK (semakin besar jumlah siswa penerima PIP, semakin program PIP berdampak terhadap kelangsungan pendidikan);
  - b. Besarnya penerima PIP dari SD, SMP, SMA dan SMK menunjukkan upaya yang baik dalam membantu siswa melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya,
  - c. Perbandingan hasil belajar sebelum dan sesudah menerima PIP (jika nilai siswa lebih baik setelah menerima PIP, berarti PIP berdampak positif);
  - d. Perbandingan tingkat absensi/kehadiran siswa di SD, SMP, SMA dan SMK dengan tingkat absensi/kehadiran siswa penerima PIP di sekolah, tingkat absensi sebelum dan sesudah menerima PIP, frekuensi membolos siswa sebelum dan sesudah menerima PIP, ketaatan mengerjakan tugas PR sebelum dan setelah menerima PIP, perilaku disiplin/norma lainnya (perkelahian, kesusilaan, dan narkoba) sebelum dan setelah menerima PIP, motivasi belajar (dorongan belajar, keteraturan belajar, dsb) sebelum dan setelah menerima PIP;
  - e. Perbandingan keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler: olah raga, kesenian, lainnya sebelum dan setelah menerima PIP, kegiatan sekolah lainnya, seperti karya wisata, kegiatan sosial dan keagamaan sebelum dan setelah menerima PIP. Semakin tinggi keikutsertaan siswa maka semakin berkembang minat dan bakat siswa serta program sekolah;
  - f. Semakin banyak dana yang digunakan sesuai ketentuan (dana pribadi siswa), semakin bermanfaat/berfungsi PIP dalam pendidikan terhadap pengeluaran keluarga dan aktivitas siswa penerima PIP dalam mencari penghasilan keluarga.

---

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan temuan dan pembahasan tentang Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) dan berupaya menjawab permasalahan tentang bagaimanakah efektivitas program Indonesia Pintar serta dampaknya terhadap keberlangsungan pendidikan, prestasi belajar serta peningkatan disiplin dan motivasi belajar siswa.

#### **4.1 Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP)**

Temuan dan pembahasan PIP pada dimensi dan indikator efektivitas yang mencakup (1) Ketepatan Sasaran; (i) Ketepatan Pemenuhan Persyaratan Penerima PIP, (ii) Ketepatan terhadap Cakupan Jumlah Penerima PIP, (2) Ketepatan waktu Penerimaan dana PIP, dan (3) Ketepatan Jumlah dan Penggunaan Dana PIP.

##### **4.1.1 Ketepatan Sasaran;**

###### **1) Ketepatan Pemenuhan Persyaratan Penerima PIP**

Petunjuk teknis pelaksanaan program PIP yang ditetapkan oleh pemerintah menyebutkan bahwa penerima PIP adalah siswa dari keluarga miskin. Siswa penerima PIP sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari tujuh kriteria, yaitu 1) siswa/anak yang berasal dari rumah tangga terdaftar sebagai peserta/mempunyai Program Keluarga Harapan (PKH)/KPS/KKS; 2) siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan; 3) siswa/anak yang terkena dampak bencana alam; 4) anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (*drop-out*) yang diharapkan kembali bersekolah; 5) siswa/anak miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah; 6) siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan; 7) siswa dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: pertanian (bidang agrobisnis dan agroteknologi), perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman, (Kemdikbud, 2013).

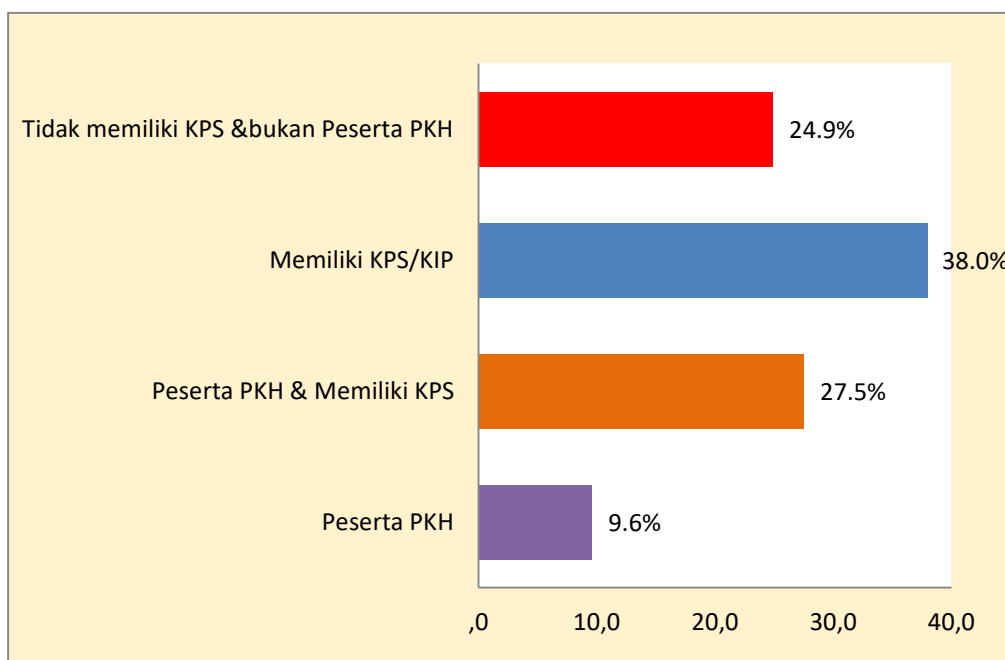
Persyaratan pertama bersifat administratif, sementara enam lainnya bersifat substantif. Studi ini menelaah sejauh mana upaya sekolah/pemerintah

---

menerapkan kriteria-kriteria di atas dalam menyeleksi para siswa penerima PIP dan menganalisis lebih lanjut seberapa relevan hal tersebut dengan kondisi nyata para penerima PIP. Persyaratan penerima PIP yang ditentukan oleh pemerintah baik secara administratif maupun substantif tampaknya telah secara efektif ditaati oleh pemerintah yakni dalam hal ini dinas pendidikan dan juga kepala sekolah di lapangan. Hal ini terlihat dari sasaran penerima PIP yang secara administratif telah dipenuhi, yakni sekolah melalui dinas mengusulkan siswa penerima yaitu dengan cara sekolah mengentry (updating) data siswa (nomor KPS/KKS/KIP) calon penerima PIP dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP ke dalam aplikasi Dapodik. Data tersebut sebagai data usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke dinas pendidikan kab/kota dan direktorat teknis. Dengan demikian terkait persyaratan administratif, studi ini memiliki temuan yang cukup menggembirakan. Melalui isian kuesioner oleh responden orangtua ditemukan bahwa sudah lebih dari separuh orangtua siswa penerima PIP yang memiliki KPS/KKS.

Untuk siswa SD dan SMP jumlah pemilik KPS/KKS sudah lebih dari 80%. Kondisi yang hampir sama terjadi pada jenjang SMA/SMK, juga mencapai lebih dari separuhnya (64,3%) orangtua siswa yang memiliki KPS/KKS (lihat Grafik 1). Hal ini menunjukkan bahwa sekolah/pemerintah sudah menyandarkan diri pada persyaratan kepemilikan KPS/KKS dalam menentukan siswa penerima PIP. Begitu juga saat para peneliti melakukan diskusi kelompok terpusat (DKT), dimana para narasumber DKT menyampaikan bahwa sebagian besar pemegang KPS/KKS adalah keluarga miskin. Kendati demikian, di beberapa daerah lokasi penelitian tampak masih terdapat penyimpangan dalam penentuan persyaratan kepemilikan KPS/KKS tersebut, yakni belum sepenuhnya akurat yang menunjukkan sasaran maupun cakupan keluarga miskin di satu lingkungan/wilayah tertentu. Hal ini terindikasi pada adanya siswa mampu secara sosial-ekonomi, misalnya anak karyawan atau anak guru yang masih mendapatkan PIP. Menurut mereka, ada keluarga pada suatu wilayah yang memiliki kondisi yang lebih buruk dibandingkan pemegang KPS/KKS. Keluarga-keluarga ini terlewat dari pencacahan yang dilakukan oleh aparat setempat sehingga tidak terdaftar dan tidak dapat memiliki KPS/KKS. Pendataan rumah tangga miskin oleh pemerintah (KPS/KKS) dinilai kurang akurat dan belum mencakup seluruh rumah tangga miskin. Bahkan, di Kolaka ada sekolah yang memiliki puluhan siswa miskin, ternyata hanya ditemukan beberapa orang saja sebagai

pemegang KPS/KKS. Kesenjangan antara banyaknya siswa yang miskin dengan sedikitnya pemegang KPS/KKS tersebut terjadi di beberapa kabupaten kota. Rendahnya tingkat akurasi pendataan KPS/KKS inilah yang membuat sekolah merasa kurang puas dengan mengandalkan kepemilikan KPS/KKS sebagai syarat.

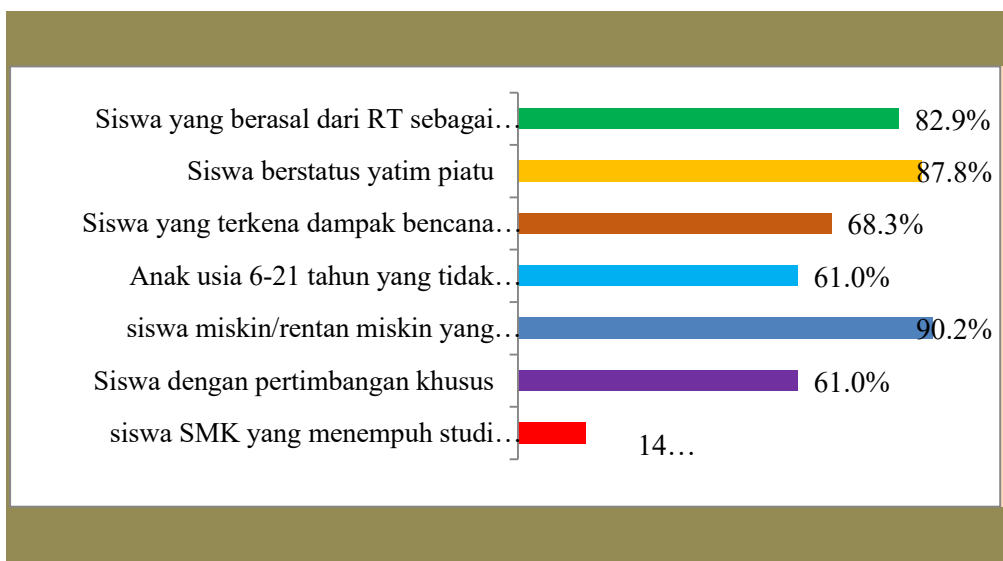


**Grafik 1 : Orang Tua Siswa Yang Memiliki KPS/KKS**

Selain faktor kemiskinan, ada dua hal yang menjadi prioritas yang ditekankan oleh sekolah/pemerintah dalam menyeleksi siswa calon penerima PIP. Prioritas pertama adalah melihat kondisi latar belakang sosial ekonomi keluarga dan prioritas kedua adalah melihat kondisi personal siswa. Dari sisi latar belakang sosial ekonomi keluarga, hampir semua sekolah (90,2%) memberi prioritas kepada siswa miskin/rentan miskin dan terancam DO.

Pada dasarnya, ancaman putus sekolah bisa disebabkan oleh banyak hal seperti ekonomi keluarga, kedisiplinan, ataupun prestasi siswa itu sendiri. Karena PIP juga berorientasi pada pengurangan angka putus sekolah, ancaman DO dengan alasan apapun menjadi perhatian yang serius. Sedangkan kriteria yang termasuk siswa yatim piatu (87,8%) (lihat Grafik 2). Hal ini dianggap

rasional karena beban ekonomi akan menjadi lebih berat ketika aset (dalam hal ini penopang ekonomi rumah tangga) berkurang/tidak ada. Kondisi-kondisi keluarga yang lain, yaitu orangtua yang terkena PHK atau keluarga tertimpa musibah menjadi prioritas yang lebih rendah karena situasi tersebut bersifat sementara. Tidak lebih dari 70% yaitu sebesar 68,3% sekolah yang memberi prioritas pada kedua kondisi tersebut. Di sisi yang lain, untuk aspek kondisi personal siswa, sekolah-sekolah memberi prioritas pada siswa yang berasal dari rumah tangga sebagai peserta program PKH (82,9%) dan siswa dengan pertimbangan khusus dan siswa/anak berusia 6-21 th yang tidak bersekolah (61%). Khusus untuk kelompok siswa SMK yang menempuh studi keahlian jumlahnya tidak lebih dari 15 % yaitu 14,6% saja. Kondisi ini sangat jarang dan hanya terjadi pada siswa SMK yang menempuh studi keahlian tertentu.

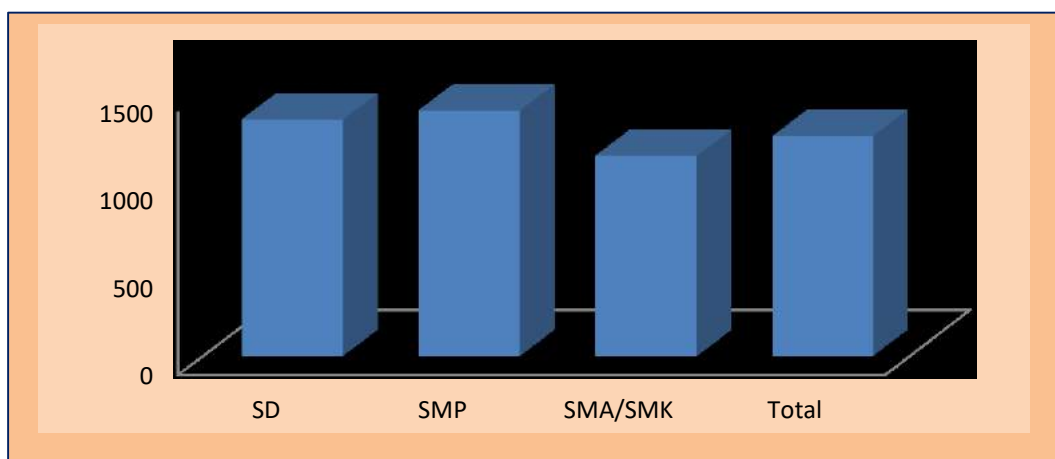


**Grafik 2 : Distribusi Pemenuhan Persyaratan Siswa Penerima PIP  
( Kepsek n=45)**

Selain menggunakan kriteria kemiskinan untuk pemenuhan persyaratan penerima PIP, kajian ini juga melakukan analisis terhadap profil ekonomi keluarga para siswa. Hasil dari analisis diharapkan dapat memastikan bahwa siswa penerima PIP benar-benar “layak” disebut miskin. Penghitungan kadar kemiskinan dapat dihitung berdasarkan pada kriteria pendapatan rumah tangga per-kapita, yaitu jumlah pendapatan per-bulan dibagi dengan jumlah

seluruh anggota keluarga. Jika mengacu pada parameter BPS, menghitung kemiskinan berdasarkan kemampuan konsumsi, garis kemiskinan nasional adalah Rp 211.726 per kapita per bulan (BPS, 2010).

Jika kondisi kemiskinan ini diurai lebih jauh, didapatkan bahwa ranking kemiskinan orangtua siswa SMA/SMK adalah yang berpendapatan paling rendah dan orangtua siswa SMP berpendapatan paling tinggi. Ini menunjukkan bahwa keluarga siswa SMA/SMK adalah yang paling banyak membutuhkan biaya secara finansial untuk membiayai sekolah anaknya terlebih siswa SMK yang banyak membutuhkan biaya untuk keperluan praktek di sekolahnya. Kenyataan ini membuat PIP semakin diperlukan. Jika diterapkan secara berkelanjutan, PIP akan menolong orangtua siswa SMA/SMK saat ini untuk terus menyekolahkan anak mereka sampai selesai bahkan diharapkan ke jenjang yang lebih tinggi nantinya.



**Grafik 3 : Rerata Penghasilan Ortu (dalam ribu)**

Jumlah pendapatan keluarga siswa miskin tersebut dapat pula dibandingkan dengan jenis pekerjaan orangtua. Umumnya yang mencari nafkah/bekerja adalah ayah sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan ibu lebih banyak yang tidak bekerja. Jika dilihat dari sisi pekerjaan ayah, maka lebih dari separuh orangtua siswa miskin bekerja pada sektor informal. Ini dapat dilihat dari tiga jenis pekerjaan utama yang dominan, yaitu buruh, pedagang, dan petani/nelayan. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam sektor

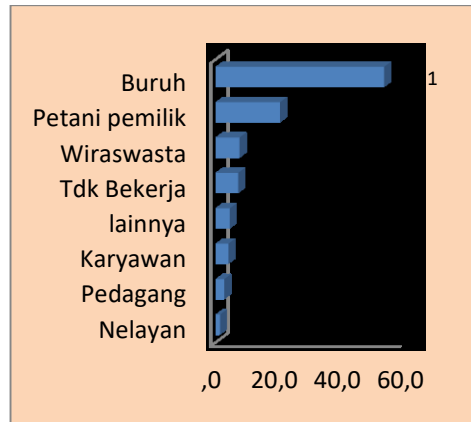
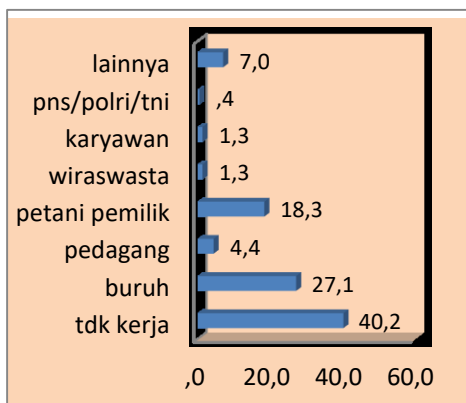
---

informal tersebut tentu saja tidak dapat diharapkan untuk memperoleh penghasilan yang tetap/pasti (lihat Grafik 4 dan 5).

Pekerjaan sebagai buruh biasanya ada pada waktu tertentu saja/musiman sehingga tidak setiap bulan memperoleh penghasilan. Begitu pula halnya dengan para petani dan nelayan yang sangat bergantung pada kondisi musim atau cuaca. Dengan demikian mereka baru memperoleh pendapatan pada saat panen atau mendapatkan tangkapan ikan hasil dari melaut. Hal ini kiranya dapat dijadikan kriteria/indikasi bahwa ketiga jenis pekerjaan tersebut memang sangat dekat dengan kondisi kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis data yang ada ditemukan pula sejumlah orangtua dengan pekerjaan sektor formal, yaitu sebagai karyawan swasta dan pegawai negeri sipil (PNS) meskipun jumlahnya sedikit. Jenis pekerjaan ini dapat dianggap sebagai pekerjaan yang mapan karena mendapatkan/menjanjikan penghasilan tetap setiap bulan. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan para pekerja di sektor formal melalui penerapan regulasi-regulasi seperti ketentuan upah minimum, Jaminan asuransi BPJS, baik BPJS kepegawaian maupun BPJS kesehatan, penguatan serikat pekerja/pegawai, dan sebagainya.

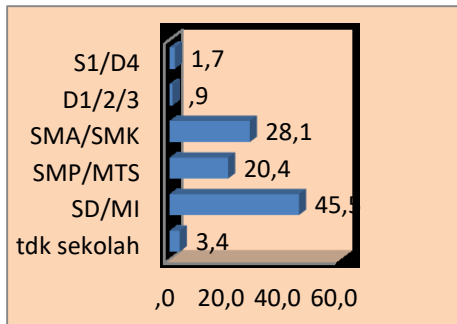
Untuk lebih jelas grafik 4 dan 5 berikut memberikan gambaran jenis pekerjaan orangtua siswa penerima bantuan dana PIP secara berurutan yaitu orangtua (ibu) sebesar 40,2% tidak bekerja dan ayah yang bekerja sebagai buruh (53,1%). Selanjutnya ibu yang bekerja sebagai buruh (27,1%), sebagai petani (18,3%) dan pekerjaan ayah adalah petani (20,2%) yang disusul sebagai wiraswasta (7,5%).



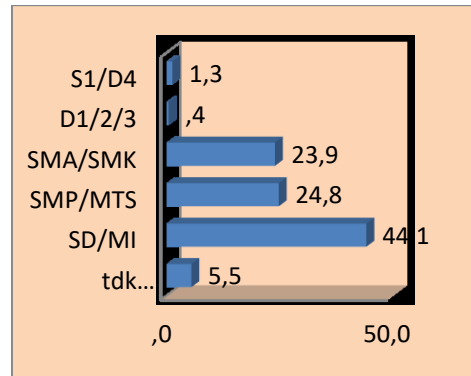
Grafik 4 : Pekerjaan Ortu Siswa (Ibu) Grafik 5: Pekerjaan Ortu Siswa (Ayah)

Analisis yang dilakukan terkait dengan kriteria kemiskinan untuk ketepatan pemenuhan persyaratan penerima PIP, selain dari aspek pekerjaan, maka aspek pendidikan juga dianalisis lebih lanjut. Hasil studi yang dilakukan Barlow, dkk yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan sarana bagi keberlangsungan mobilitas sosial ekonomi secara vertikal (Barlow, Noble, dan Smith, 1995). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk meraih peran sosial ekonomi yang lebih tinggi. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan individu, semakin terbatas pula aksesnya terhadap peran sosial ekonomi. Dengan demikian diharapkan pemberian PIP kepada peserta didik yang tidak mampu dapat memperbaiki kualitas pendidikan keluarga. Berdasarkan data yang ada, didapatkan bahwa tidak lebih dari 2% orangtua, baik ayah maupun ibu, yang pernah duduk di bangku pendidikan tinggi (lihat Grafik 6 dan 7). Dan hampir separuh orangtua hanya dapat menamatkan bangku sekolah dasar. Bahkan, hasil analisis menunjukkan beberapa orangtua ada yang sama sekali tidak pernah bersekolah. Rendahnya tingkat pendidikan keluarga dari siswa penerima PIP ini “melegitimasi/menguatkan” kondisi kemiskinan para siswa penerima PIP.

Dari hasil analisis terkait dengan aspek ketepatan pemenuhan persyaratan penerima PIP, dapat dikatakan bahwa secara umum ketepatan persyaratan PIP sudah cukup terpenuhi meskipun masih terdapat hal-hal teknis dan administratif yang perlu untuk segera dibenahi/diperbaiki.



**Grafik 6: Pendidikan Ortu Siswa (Ayah)**



**Grafik 7: Pendidikan Ortu Siswa (Ibu)**

## 2) Ketepatan Cakupan Jumlah Penerima PIP

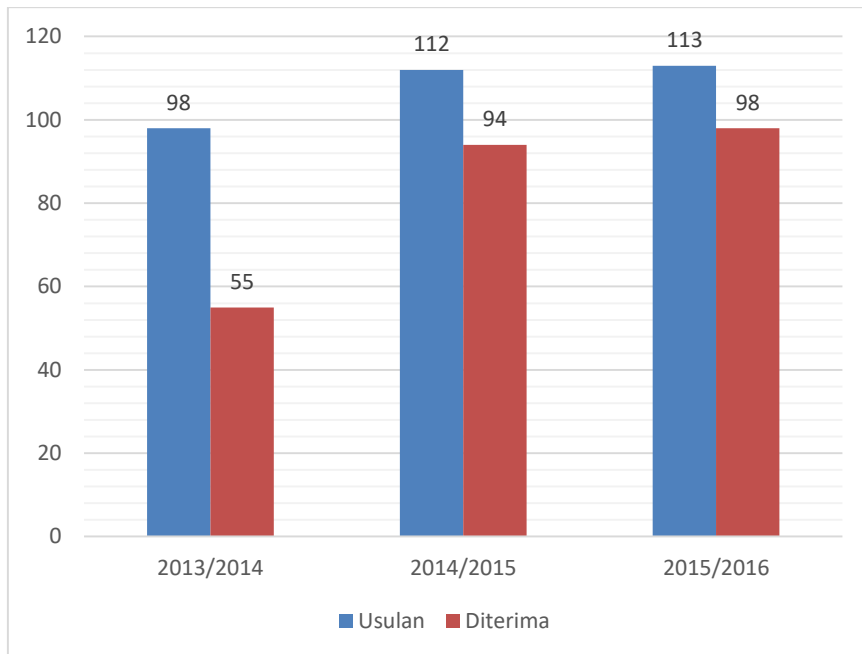
Berdasarkan data dari TNP2K yang memberikan gambaran tentang proses identifikasi siswa miskin didasarkan pada sensus data penduduk miskin. Pada data yang terkumpul tersebut ditentukan percentile 40% ke bawah sebagai target penerima Program Indonesia Pintar. Sasaran dari pengumpulan data adalah 97 juta rumah tangga. Dijelaskan bahwa pengertian rumah tangga adalah satu keluarga baik *nuclear* maupun *extended family*. Untuk menentukan tingkat kemiskinan variable yang dijadikan untuk pengumpulan data antara lain kondisi bangunan rumah, konsumsi keluarga, dan penghasilan keluarga. Pemberian bantuan kepada siswa didasarkan pada tingkat kemiskinan keluarga. Ketika keluarga dinyatakan miskin yakni keluarga yang masuk dalam range percentile 40% ke bawah, maka semua anaknya yang sekolah secara otomatis mendapatkan dana Program Indonesia Pintar.

**Tabel 4.1: Alokasi PIP 2015-2016**

| Jenjang Pendidikan        | 2015              |                           | 2016*             |                           |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
|                           | Sasaran           | Anggaran                  | Sasaran           | Anggaran                  |
| <b>Kemendikbud</b>        |                   |                           |                   |                           |
| SD                        | 10,470,610        | 4,711,774,500,000         | 10,360,614        | 4,299,010,725,000         |
| SMP                       | 4,249,607         | 3,187,205,250,000         | 4,369,968         | 3,325,099,770,000         |
| SMA                       | 1,353,515         | 1,353,515,000,000         | 1,367,559         | 1,391,564,000,000         |
| SMK                       | 1,846,538         | 1,846,538,000,000         | 1,829,167         | 1,408,665,662,000         |
| <b>Jumlah Kemendikbud</b> | <b>17,920,270</b> | <b>11,099,032,750,000</b> | <b>17,927,308</b> | <b>10,424,340,157,000</b> |
| <b>Kemenag</b>            |                   |                           |                   |                           |
| MI/Ula/Sederajat          | 877,992           | 395,096,400,000           | 567962            | 255,607,900,000           |
| MTs/Wustha/Sederajat      | 1,020,616         | 765,462,000,000           | 671862            | 503,787,000,000           |
| MA/Ulya/Sederajat         | 552,964           | 552,965,000,000           | 380378            | 380,980,000,000           |
| <b>Jumlah Kemenag</b>     | <b>2,451,572</b>  | <b>1,713,523,400,000</b>  | <b>1,620,202</b>  | <b>1,140,374,900,000</b>  |
| <b>Total</b>              | <b>20,371,842</b> | <b>12,812,556,150,000</b> | <b>19,547,510</b> | <b>11,564,715,057,000</b> |

Kecenderungan alokasi kuota PIP selama dua tahun tampak konsisten kenaikannya (lihat Tabel 4.1). Konsistensi terjadi tingkat ,SMP,SMA dan SMK, yaitu kuota penerima PIP terus mengalami kenaikan selama dua tahun. Pemerintah menjadikan data kemiskinan sebagai acuan penentuan kuota PIP. Sejalan dengan itu juga temuan pada kajian ini menunjukkan bahwa pengajuan jumlah penerima BSM/PIP terus meningkat dari tahun ke tahun, dan rata-rata realisasinya juga lebih dari 50%. Kecenderungan realisasi ini sesuai dengan alokasi yang disediakan Pemerintah, rata-rata meningkat (lihat grafik 8). Adanya tren kenaikan usulan secara konsisten bukan berarti kemiskinan juga meningkat, karena kenyataannya angka kemiskinan nasional terus menurun.

Berikut uraian dari rerata jumlah usulan dan rasio penerimaan bantuan dana BSM/PIP per sekolah selama 3 tahun sejak tahun 2013/2014 s.d. tahun 2015/2016. Dalam 3 tahun tersebut jumlah usulan meningkat begitu pula dengan jumlah usulan yang diterima. Kenaikan jumlah usulan yang diterima cukup tinggi dari tahun 2013/2014 ke tahun 2014/2015 yaitu sekitar 39%, sementara kenaikan usulan yang diterima dari tahun 2014/2015 ke tahun 2015/2016 hanya sekitar 3%. Kondisi ini menunjukkan bahwa program PIP ini di jalankan dengan penuh perhatian dalam memenuhi jumlah usulan walaupun tidak dipenuhi 100%. Hal ini sudah memperlihatkan keseriusan Pemerintah dalam menyalurkan bantuan dana PIP kepada siswa miskin.



**Grafik 8: Rata-rata jumlah siswa yang diusulkan dan diterima/ memperoleh PIP (Resp. Kepsek, n=45)**

Berdasarkan grafik kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa belum semua siswa miskin di sekolah yang menjadi sasaran telah terjangkau. Pada saat ini tercatat jumlah total penerima untuk jenjang SD ada 10,3 juta anak, kemudian di SMP ada 4,3 juta penerima, SMA (1,3 juta), dan SMK (1,8 juta). Jadi total keseluruhan sekitar 17,9 juta anak penerima bantuan program Indonesia pintar (PIP) dengan total anggaran sekitar Rp11,2 triliun dari siswa SD hingga SMA/SMK yang telah menerima PIP, namun jumlah tersebut belum dapat menjangkau seluruh siswa miskin yang berada di satuan pendidikan tersebut. Dari jumlah itu diperuntukkan bagi 13,7 (76,6%) juta anak yang bersekolah dan 4,2 (23,4%) juta anak yang tidak bersekolah.

Melengkapi hasil analisis yang ada, informasi yang diperoleh dari hasil DKT tampaknya tidak berbeda jauh dengan data dari kuesioner yaitu bahwa data jumlah siswa penerima yang turun dari Direktorat secara umum selalu lebih kecil dari yang diusulkan. Hal ini terjadi pada usulan di kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara siswa non KPS/KIP, yaitu di SMK dengan usulan 200 siswa yang turun hanya 91 siswa, sedangkan di SD semua siswa yang

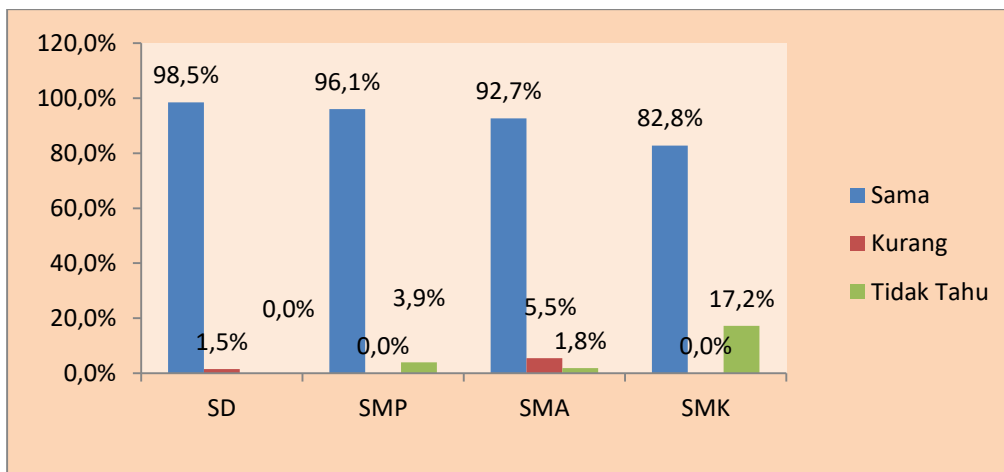
---

punya KIP yang dibagikan oleh kecamatan memperoleh dana PIP dan untuk siswa tidak mampu yang tidak punya KPS sebanyak 30 orang yang menerima tahap 1 baru 8 orang. Namun berbeda dengan di SMA, tanpa adanya usulan dari SMA yang bersangkutan, 75% siswa sekolah ini menerima dana PIP (di atas 200 siswa). Khusus siswa SMP Terbuka belum ada yang menerima dana PIP karena siswa tidak mengumpulkan KPS/KIP. Sementara itu, SMP reguler mengusulkan sebanyak 140 siswa non KPS untuk memperoleh dana PIP (Pengusulan non KPS) yang melengkapi usulan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Hal ini diduga karena terbatasnya jumlah dana untuk PIP yang disediakan oleh pemerintah, sehingga pengaturan penentuan kuota di Kab/kota berimbas pada penentuan kuota setiap sekolah yang mengajukan PIP.

Berdasarkan hasil analisis data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ketercakupan penerima PIP yang belum proporsional antara pengusul dengan jumlah siswa yang menerima. Namun, upaya meningkatkan jumlah penerima PIP tetap perlu dilakukan sebagai bentuk *quality assurance* untuk menjamin siswa miskin tetap bersekolah. Kajian ini merupakan bentuk upaya menjalankan prinsip *quality assurance* melalui evaluasi efektivitas pelaksanaan program Indonesia pintar (PIP).

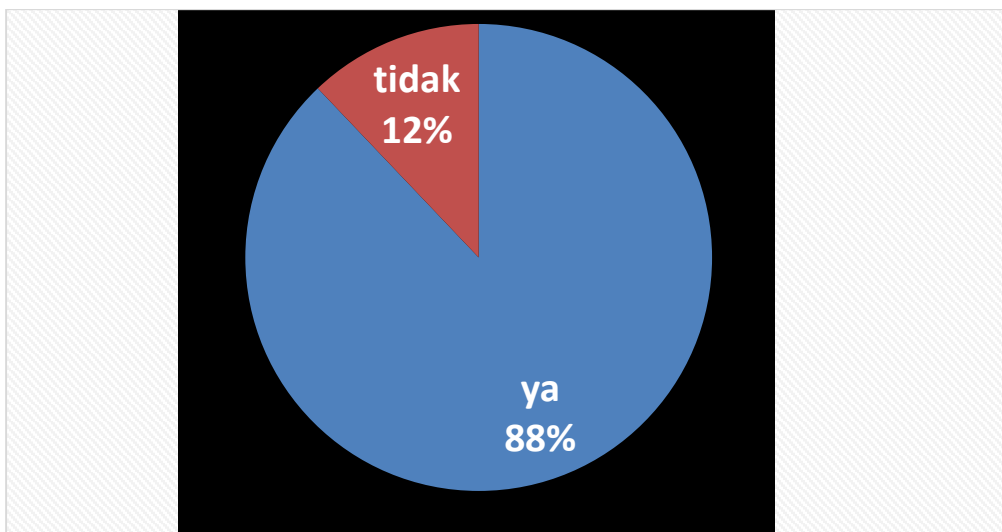
#### **4.1.2 Ketepatan Jumlah dan Penggunaan Dana PIP yang Diterima**

Terkait dengan ketepatan jumlah dan penggunaan dana PIP dapat diukur berdasarkan kesesuaian jumlah dana PIP yang diterima siswa sesuai dengan ketentuan. Besaran uang bantuan yang diberikan bervariasi yakni SD 450 ribu rupiah /siswa/tahun, SMP 750 ribu rupiah / siswa/tahun, dan SMA/SMK 1 juta rupiah/siswa/tahun. Diketahui bahwa tidak seluruh siswa di semua jenjang pendidikan, yakni SD, SMP dan SMA menerima jumlah dana PIP sesuai dengan ketentuan tersebut.



**Grafik 9: Persentase siswa penerima PIP yang sesuai dengan ketentuan dan yang senyatanya (Siswa)**

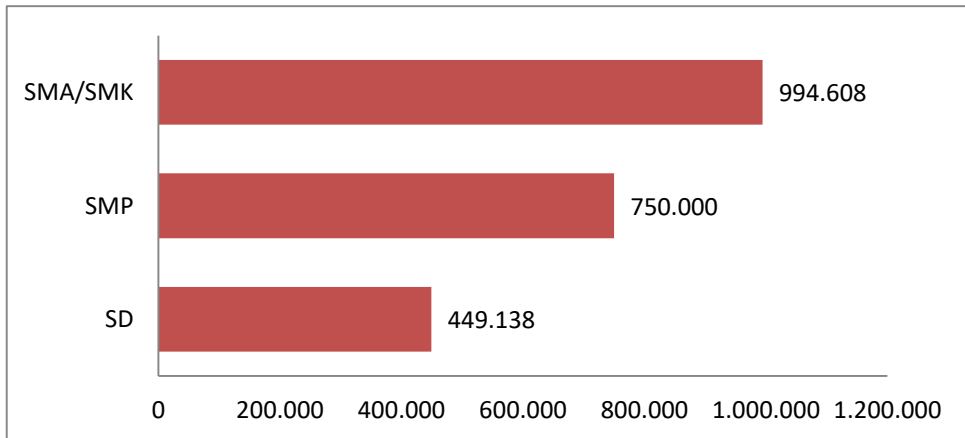
Grafik 9 memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa mengakui menerima jumlah dana PIP sesuai dengan seharusnya, dan tingkat ketepatan penerimaan tersebut semakin menurun dan tidak sesuai menurut jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Di SD siswa yang menerima sesuai dengan ketentuan paling tinggi yaitu 98,5%, menurun di SMP menjadi 96,1% dan semakin rendah lagi di tingkat SMA (92,7%) dan SMK yakni (82,8%)%. Hal ini juga sejalan dengan hasil dari DKT yaitu besarnya subsidi yang diterima siswa tersebut masih dirasakan belum dapat mengatasi kebutuhan biaya personal siswa. Pemberian dana PIP diarahkan untuk mengkompensasi biaya tidak langsung yang harus dibayar oleh orang tua dari keluarga miskin. Dana PIP digunakan untuk membayar biaya langsung, bahkan untuk SMK siswa menerima sisa dana PIP sebesar 5%-10% saja, dan siswa SMP yang terdaftar pada SMP swasta juga harus menanggung biaya langsung, terutama biaya operasional. Secara umum besaran dana yang diterima oleh siswa, adalah sekitar 5% untuk siswa SMK, 10% untuk siswa SMP dan SMA dari jumlah dana PIP yang dialokasikan per siswa. Dana PIP yang diterima siswa tsb kadang sudah dipotong oleh sekolah membayar tunggakan iuran sekolah yang berkisar 4 sampai dengan 6 bulan.



**Grafik 10: Kesesuaian Jumlah Dana PIP Yang diterima Siswa dengan Ketentuan**

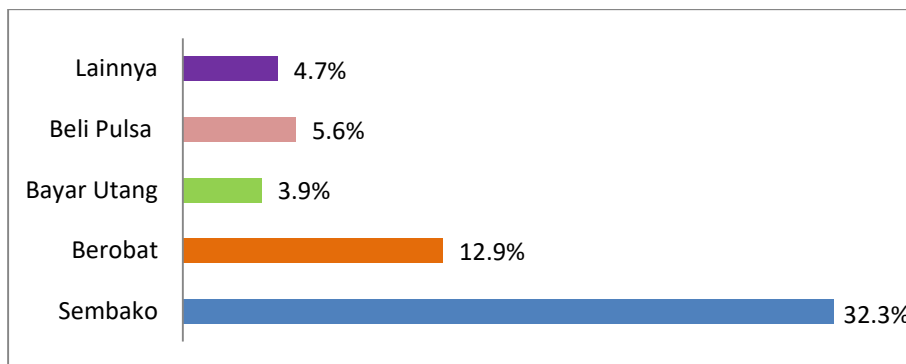
Apabila kita lihat jumlah total secara keseluruhan, maka masih ada lebih dari sepuluh persen (12%) siswa penerima PIP (di SD, SMP, dan SMA/SMK) yang tidak menerima secara utuh nominal dana PIP sesuai dengan yang seharusnya (lihat Grafik 10). Sehingga untuk siswa penerima PIP yang duduk di bangku SD menerima kurang dari Rp 450.000, SMP kurang dari Rp750.000 dan siswa SMA kurang dari 1 Juta rupiah. Hal ini berarti bahwa dana PIP tidak selalu diterima siswa sesuai dengan jumlah yang seharusnya (lihat Grafik 10), dan sekaligus mengindikasikan bahwa masih ada lebih dari sepuluh persen siswa yang tidak menerima PIP dengan jumlah nominal yang utuh dan efektif untuk pembiayaan pribadi siswa. Masalah ini bisa terjadi karena beberapa hal seperti: 1) ada beberapa bank penyalur yang menetapkan bahwa dana tidak boleh seluruhnya ditarik oleh siswa tetapi harus disisakan sebagai saldo rekening siswa sebesar Rp 50.000, 2) ada beberapa sekolah khususnya SMK yang masih menarik iuran sekolah dari siswa penerima dana PIP yang ditentukan setiap bulannya sebesar Rp 50.000 sehingga pada saat dana PIP cair, siswa harus melunasi iuran sekolah bulanan tersebut yang berakibat dana yang dibawa pulang siswa untuk membeli keperluan pendidikan pribadi siswa tidak utuh lagi, 3) PIP telah digunakan untuk membayar keperluan lain-lain. Penyebab-penyebab seperti ini menandakan bahwa bantuan tersebut menjadi kurang efektif untuk biaya pribadi siswa

karena nominalnya menjadi lebih kecil. Untuk lebih jelas terkait dengan jumlah dana PIP yang senyatanya diterima oleh siswa, dapat dilihat pada Grafik 11; yakni di SD menerima Rp 449,138, SMP Rp 750.000, dan SMA/SMK sebesar Rp 994,608.



**Grafik 11: Rerata Jumlah Dana PIP Yang diterima Tahun 2015 (senyatanya)**

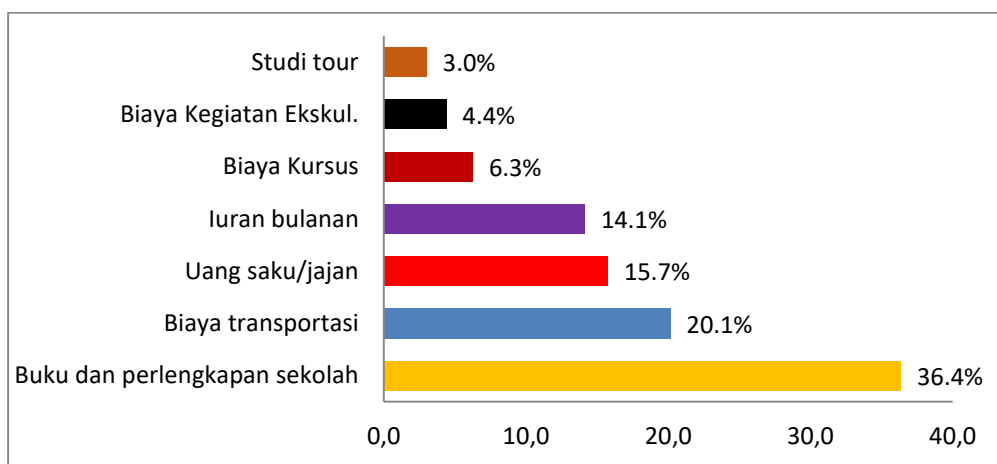
Terkait dengan ketepatan penggunaan dana PIP diukur berdasarkan alokasi penggunaan dana PIP yang diterima siswa. Hasil diskusi kelompok terpumpun dan isian kuesioner siswa menunjukkan bahwa dana PIP pada umumnya telah mereka gunakan untuk dana biaya pribadi siswa, yakni pembelian buku dan alat tulis sekolah; pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); transportasi siswa ke sekolah; uang saku siswa ke sekolah; biaya kursus/les yang tidak diselenggarakan oleh sekolah; membayar iuran bulanan sekolah (SPP). Dalam penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa siswa di setiap jenjang satuan pendidikan memiliki prioritas penggunaan dana bantuan PIP yang tidak selalu sama. Prioritas penggunaan PIP untuk siswa SD sebagian besar digunakan untuk membeli seragam sekolah. Sementara di SMP, prioritasnya untuk biaya transportasi dan membeli alat sekolah, sedangkan di SMA/SMK yang utama digunakan untuk membayar iuran komite/iuran sekolah serta membeli buku pelajaran.



**Grafik 12: Penggunaan Dana PIP Selain Untuk Biaya Pribadi siswa (Responden : Siswa)**

Kajian ini menemukan adanya siswa yang menggunakan dana PIP untuk keperluan di luar biaya pribadi siswa, yaitu untuk membeli bahan pangan (sembako), 32,3% untuk berobat, 12,9% membayar hutang keluarga 3,9 %, 5,6% membeli pulsa. Informasi tersebut memberikan gambaran masih adanya dana yang tidak tepat penggunaannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kendati dana PIP umumnya digunakan sesuai dengan ketentuan, yakni untuk biaya pribadi siswa, namun masih terjadi penggunaan yang menyimpang dari ketentuan.

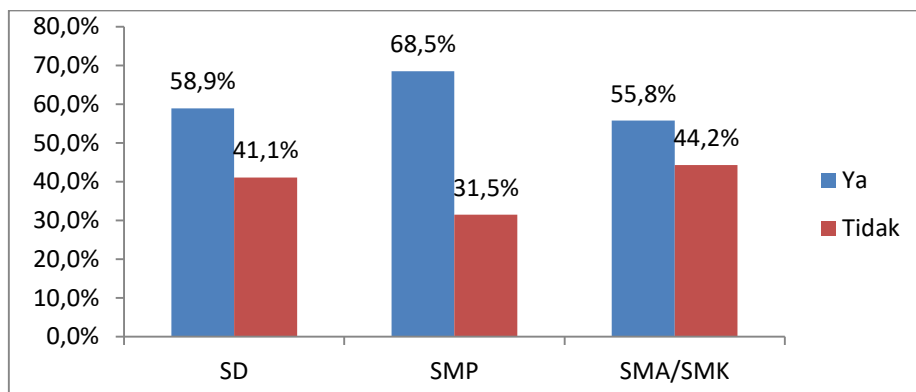
Meski adanya pengakuan siswa yang telah menggunakannya untuk biaya pribadi siswa, namun masing-masing siswa di setiap jenjang satuan pendidikan ternyata memiliki prioritas penggunaan dana tersebut.



**Grafik 13: Urutan prioritas penggunaan dana (Responden Siswa)**

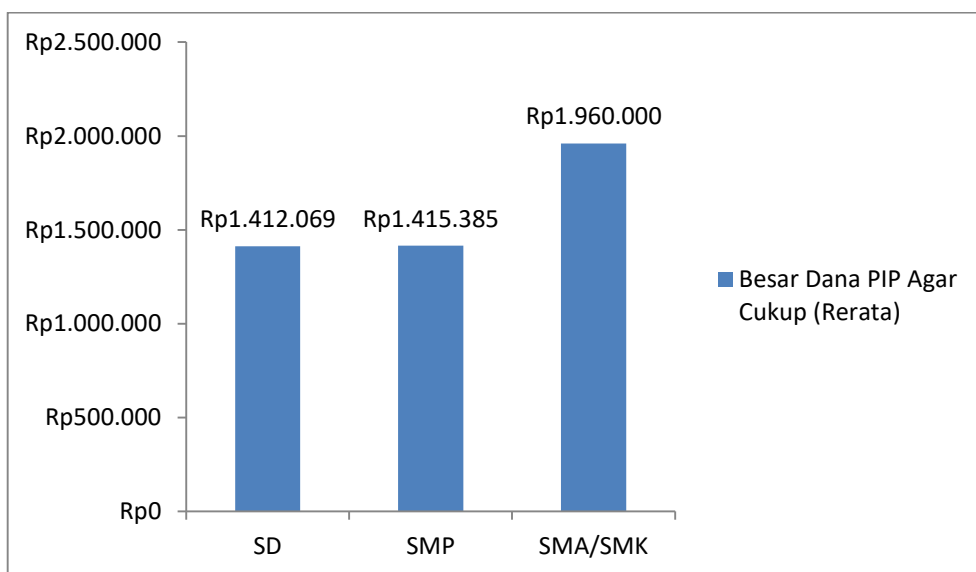
Grafik 13 memperlihatkan prioritas pemanfaatan dana PIP oleh siswa. Pada grafik tersebut nampak bahwa porsi terbesar dana PIP dimanfaatkan untuk membeli buku dan perlengkapan sekolah sebesar 36,4%, baru kemudian untuk biaya transportasi (20,1%), uang saku/jajan 15,7%, iuran bulanan 14,1%, biaya kursus 6,3%, ekskul 4,4%, dan terakhir untuk studi tour 3%. Dari semua pemanfaatan dana PIP tersebut, biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan oleh siswa adalah iuran bulanan. Seperti diketahui bahwa diberikannya bantuan dana PIP pada siswa miskin adalah untuk mengintervensi agar siswa miskin yang tidak dapat membiayai kebutuhan biaya pendidikan pribadi siswa tidak dapat bersekolah hanya karena tidak memiliki uang untuk menutup kebutuhan biaya pendidikan pribadi siswa tersebut. Dengan demikian, seluruh biaya pendidikan di sekolah dalam rangka proses belajar mengajar tidak lagi dibebankan kepada siswa, seperti iuran sekolah yang digunakan untuk membiayai biaya operasional di sekolah. Bila beban biaya iuran sekolah tidak ditanggung siswa maka siswa dapat lebih leluasa mengalokasikan dana PIP untuk membiayai seluruh kebutuhan biaya pendidikan pribadi siswa.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah dana yang diterima oleh siswa tersebut cukup untuk biaya pribadi siswa dapat dijelaskan pada grafik 14. Data yang diperoleh melalui kuesioner menunjukkan dana PIP yang diterima siswa dinilai rata-rata 50% lebih oleh orangtua (SD, SMP dan SMA) mencukupi untuk biaya pribadi siswa, namun sisanya orangtua siswa merasa jumlah tersebut masih kurang (lihat grafik 14).



Grafik 14: Kecukupan Uang PIP Untuk Biaya Pribadi Siswa (Orang Tua)

Berdasarkan grafik 14, tampaknya penilaian orangtua terhadap kecukupan dana PIP tersebut cenderung hampir sama di semua jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA). Orang tua siswa yang anaknya bersekolah di Sekolah dasar (SD) menjawab bahwa uang bantuan yang diberikan sudah cukup untuk biaya pribadi siswa, yaitu 58,9 % dan sisanya 41,1 % menjawab bahwa dana tersebut tidak cukup. Demikian pula orang tua siswa yang anaknya sekolah di tingkat SMP, sebanyak 68,5 % setuju bahwa dana yang diberikan cukup, dan 31,5 % lainnya menjawab bahwa dana yang disalurkan tidak mencukupi untuk kebutuhan pribadi anaknya. Pada orang tua yang anaknya sekolah di tingkat SMA/SMK, sebanyak 55,8 % orang tua siswa menjawab bahwa uang yang disalurkan sudah mencukupi, dan 44,2 % menjawab sebaliknya. Selanjutnya, besaran dana PIP yang diinginkan orang tua untuk biaya pribadi tercermin pada grafik 15.



**Grafik 15: Uang PIP agar Cukup Untuk Biaya Pribadi Siswa (Orang Tua)**

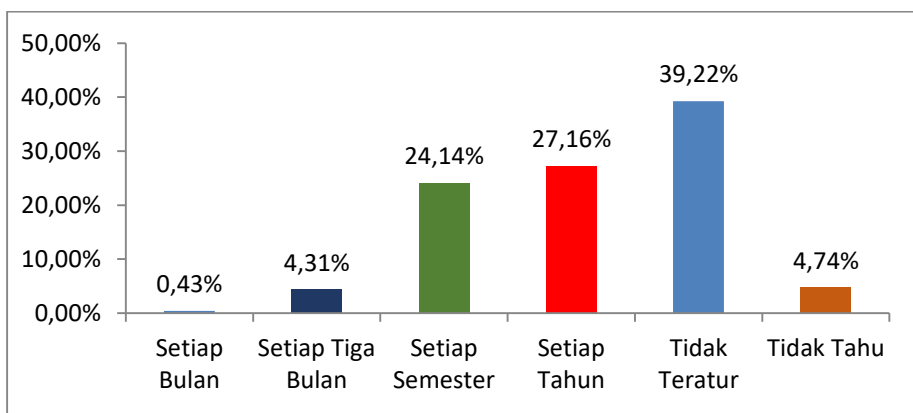
Jika orang tua siswa dimintai informasi untuk menunjukkan seberapa besar uang yang layak diberikan sebagai subsidi, agar bisa menutupi biaya operasional pendidikan siswa selama 1 tahun, maka sebagian besar orang tua yang anaknya sekolah di tingkat SD menjawab bahwa mereka membutuhkan dana rata-rata sebesar Rp 1.412.069. Orang tua yang anaknya sekolah di SMP membutuhkan dana sebesar Rp1.415.385, selanjutnya pada tingkat

SMA/SMK, orang tua membutuhkan dana yang lebih besar, yaitu Rp 1.960.000. Kondisi kebutuhan dana ini cukup wajar dimana tingkat pendidikan yang lebih tinggi membutuhkan biaya yang lebih tinggi pula. Apabila jumlah dana PIP diberikan sejumlah kebutuhan biaya tersebut maka orangtua siswa tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk menutup kebutuhan biaya pendidikan pribadi siswa tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui kuesioner dan diperkuat dengan data melalui DKT diketahui bahwa secara umum pelaksanaan program PIP sudah cukup efektif. Namun, beberapa aspek masih memerlukan perbaikan, terutama terkait dengan aspek teknis dan administratif penentuan kriteria penerima PIP dan mekanisme pembayaran/penyaluran PIP kepada siswa dan orang tua.

#### 4.1.3. Ketepatan Waktu Penerimaan Dana PIP

Hasil analisis data terkait dengan ketepatan waktu penerimaan PIP dapat diukur berdasarkan frekuensi penerimaan atau pencairan dana PIP. Untuk lebih jelas ketepatan waktu penerimaan PIP dapat dilihat melalui Grafik 16.



Grafik 16: Ketepatan waktu penerimaan dana PIP (Resp Siswa)

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan indikasi bahwa pencairan dana PIP sampai ditangan siswa cukup beragam waktunya. Dari pernyataan responden siswa diketahui bahwa penerimaan dana PIP sangat bervariasi dan cenderung tidak teratur. Sebagian besar siswa (39,22%) menyatakan penerimaan dana PIP tidak teratur waktunya, 27,16% menyatakan dana PIP diterima setiap tahun, 24,14% setiap semester, dan lainnya setiap tiga bulan

---

(4,31%), bahkan ada yang diterima per bulan. Berdasarkan hasil diskusi dengan siswa, kepala sekolah, guru, dan pihak bank penyalur diperoleh masukan bahwa ada beberapa sebab ketidaktepatan penyaluran dana PIP kepada siswa, yaitu antara lain pihak Direktorat menyalurkan dana secara bertahap. Tahap pertama, dana yang disalurkan adalah dana untuk usulan siswa yang memiliki KPS, baru kemudian dana untuk usulan siswa dengan surat keterangan miskin. Selisih waktu penyaluran bisa bervariasi ada yang satu bulan, tiga bulan, satu semester, bahkan 1 tahun sehingga sering terjadi dana turun setelah siswa lulus.

Selain itu juga keberagaman frekuensi dan waktu penerimaan dana ini bisa terjadi karena penyaluran/pengiriman dana PIP dari pusat ke Bank yang ditunjuk memang terjadi keterlambatan realisasi, sehingga dana sampai di tangan siswa juga menjadi terhambat. Bisa juga penyaluran dari Pusat tepat, namun informasi sampai di siswa atau sekolah terlambat, selain itu keterlambatan bisa terjadi karena ada pengaturan yang dikoordinir oleh sekolah/komite sekolah untuk mengatur pencairan dan pemanfaatan dana menurut kebutuhan/ kondisi lingkungan setempat. Persoalan pencairan dana menjadi lebih rumit bagi sekolah dan penerima jika dana PIP tersebut baru dapat diterima (cair) pada akhir tahun pelajaran sekolah. Hasil DKT menginformasikan bahwa di banyak daerah seringkali terjadi waktu penerimaan/pencairan dana terjadi pada akhir tahun ajaran sehingga kurang dapat dimanfaatkan. Fakta ini ditemukan di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu dan Metro, Bandar Lampung. Banyak siswa yang telah lulus dan sulit ditemukan lagi sehingga menyulitkan pertanggungjawaban administrasi. Akibatnya, di satu sisi dana PIP kurang efisien karena sejak awal tidak dapat digunakan untuk memenuhi biaya pribadi dalam kegiatan pembelajaran (biaya transport, alat belajar, uang saku dsb), sedangkan di sisi yang lain dana tersebut menjadi mubazir karena tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi oleh siswa kelas VI, IX, dan XII yang telah lulus atau tidak dapat ditemukan lagi oleh sekolah karena sudah berada di luar kota untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, atau pindah.

## **4.2 Dampak Program PIP**

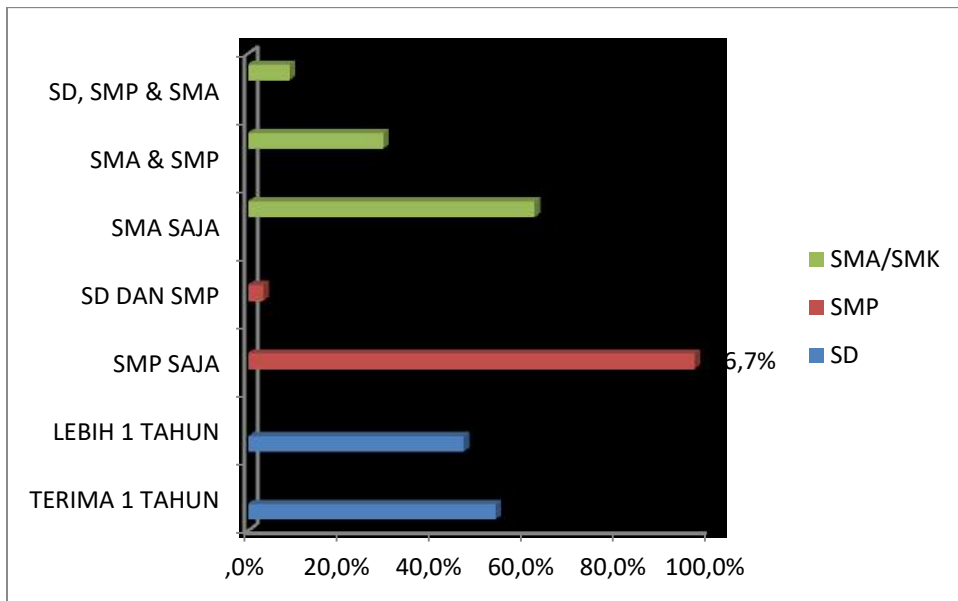
Terkait dengan dampak program PIP, hasil analisis data kajian PIP difokuskan pada (1) prestasi belajar siswa, dan (2) disiplin dan motivasi belajar siswa.

---

Kendati dalam proses pelaksanaan program PIP ditemukan beberapa aspek yang belum efektif, namun secara umum ditunjukkan bahwa program PIP ternyata mengindikasikan hasil yang positif terhadap siswa untuk tetap bertahan belajar di sekolah, memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, meningkatnya prestasi belajar siswa, dan meningkatnya disiplin dan motivasi belajar siswa, baik di rumah maupun sekolah. Kajian ini juga mencermati ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan terkait dampak yang belum tercapai secara optimal seperti dijelaskan berikut ini.

#### **4.2.1 Keberlanjutan Melanjutkan ke Jenjang Lebih Tinggi**

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar ini merupakan kelanjutan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan siswa/warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar (PKBM)/lembaga Kursus dan pelatihan hingga anak usia sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, anak-anak yang berada di panti asuhan dan anak-anak disabel dari rumah tangga/keluarga dengan status ekonomi terendah secara nasional yaitu 15,5 juta Rumah Tangga. Dengan besarnya sasaran PIP 2015 yang mencapai 20,3 juta anak/siswa usia sekolah baik di sekolah/lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (17,9 juta anak/siswa) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan yang lebih baik. Kajian ini ingin mengetahui sejauh mana PIP mendukung pendidikan para siswa miskin penerimanya secara berkesinambungan. Dalam kaitan ini, hal utama yang penting untuk dilihat adalah keberlanjutan penerimaan PIP oleh siswa miskin pada setiap jenjang. Hal ini dilakukan dengan menghitung berapa proporsi siswa penerima PIP saat ini yang secara berkesinambungan memperoleh bantuan. Kesinambungannya dapat secara konsisten dilihat dari pertanyaan yang diberikan pada siswa di kelas berapa dan satuan pendidikan apa saja mereka menerima bantuan siswa miskin dari Pemerintah (lihat Grafik 17).



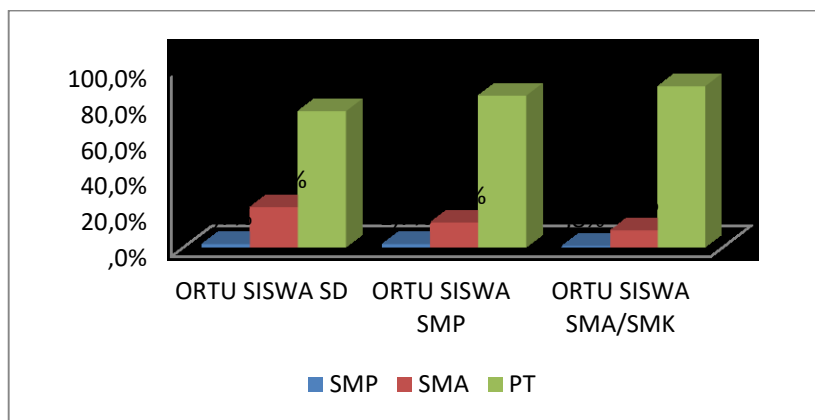
**Grafik 17: Kesiambungan Penerimaan PIP antar Jenjang Pendidikan (Siswa)**

Untuk melihat kecenderungan keberlanjutan pemberian PIP pada satuan pendidikan SD, terlihat bahwa terdapat tren kenaikan jumlah penerima PIP di setiap jenjang kelas SD. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki perhatian untuk memberi bantuan pada siswa miskin agar bisa menyelesaikan pendidikan dasar 6 tahun. Apabila keberlangsungan pemberian PIP dilihat di setiap jenjang kelas, terlihat bahwa rerata persentase jumlah siswa SD yang menerima rutin PIP di setiap jenjang kelas tampaknya masih relatif rendah (lihat Grafik 17). Keadaan ini menunjukkan akan pentingnya pemberian PIP secara rutin untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Pada grafik 17 terlihat bahwa pada jenjang SD, keberlanjutan penerimaan PIP dialami oleh hampir separuh jumlah siswa penerima PIP. Hal ini menunjukkan bahwa, siswa penerima PIP telah mendapatkan bantuan sejak kelas-kelas sebelumnya. Sementara itu, pada level SMP, keberlanjutan penerimaan PIP sebanyak 3,3% siswa SMP penerima mengaku memperoleh bantuan sejak duduk di bangku SD. Sedangkan pada jenjang SMA, terdapat sekitar 8,8% siswa yang secara konsisten memperoleh bantuan sejak jenjang SD. Tingkat keberlanjutan terlihat lebih tinggi, yaitu 29,2%, jika penerimaan PIP dihitung sejak siswa SMA yang ada saat ini duduk di bangku SMP.

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan ada kesinambungan penerimaan bantuan dana PIP oleh para siswa miskin antar jenjang pendidikan. Permasalahan yang ada terkait dengan kesinambungan pemberian dana PIP ini dikarenakan ada beberapa alasan yaitu, diantaranya ekonomi keluarga yang sudah semakin membaik sehingga anak tidak berada di garis kemiskinan lagi dan tidak sesuai lagi bila masih diberi bantuan dana PIP.

Sejalan dengan keberlanjutan pendidikan siswa maka persepsi orang tua dan siswa terkait dengan dampak program PIP terhadap keberlanjutan pendidikan diukur melalui keberlangsungan pendidikan, yang dapat dilihat pada Grafik 18.



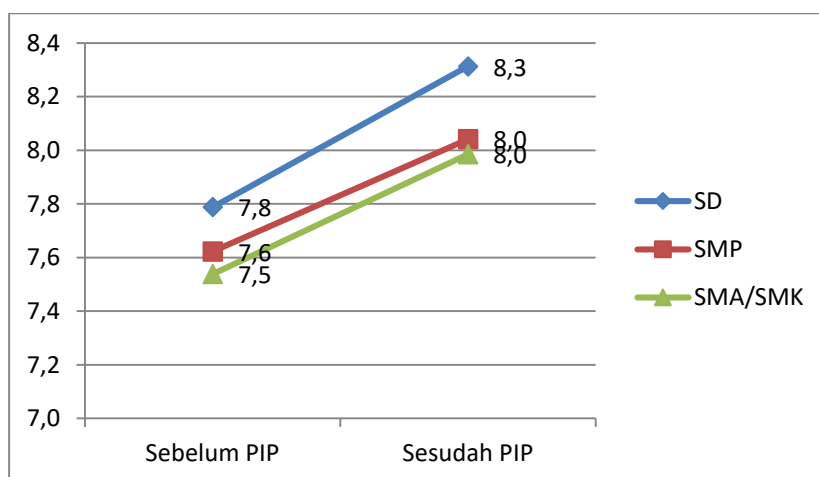
**Grafik 18: Keberlanjutan Pendidikan Siswa Yang Diinginkan Orang Tua (Responden Orang Tua)**

Jika dana PIP dapat berlanjut dan berkesinambungan pada tiap jenjangnya, maka sebagian besar orang tua meyakini bahwa mereka dapat menyekolahkan anaknya bahkan sampai ke perguruan tinggi. Namun ada orang tua miskin yang sangat bergantung pada dana bantuan seperti PIP ini. Hal ini berarti bahwa kemungkinan mereka tidak dapat menjamin keberlangsungan sekolah anak mereka seandainya bantuan tidak diberikan. Jika dilihat dari grafik 18, jumlah persentasenya memang tidak besar, yaitu 9-15%, namun ada peluang untuk menjadi putus sekolah sehingga sangat diperlukan adanya komitmen dari Pemerintah untuk tetap memberikan bantuan dana PIP untuk keberlangsungan pendidikan. Proposi terbesar untuk menjadi

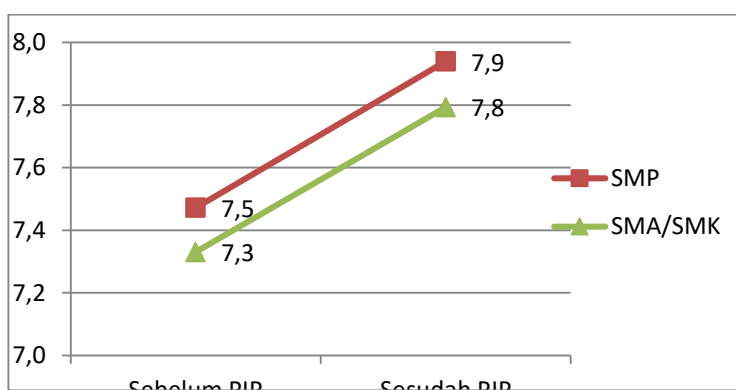
peluang putus sekolah adalah pada jenjang SMP dan SMA, bila tidak terjaring dalam program PIP.

#### 4.2.2 Prestasi Siswa

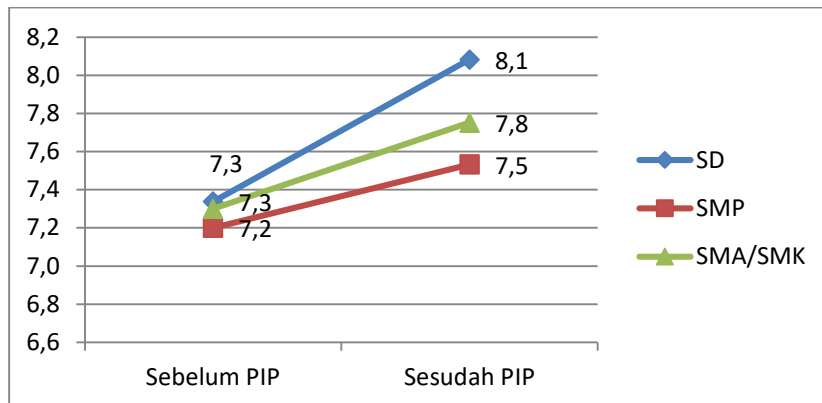
Hasil Analisis berikutnya yaitu berhubungan dengan dampak program PIP terhadap hasil prestasi siswa. Dampak program PIP terhadap prestasi siswa diukur berdasarkan nilai mata pelajaran sebelum dan setelah menerima PIP di setiap jenjang satuan pendidikan (lihat grafik berikut)



Grafik 19: Nilai Rapor Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sebelum dan Setelah PIP (Siswa)



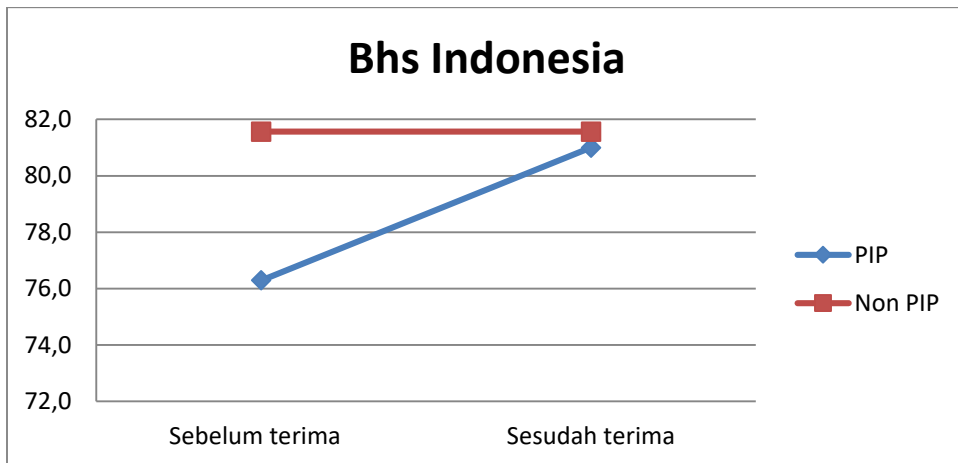
Grafik 20: Nilai Rapor Mata Pelajaran Bahasa Inggris Sebelum dan Setelah PIP (Siswa)



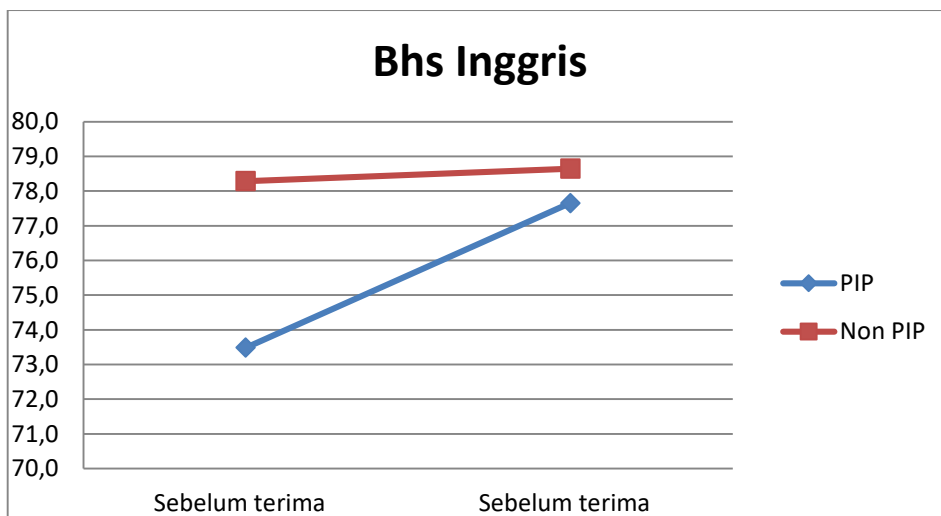
**Grafik 21: Nilai Rapor Mata Pelajaran Matematika Sebelum dan Setelah PIP (Siswa)**

Bila kita cermati lebih lanjut tampak bahwa PIP berperan dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran yang di-UN/USBN-kan baik di SD, SMP maupun SMA, dengan angka yang cukup berarti. Peningkatan nilai Bahasa Indonesia di SD sebesar 0.5, SMP meningkat sebesar 0.4 dan SMA meningkat sebesar 0.5. Demikian pula pada mata pelajaran matematika juga terjadi peningkatan di semua jenjang pendidikan yakni SD meningkat sebesar 0.4, SMP meningkat sebesar 0.5 dan SMA meningkat sebesar 0.2. Untuk mata pelajaran B. Inggris di SMP meningkat sebesar 0.5 dan SMA meningkat sebesar 0.3. Temuan ini mengindikasikan bahwa PIP berperan penting dalam meningkatkan prestasi akademik siswa, terutama menyiapkan siswa dalam menghadapi UN; serta diketahui bahwa siswa penerima PIP umumnya tergolong siswa yang cukup berprestasi karena memiliki nilai B. Indonesia, Matematika dan B. Inggris yang cukup tinggi (antara >7.00 sampai dengan > 8.00).

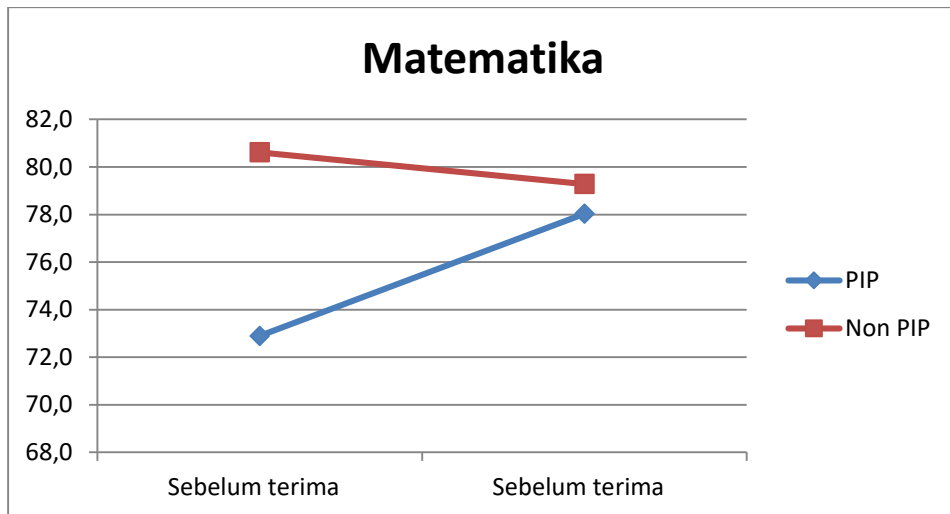
Indikasi kecenderungan peningkatan prestasi tersebut juga diperkuat dengan hasil perbandingan dari nilai rapor siswa peneriman dan bukan penerima PIP seperti tampak pada grafik berikut.



**Grafik 22: Nilai Rapor Mata Pelajaran Bahasa Indonesia  
Sebelum dan Setelah PIP (Resp. Siswa)**



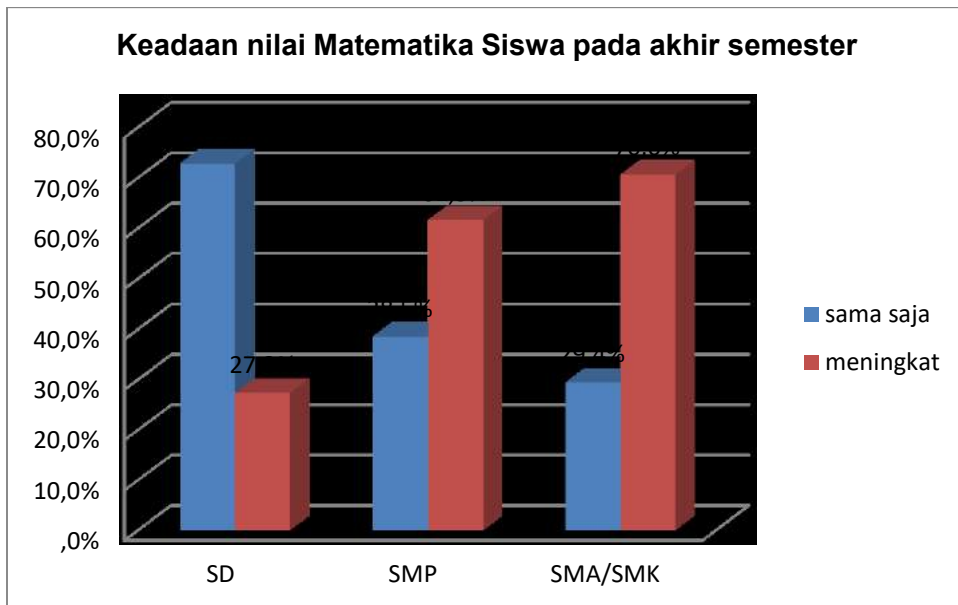
**Grafik 23: Nilai Rapor Mata Pelajaran Bahasa Inggris  
Sebelum dan Setelah PIP (Resp Siswa)**



**Grafik 24: Nilai Rapor Mata Pelajaran Matematika Sebelum dan Setelah PIP (Resp. Siswa)**

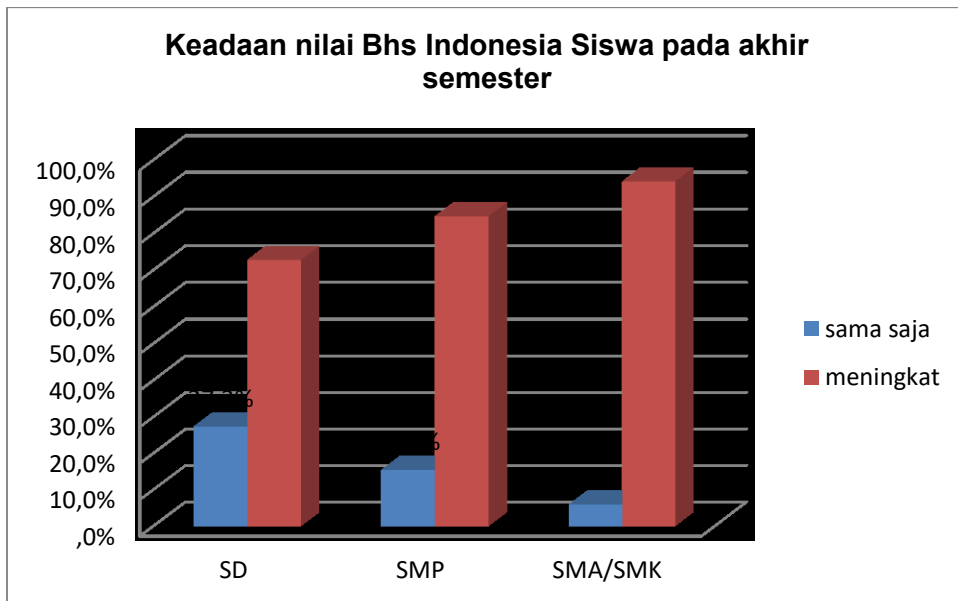
Hasil analisis data nilai mapel yang di UN/USBK sebelum dan setelah menerima PIP. dari siswa penerima dan bukan penerima PIP tampaknya ada kecenderungan peningkatan. Hal ini menjadikan PIP sangat bermanfaat dan juga berperan dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran yang di-UN/USBK-kan, dengan angka yang cukup berarti. Peningkatan nilai Bahasa Indonesia siswa penerima PIP sebesar 5,0 yaitu dari 76,0 menjadi 81,0. Sedangkan prestasi bagi siswa bukan penerima PIP cenderung tidak meningkat (tetap) di angka 82,0 bahkan terjadi sedikit penurunan yaitu sebesar 0,1. Demikian pula pada mata pelajaran Bahasa Inggris juga cenderung meningkat yakni meningkat sebesar 4,0, yaitu dari 73,0 menjadi 77,0. Untuk mata pelajaran Matematika cenderung meningkat juga sebesar 5,0 dari 73,0 menjadi 78,0.

Selain dari responden siswa, indikasi adanya peningkatan prestasi siswa setelah menerima dana bantuan PIP juga diperkuat dari responden guru, seperti yang terlihat pada grafik berikut.



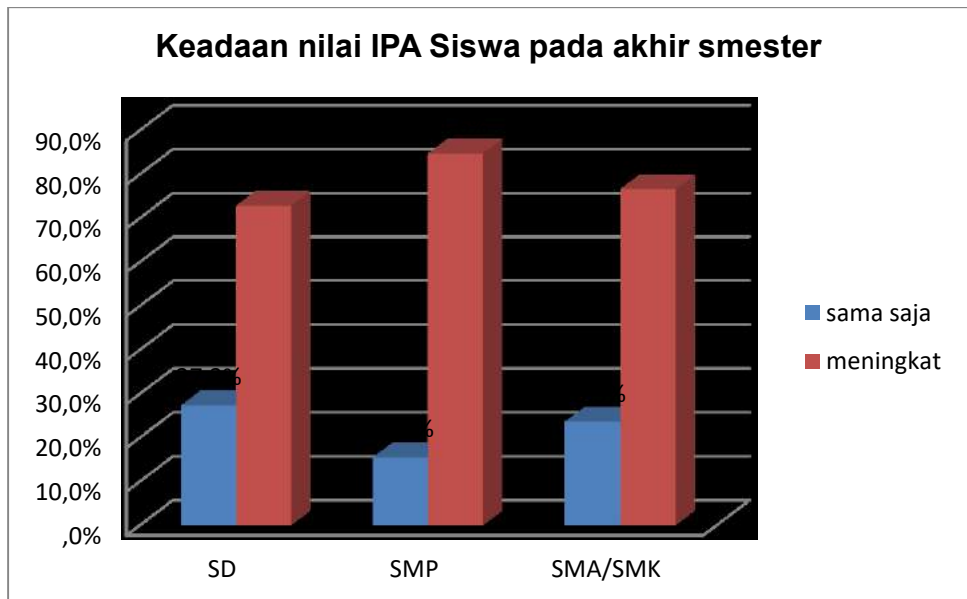
**Grafik 25: Peningkatan Hasil Belajar untuk Nilai Matematika Setelah Menerima PIP (Resp Guru)**

Hasil analisis dari responden guru tentang hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menerima bantuan dana PIP akan dijelaskan berikut. Peningkatan hasil belajar pada siswa SD, menurut para guru kelas, menunjukkan hasil yang bervariasi. 72.7% guru menyatakan bahwa prestasi siswa pada pelajaran matematika sama saja sebelum menerima PIP dengan sesudah menerima PIP. Sedangkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA terjadi peningkatan setelah siswa menerima PIP. (lihat Grafik 25-27). Pada jenjang SMP, 61.5% guru menyatakan terjadi peningkatan pada mata pelajaran matematika setelah siswa menerima PIP dan sebanyak 84.6% menyatakan terjadi peningkatan pada pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia setelah siswa menerima PIP (lihat Grafik 25-27).



**Grafik 26: Peningkatan Hasil Belajar Siswa untuk Nilai B.Indonesia Setelah Menerima PIP (Guru)**

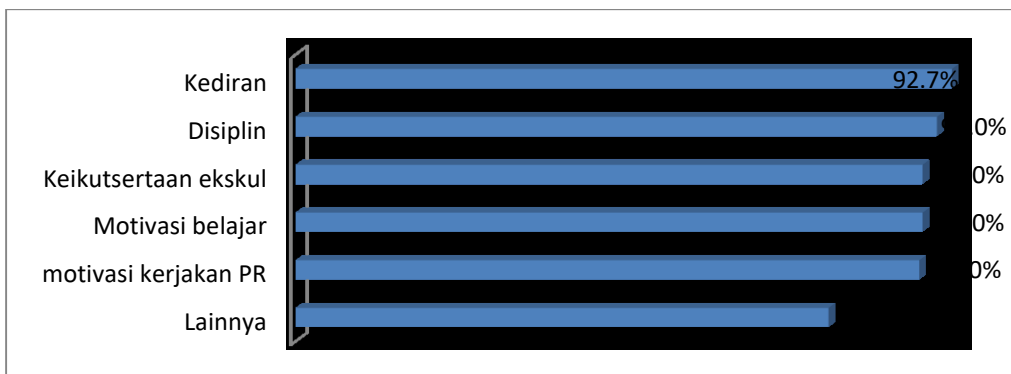
Lebih lanjut, peningkatan hasil belajar juga terjadi pada prestasi siswa SMA. Sebagian besar guru menyatakan bahwa setelah menerima PIP, terjadi peningkatan pada nilai mata pelajaran matematika, Bahasa Indonesia dan IPA (lihat Grafik 25-27).



**Grafik 27: Peningkatan Hasil Belajar Siswa untuk Nilai IPA  
Setelah Menerima PIP (Guru)**

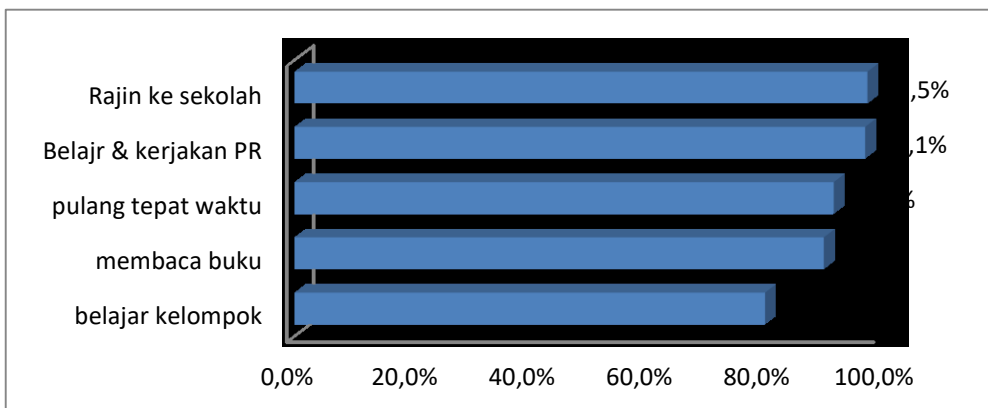
#### **4.2.3 Peningkatan Displin dan Motivasi Belajar Siswa**

Dampak PIP berikutnya diukur dengan pengaruhnya pada peningkatan disiplin dan motivasi siswa. Hasil analisis melalui kuesioner kepala sekolah, menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa mengalami perkembangan yang cukup signifikan (lihat Grafik 25). Temuan penelitian menunjukkan kepala sekolah memberikan penilaian terkait kondisi kedisiplinan siswanya setelah menerima bantuan. Persentase terbesar terlihat pada peningkatan kehadiran siswa di sekolah dan di kelas yaitu mencapai angka 92,7%, peningkatan pada disiplin siswa (91.0%), peningkatan keikutsertaan ekstrakurikuler (90.0%), peningkatan pada motivasi belajar (90.0%), dan peningkatan pada motivasi mengerjakan PR (89%). Secara umum, berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa PIP dapat meningkatkan disiplin dan motivasi belajar siswa, baik di sekolah maupun di rumah. Dampak positif PIP ini terjadi tidak terlepas dari bimbingan dan pembinaan khusus dari sekolah terhadap siswa penerima PIP agar lebih disiplin belajar.



**Grafik 28: Peningkatan Hasil Belajar Disiplin dan Motivasi Belajar Siswa (Responden Kepala Sekolah)**

Selanjutnya, dampak program PIP juga dapat diukur pada peningkatan ketertiban dan keteraturan siswa. Temuan penelitian menunjukkan orang tua siswa juga memberikan penilaian terkait kondisi kedisiplinan anaknya setelah menerima bantuan. Mendukung jawaban dan pernyataan dari kepala sekolah, orang tua menilai peningkatan disiplin dan motivasi anaknya setelah menerima PIP. Persentase terbesar terlihat pada peningkatan motivasi anak untuk berangkat ke sekolah (97.5%), dan belajar serta mengerjakan PR di rumah (97,1%). Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala sekolah yang juga menyatakan bahwa terjadi peningkatan motivasi siswa nya untuk hadir di sekolah dan di kelas dan rajin belajar baik di sekolah maupun di rumah (lihat Grafik 26).



**Grafik 29: Peningkatan Disiplin dan Motivasi Belajar Siswa (Orangtua)**

---

Tidak berbeda dengan responden kepala sekolah dan orang tua, hampir seluruh guru menyatakan terjadi peningkatan pada keinginan dan motivasi siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler, motivasi belajar, kedisiplinan, kehadiran di kelas setelah siswa tersebut menerima dana PIP. Berdasarkan data yang diperoleh dari para guru, diketahui bahwa terjadi peningkatan terbesar pada kehadiran siswa di kelas (92.7%), peningkatan membaca buku setelah menerima PIP (84.5%), motivasi dalam mengerjakan PR dan (92.7%), kegiatan dalam belajar kelompok (82.2%), dan pada prestasi siswa dan minat siswa dalam mengikuti kegiatan lainnya /belajar dengan teratur (83.8,0%). Berdasarkan temuan ini, mempertegas pendapat para pemangku kepentingan, yaitu siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah bahwa PIP berdampak pada peningkatan disiplin dan motivasi belajar siswa. Dampak positif PIP tsb terjadi tampaknya dikarenakan ada pembinaan dari sekolah terhadap siswa penerima PIP agar lebih disiplin belajar.

---

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Kajian ini bertujuan mengukur tingkat keefektifan program PIP yang diukur dari aspek keefektifan pelaksanaan program PIP dan dampaknya. Berdasarkan temuan hasil analisis data primer melalui Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dan pengisian kuesioner, berikut beberapa hal yang dapat diuraikan terkait dengan keefektifan pelaksanaan program PIP.

##### 5.1.1 Ketepatan Sasaran

###### 1. Ketepatan Persyaratan Penerima

- a. Persyaratan penerima PIP yang ditentukan oleh pemerintah baik secara administratif maupun substantif tampaknya telah secara efektif ditaati oleh dinas pendidikan dan juga kepala sekolah di lapangan. Hal ini terlihat dari sasaran penerima PIP yang secara administratif telah dipenuhi, yakni sekolah melalui dinas mengusulkan penerima PIP berasal dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP dengan cara sekolah mengentry (*updating*) data siswa (nomor KPS/KKS/KIP) calon penerima PIP dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP ke dalam aplikasi Dapodik. Data tersebut sebagai data usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke dinas pendidikan kab/kota dan direktorat teknis.
- b. Lebih dari separuh orangtua siswa penerima PIP di lokasi studi memiliki KPS/KKS. Untuk siswa SD dan SMP jumlah pemilik KPS/KKS sudah lebih dari 80%. Kondisi yang hampir sama terjadi pada jenjang SMA/SMK, juga mencapai lebih dari separuhnya (64,3%) orangtua siswa yang memiliki KPS/KKS). Indikasi ini menunjukkan bahwa sekolah sudah menyangandarkan diri pada persyaratan kepemilikan KPS/KKS dalam menentukan siswa penerima PIP. Secara substantif para penerima PIP terbukti berasal dari keluarga miskin berpendapatan rendah, berpendidikan rendah,

---

bekerja sebagai buruh, tani dan nelayan, dan sebagian memiliki bukti KPS dan SKM.

- c. Terdapat penyimpangan dalam penentuan persyaratan kepemilikan KPS/KKS atau SKM bagi siswa miskin, yakni belum sepenuhnya akurat menunjukkan sasaran maupun cakupan keluarga miskin di satu lingkungan/wilayah tertentu. Hal ini terindikasi pada adanya siswa mampu secara sosial-ekonomi, misalnya anak karyawan atau anak guru yang masih mendapatkan PIP. Selain itu adanya keluarga pada suatu wilayah yang memiliki kondisi yang lebih buruk dibandingkan pemegang KPS/KKS, keluarga-keluarga tsb terlewat dari pencacahan yang dilakukan oleh aparat setempat sehingga tidak terdaftar dan tidak dapat memiliki KPS/KKS. Pendataan rumah tangga miskin oleh pemerintah (melalui KPS/KKS) dinilai kurang akurat dan belum mencakup seluruh rumah tangga miskin. Sebagai contoh terjadi di kab Kolaka ada sekolah yang memiliki puluhan siswa miskin, tapi hanya ditemukan beberapa orang saja sebagai pemegang KPS/KKS. Kesenjangan antara banyaknya siswa yang miskin dengan sedikitnya pemegang KPS/KKS tersebut terjadi di beberapa kabupaten kota. Rendahnya tingkat akurasi pendataan KPS/KKS membuat sekolah merasa kurang puas dengan mengandalkan kepemilikan KPS/KKS sebagai syarat.
- d. Selain faktor kemiskinan, ada dua hal yang menjadi prioritas yang ditekankan oleh sekolah/pemerintah dalam menyeleksi siswa calon penerima PIP. Prioritas pertama adalah melihat kondisi latar belakang sosial ekonomi keluarga dan prioritas kedua adalah melihat kondisi personal siswa. Dari sisi latar belakang sosial ekonomi keluarga, hampir semua sekolah (90,2%) memberi prioritas kepada siswa miskin/rentan miskin dan terancam putus sekolah. Pada dasarnya, ancaman putus sekolah bisa disebabkan oleh banyak hal seperti ekonomi keluarga, kedisiplinan, ataupun prestasi siswa itu sendiri. Karena PIP juga berorientasi pada pengurangan angka putus sekolah, ancaman putus sekolah dengan alasan apapun menjadi perhatian yang serius. Sedangkan kriteria yang termasuk siswa yatim piatu (87,8%). Hal ini dianggap rasional karena beban ekonomi akan menjadi lebih berat ketika aset (dalam hal ini penopang ekonomi rumah tangga)

---

berkurang/tidak ada. Kondisi-kondisi keluarga yang lain, yaitu orangtua yang terkena PHK atau keluarga tertimpa musibah menjadi prioritas yang lebih rendah karena situasi tersebut bersifat sementara. Tidak lebih dari 70% (68,3%) sekolah yang memberi prioritas pada kedua kondisi tersebut. Di sisi yang lain, untuk aspek kondisi personal siswa, sekolah-sekolah memberi prioritas pada siswa yang berasal dari rumah tangga sebagai peserta program PKH (82,9%) dan siswa dengan pertimbangan khusus dan siswa/anak berusia 6-21 th yang tidak bersekolah (61%). Khusus untuk kelompok siswa SMK yang menempuh studi keahlian jumlahnya tidak lebih dari 15 % yaitu 14,6% saja. Kondisi ini sangat jarang dan hanya terjadi pada siswa SMK yang menempuh studi keahlian tertentu.

- e. Pekerjaan orangtua siswa penerima bantuan dana PIP secara berurutan yaitu orangtua (ibu) sebesar 40,2% tidak bekerja dan ayah yang bekerja sebagai buruh (53,1%). Selanjutnya dari jenis pekerjaan, ibu yang bekerja sebagai buruh (27,1%), sebagai petani (18,3%) dan pekerjaan ayah adalah petani (20,2%) yang disusul sebagai wiraswasta (7,5%). Berdasarkan data yang ada, didapatkan bahwa tidak lebih dari 2% orangtua, baik ayah maupun ibu, yang pernah duduk di bangku pendidikan tinggi. Dan hampir separuh orangtua hanya dapat menamatkan bangku sekolah dasar. Bahkan, hasil analisis menunjuk beberapa orangtua ada yang sama sekali tidak pernah bersekolah. Rendahnya tingkat pendidikan keluarga ini “melegitimasi/menguatkan” kondisi kemiskinan para siswa penerima PIP. Dari hasil analisis terkait dengan aspek ketepatan pemenuhan persyaratan penerima PIP, dapat dikatakan bahwa secara umum ketepatan persyaratan PIP sudah cukup terpenuhi meskipun masih terdapat hal-hal teknis dan administratif yang perlu untuk segera diperbaiki.

## **2. Ketepatan Cakupan Jumlah Penerima**

Terkait dengan ketepatan jumlah penerima, hasil di lapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara jumlah siswa miskin yang diusulkan dari tingkat sekolah ke dinas pendidikan kab/kota dan direktorat teknis dengan siswa penerima PIP. Hal ini juga tercermin dengan ketidak akuratan data Dapodik. Realisasi rata-rata dari jumlah

---

siswa yang diterima bervariasi, misalnya yaitu jumlah usulan 50 siswa dan yang direalisasikan hanya 23 siswa (46%), atau jumlah usulan 75 siswa dan yang terealisasi hanya 6 siswa (8%). Kondisi ini juga mengindikasikan belum sepenuhnya siswa miskin di sekolah terjangkau oleh program PIP. Data jumlah siswa penerima yang turun dari Direktorat secara umum selalu lebih kecil dari yang diusulkan. Terkait dengan pengusulan bagi siswa non KPS/KIP, khususnya yang terjadi di kab Kolaka yaitu di SMK dengan usulan 200 siswa yang dapat hanya 91 siswa, Namun di SD semua siswa yang punya KIP yang dibagikan oleh kecamatan memperoleh dana PIP dan untuk siswa tidak mampu yang tidak punya KPS sebanyak 30 orang yang menerima tahap 1 baru 8 orang. Berbeda dengan di SMA, tanpa adanya usulan dari SMA yang bersangkutan, 75% siswa sekolah ini menerima dana PIP (di atas 200 siswa). Khusus siswa SMP Terbuka belum ada yang menerima dana PIP karena siswa tidak mengumpulkan KPS/KIP. Sementara itu, SMP reguler mengusulkan sebanyak 140 siswa non KPS untuk memperoleh dana PIP (Pengusulan non KPS) yang melengkapi usulan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

### **3. Ketepatan Jumlah Dana PIP Yang Diterima**

Sebagian besar siswa miskin telah menerima PIP sesuai ketentuan, namun masih terdapat indikasi masih adanya siswa yang tidak menerima PIP dengan jumlah nominal yang utuh dan efektif untuk pembiayaan pribadi siswa. Masalah diduga karena: 1) Dana PIP harus disisakan saldonya, tidak bisa diambil semua; 2) PIP digunakan untuk membayar keperluan kegiatan sekolah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih ada beberapa siswa yang tidak menerima dana PIP sesuai dengan jumlah dana yang seharusnya diterima, sehingga dana tersebut relatif belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa secara efektif. Berkenaan dengan proses pencairan dana PIP dari Bank, baik pihak bank yang diwakili oleh BRI serta kepala sekolah, mereka sepakat bahwa pencairan dana PIP dilakukan secara kolektif dan dikoordinasikan oleh sekolah. Alasan dari pihak BRI dengan cara kolektif siswa tidak harus mengantri terlalu lama dan dalam pencairan dana tersebut siswa harus didampingi oleh orang tua. Konsekuensinya dana PIP berkurang untuk biaya transportasi. Dari pihak sekolah beralasan dengan pencairan secara individual siswa harus kehilangan waktu kegiatan belajarnya.

---

Berdasarkan pada informasi dari pihak BRI mulai pengambilan pada tahun 2016 ini Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan surat edaran bahwa pencairan dana PIP dilakukan secara kolektif yang dikoordinasikan oleh sekolah.

### **5.1.2. Ketepatan Waktu Menerima Dana PIP**

Waktu penerimaan dana PIP sangat bervariasi dan cenderung tidak teratur. Hasil DKT menyimpulkan bahwa beberapa siswa mengatakan menerima PIP sekali dalam setahun, sebagian yang lain setiap semester, tidak teratur dan ada juga yang menerimanya setiap bulan. Ketidakteraturan ini diindikasikan oleh adanya masalah pembayaran PIP kepada siswa, seperti pembayaran di akhir tahun pelajaran ketika siswa sudah tidak lagi aktif di sekolah. Bahkan menjadi mubazir karena tidak dapat diambil lagi oleh siswa kelas VI, IX, dan XII yang telah lulus dan tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya. Kondisi ini menyebabkan dana PIP tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksinkronan siklus anggaran dengan siklus tahun ajaran/akademik sehingga berdampak pada masalah penyerapan dan pertanggung-jawaban administrasi PIP.

### **5.1.3. Ketepatan Penggunaan Dana**

PIP umumnya telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa, namun masih ditemukan penyimpangan dalam penggunaan dana PIP sesuai ketentuan oleh siswa dan orang tua, yaitu siswa menggunakan PIP untuk membeli bahan pangan (sembako), bahkan secara jujur dikatakan oleh orang tua siswa dana tersebut kadang digunakan membayar hutang keluarga, dan siswa juga menggunakannya untuk membeli pulsa. Selain itu juga kebanyakan siswa SMA/SMK penerima dana PIP menunggak kewajiban membayar uang sekolah antara 5 sampai dengan 7 bulan. Sehingga ketika dana PIP diterima oleh siswa dana PIP tidak tersisa karena sudah dibayarkan tunggakan uang sekolah. Meskipun siswa tidak membayar iuran sekolah, namun untuk menjamin kebermanfaatan penggunaan dana PIP, sekolah mewajibkan menyimpan dana PIP yang diterima siswa pada tabungan sekolah. Setiap ada kebutuhan siswa boleh mengambil tabungan tersebut, dengan persetujuan pihak sekolah.

---

#### **5.1.4. Dampak PIP**

##### **1. Keberlanjutan Pendidikan Siswa**

BSM/PIP dinilai berperan penting dalam memberikan motivasi dan menjamin keberlangsungan pendidikan siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada jenjang SD, keberlanjutan penerimaan PIP dialami oleh hampir separuh jumlah siswa penerima PIP. Hal ini menunjukkan bahwa, siswa penerima PIP telah mendapatkan bantuan sejak kelas-kelas sebelumnya. Sementara itu, pada level SMP, keberlanjutan penerimaan PIP sebanyak 0,9% siswa SMP penerima mengaku memperoleh bantuan sejak duduk di bangku SD. Sedangkan pada jenjang SMA, terdapat sekitar 4,3% siswa yang secara konsisten memperoleh bantuan sejak jenjang SD. Tingkat keberlanjutan terlihat lebih tinggi, yaitu 14,2%, jika penerimaan PIP dihitung sejak siswa SMA yang ada saat ini duduk di bangku SMP. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan ada kesinambungan penerimaan bantuan dana PIP oleh para siswa miskin antar jenjang pendidikan. Ini juga tercermin dari harapan orang tua dan pihak sekolah (guru dan kepek) yang tinggi terhadap kehadiran BSM/PIP guna keberlangsungan pendidikan siswa. Bahkan orangtua menjamin jika pada jenjang selanjutnya tetap diberikan BSM/PIP, maka hampir semua orangtua akan menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang tertinggi.

##### **2. Prestasi Siswa**

PIP bermanfaat dan berperan dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada semua jenjang pendidikan, terutama terkait langsung dengan nilai mata pelajaran yang di-UN/USBN-kan. Terjadi kecendrungan rerata peningkatan nilai bahasa Indonesia siswa SD, SMP maupun SMA setelah memperoleh dana PIP yakni berturut-turut adalah untuk jenjang SD sebesar 0.5, SMP meningkat sebesar 0.4 dan SMA meningkat sebesar 0.5. Demikian pula pada mata pelajaran matematika juga cenderung terjadi peningkatan di semua jenjang pendidikan yakni SD meningkat sebesar 0.4, SMP meningkat sebesar 0.5 dan SMA meningkat sebesar 0.2. Untuk mata pelajaran B. Inggris di SD meningkat sebesar 0.8, SMP meningkat sebesar 0.5 dan SMA meningkat sebesar 0.3. Temuan ini mengindikasikan bahwa PIP cukup berperan penting dalam meningkatkan prestasi akademik siswa,

---

terutama menyiapkan siswa dalam menghadapi UN; serta diketahui bahwa siswa penerima PIP umumnya tergolong siswa yang cukup berprestasi karena memiliki nilai B. Indonesia, Matematika dan B. Inggris yang cukup tinggi (antara >7.00 sampai dengan > 8.00). Hal ini mengindikasikan bahwa PIP tidak hanya mampu mempertahankan hasil belajar yang baik, melainkan juga mampu meningkatkan prestasi akademik siswa serta mendorong siswa untuk lebih siap menghadapi UN/USBN.

### **3. Dampak PIP terhadap Kedisiplinan dan Motivasi Belajar Siswa**

PIP berdampak positif pada peningkatan disiplin dan motivasi belajar siswa, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Hampir semua guru berkeyakinan PIP mampu meningkatkan Kedisiplinan dan Motivasi Belajar Siswa di sekolah. Persentase terbesar terlihat pada peningkatan kehadiran siswa di kelas yaitu mencapai (92.7%), peningkatan membaca buku setelah menerima PIP (84.5%), motivasi dalam mengerjakan PR dan (92.7%), kegiatan dalam belajar kelompok (82.2%), dan pada prestasi siswa dan minat siswa dalam mengikuti kegiatan lainnya /belajar dengan teratur (83.8,0%). Kegiatan belajar di rumah tsb diakui oleh hampir semua orangtua semakin meningkat setelah menerima PIP.

## **5.2 Saran**

Opsi kebijakan yang dapat diberikan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

### **5.2.1 Ketepatan Persyaratan Penerima**

- a. Perlu dilakukan sinkronisasi dalam menentukan kriteria rumah tangga/ keluarga miskin antara pemegang KIP, KPS, PKH, dan kartu miskin lain yang digunakan pemerintah pusat dengan satuan pendidikan/desa/kelurahan (SKM), terutama ketika terjadi perbedaan kriteria kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data KPS dan perlu terus didukung keberberkelanjutannya dengan perbaikan metoda pemeringkatan rumah tangga miskin.
- b. Basis data siswa miskin yang sedang dibangun di tingkat pusat saat ini perlu didukung oleh “basis data siswa miskin di tingkat sekolah” sebagai salah satu bagian data/informasi dari Dapodik Sekolah yang secara periodik per tahun diperbaharui akurasi serta sebagai pihak

---

yang paling dekat dan memahami kondisi siswa. Sumber data ini perlu disinkronisasikan dengan data yang ada di TNP2K. Sekolah diberi kewajiban dan kewenangan untuk mendata Nama, Kelas, Status dan Waktu penerimaan PIP pada siswa miskin pemegang KIP, KPS, PKH, SKM, dan kartu miskin lainnya dalam Dapodik Siswa Miskin Sekolah. Data ini dibangun secara on line dengan Basis data di Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Model pendataan ini berguna untuk dasar basis perencanaan keberlangsungan memperoleh PIP dalam mendorong keberlangsungan pendidikan siswa, serta berguna sebagai bahan pembinaan dan evaluasi efektivitas PIP baik di tingkat satuan pendidikan, Kab/kota, provinsi maupun tingkat pusat.

### **5.2.2 Ketepatan Sasaran penerima dan Jumlah dana PIP**

- a. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan jumlah penerima PIP, pemerintah pusat perlu terus meningkatkan jumlah penerima PIP di setiap satuan pendidikan sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh satuan pendidikan melalui dinas pendidikan kab/kota. Selain untuk lebih luas menjangkau siswa miskin mendapat PIP.
- b. Ketidacukupan jumlah nominal PIP yang diterima siswa untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa perlu disikapi pemerintah melalui penambahan jumlah siswa penerima dan nilai nominal PIP. Tentu saja, untuk memutuskan hal tersebut, pemerintah perlu mengkaji ulang kompleksitas ragam faktor penentu, seperti indeks kemahalan, unit cost pendidikan individu siswa, dan menyederhanakan sistem dan mekanisme PIP untuk mencegah biaya-biaya transaksi yang pada akhirnya mengurangi jumlah riil PIP yang diterima siswa.
- c. Dinas Pendidikan kota/ kabupaten juga perlu memiliki basis data siswa miskin dalam Dapodik satuan pendidikan di wilayahnya yang merupakan akumulasi dari data siswa miskin semua satuan pendidikan di wilayahnya yang secara on line dapat diakses oleh sekolah maupun pengelola PIP di pusat. Kriteria penentuan jumlah penerima PIP di setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan perlu lebih transparan berdasarkan pemeringkatan kemiskinan yang jelas dan akurat baik melalui data dapodik, KPS, maupun SKM dan sejumlah persyaratan lainnya. Upaya ini sekaligus untuk menghindari tuntutan orangtua yang telah

---

mengajukan berbagai persyaratan tetapi tidak mendapatkan PIP yang selama ini sering terjadi.

### **5.2.3 Ketepatan Waktu Menerima Dana PIP**

- a. Untuk meningkatkan ketepatan waktu penerimaan dana PIP oleh siswa, perlu dilakukan perbaikan dan sinkronisasi siklus anggaran dengan siklus tahun ajaran/akademik. Upaya sinkronisasi ini dilakukan oleh semua pemangku kepentingan di setiap level pengambilan keputusan, seperti kementerian keuangan, kementerian pendidikan dan kebudayaan, perbankan, Pemerintah Daerah, dan sekolah.
- b. Waktu pembayaran dana PIP sebaiknya dilakukan di bulan-bulan awal tahun ajaran agar lebih berdayaguna untuk membayar biaya-biaya pribadi siswa, seperti transport, alat belajar, dan uang saku.
- c. Ketepatan waktu penerimaan dana PIP dapat ditingkatkan melalui koordinasi dan sosialisasi program PIP secara intensif oleh Dinas Pendidikan kepada Kepala Sekolah, orangtua pemegang KPS, dan calon penerima PIP/siswa pemegang KIP. Sosialisasi mencakup informasi tentang mekanisme dan kriteria penerima PIP, hak dan kewajiban pemegang KPS dan calon penerima PIP.

### **5.2.4 Ketepatan Penggunaan Dana**

- a. Untuk meningkatkan ketepatan penggunaan dana PIP oleh siswa, sekolah perlu diberi kewenangan untuk mengelola dan mengawasi pengelolaan dana PIP agar mencapai sasaran, seperti sekolah atau komite sekolah mengelola dana dan penggunaannya oleh siswa melalui pengajuan (proposal) dan bukti pengeluaran. Upaya ini untuk menghindari penggunaan PIP yang tidak sesuai sasaran, misalnya belanja sembako.
- b. Sekolah secara proaktif melakukan pembinaan yang berkelanjutan kepada para siswa dan orangtua penerima PIP. Materi pembinaan mencakup pemanfaatan PIP, membangkitkan motivasi dan prestasi belajar sampai lulus, serta mendorong siswa agar nantinya melanjutkan pendidikan sampai jenjang yang tertinggi. Pembinaan dilakukan secara terprogram oleh Kepala sekolah, guru kelas, BP/BK, serta komite sekolah sebagai wujud kepedulian sekolah

---

terhadap kaum miskin dan memberi jaminan dan pengharapan terhadap akses pendidikan kepada keluarga miskin.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi. 2004, Keadilan Dalam Pendidikan: Makalah
- Anto Dayan. 1993. Pengantar Metode Statistik, Jilid 2. Jakarta: PT Pustaka LP3ES
- Arikunto, S dan Jabar, C.S.A. 2008. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ba Can, Nguyen; Long, Vu Van; Tam, Phan Thanh; and This Sinh, Nguyen. (2001). *Education financing and budgeting in Vietnam*. Paris: Internatioal Institute for Educational Planning/UNESCO.
- Baily, Martin Neil and Palter, Robert. (June 23, 2014). The infrastructure solution. *The Jakarta Post*. 7.
- Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdiknas. 2011. Studi Evaluasi Dampak Pemberian Beasiswa di Indonesia. Jakarta: Puslitjak.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 1993. Panduan Program Inpres Desa Tertinggal. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik No. 47/IX/1 September 2006.
- Badan Pusat Statistik. 2012. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, Indeks Kemiskinan, Garis Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Provinsi (2007-2012). Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Coleman, Major G. (Spring 2003). African American popular wisdom versus the qualification question: Is affirmative action merit based?. *Western Journal of Black Studies*. 27, 1. 35-44.
- Chapman, D.W., and D.M. Windham. 1986. The Evaluation of Efficiency in Educational Development Activities. Florida: IEES, Florida State University
- Cooper Donald R. dan Pamela S. Schindler. 2003. Business Research Method. Eight Edition. New York: McGraw Hill.
- Darling Hammond. 1997. The Right to Learn. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Darmastuti, Rini. 2006. Bahasa Indonesia Komunikasi. Yogyakarta: Gana Media

- 
- Dedi Supriadi. 1999. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Ditjen Dikdasmen
- Depdiknas, 2002. Data dan Indikator untuk Penyusunan Program Pembangunan. Jakarta: Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Depdiknas.
- Dinas Pendidikan Provinsi Bali. 2006. Informasi Data Pendidikan Provinsi Bali tahun 2005/2006.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. 2011. Pedoman Pelaksanaan Pemberian BSM SD. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- ..... 2012. Pengarusutamaan Gender dan Program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Jakarta: Kemdikbud.
- ..... 2012. Kebijakan Kemdikbud dalam Sinergitas Implementasi Bantuan Siswa Miskin dengan Program Keluarga Harapan. Bahan paparan dalam Rakor Program Keluarga Harapan Yogyakarta, 04 April 2012
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2010. Panduan Pelaksanaan BSM SMP. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. 2012. Panduan Pelaksanaan tahun 2012 Bantuan Khusus Murid (BKM) Jenjang Pendidikan Menengah (Dekonsentrasi). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Djam'an, Satori dan Aan Komariah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Edi Suharto. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta
- Eka, R. 2007. Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia, (<http://edu-articles.com>, diakses 9 Maret 2013)
- Fientje J.A Oentoe. 2006. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan. Universitas Negeri Manado.
- Fernandez, Raquel dan Rogerson, Richard (1997). Education finance reform: A dynamic perspective. *Journal of Policy Analysis and Management*, 16, 1. 67–84.
-

- 
- Ghozali, Abbas. 1987. Kerangka Analisis Efisiensi Internal dan Mutu Pendidikan. Jakarta: Pusat Informatika Balitbang Depdiknas
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S. Rosen, & Schuyler Tilly. 1988. Intertemporal analysis of state and local government spending: Theory and test. *Journal of Urban Economics*
- Harniati. 2010. Program-program Sektor Pertanian yang Berorientasi Penanggulangan Kemiskinan: Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Departemen Pertanian.
- Hemasaputri, Linda. 2010. Pengaruh Pemanfaatan Dana Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri I Pacitan. Skripsi, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang.
- (<http://websedu.com/article/92019/dampak-kompensasi-kenaikan-harga-bbm-subsidi-siswa-miskin-semakin-bertambah.html>, upload tgl Wed, 28 Mar 2012 @09:04
- <http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/224>, Kompensasi Kenaikan BBM, Subsidi Siswa Miskin Bertambah. 27 Maret 2012.
- [<http://id.wikipedia.org/wiki/Beasiswa>
- Hatcher, Richard (March, 1998). Class differentiation in education: Rational choices? *British Journal of Sociology of Education*; 19, 1. 5-24.
- Indonesia, 1996. Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia. Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- James Lynch. 1994. Children With Special Educational Need in the Asia Pasific Region. Washington, DC: World Bank.
- Kearney, C Philip (Nov 1994). School finance reform in Michigan. *The Clearing House*; 68, 2. 90-94.
- Kemdiknas. 2010, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010 -2014. Jakarta: Kemdiknas
- Koran Pendidikan. 2013. <http://headline.koranpendidikan.com/view/3295/pangkas-tuntas-angka-putus-sekolah.html>, 26 Februari 2013
- Musgrave & Musgrave, 1980. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga
-

- 
- Moleong, M.A, Lexy. J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Patton MQ .2006. “ Metode Evaluasi Kualitatif”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patton, M. Q. 2001. Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 16 IPB/2012 Tentang Pencairan dan Penyaluran Dana BSM dan Bea Siswa Bakat dan Prestasi
- Psacharopoulos, G. and Woodhall, M. 1985. Education for Development, An Analysis of Investment choices. Oxford: Oxford University Press.
- Pusat Penelitian Kebijakan. 2005. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan: Seri Analisis Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Puslitjak
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke 2. Jakarta: Balai Pustaka
- Peacock, Alan, T. (January, 1983). Education voucher schemes-strong or weak?. *Economic Affairs*. 113-116.
- Pheng, Duy; Sovonn, Hang; dan Soly, Yos. (2001). *Education financing and budgeting in Cambodia*. Paris: Internatioal Institute for Educational Planning/UNESCO.
- Ritonga, Razali. (12 Juni 2014). Persoalan gizi dan masa depan bangsa. *Media Indonesia*. 7.
- Rudi Handoko dan Pandu Patriadi. 2005. Evaluasi Kebijakan Subsidi Non BBM. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4, Desember 2005
- Rusmiati Suci Prihatin, 2006. Kajian Pengaruh Pengelolaan Subsidi Biaya Pendidikan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- SA. Wahab. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi. Kebijkanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

- 
- Sekaran, Uma, 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Suharto, Edi. 2006. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suparlan, Parsudi. 1995, *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suryadi, Ace. 1995. *Efisiensi Pendidikan*. Jakarta: Pusat Informatik untuk Pengelolaan Pendidikan, Balitbang Depdikbud.
- Sandier, Andrew B. dan Kapel, David E. (1988). Educational vouchers: A viable option for urban settings?. *The Urban Review*. 20, 4. 267-282.
- Schneider, Mark (2001). Information and choice in educational privatization. Dalam Henry M. Levin, *Privatizing education*. Boulder: Westview Press. 72-104.
- \_\_\_\_\_. (19 Juli, 2012). Pendidikan di daerah: ribuan anak tidak dapat melanjutkan sekolah. *Media Indonesia*. 8.
- Tahlim Sudaryanto dan I Wayan Rusastra. 2006. *Kebijakan Strategis Usaha Pertanian dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan*. Available at <http://www.pustaka-deptan.go.id> (Verified 7 Agustus 2008)
- Tilak, Jandhyala BG. 2002. "Education and Poverty." *Journal of Human Development*. Vol. 3 No. 2. Pp: 191-207
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2012. *Panduan Pemantauan Program Penaggulangan Kemiskinan, Buku Pegangan TKPK Daerah*. Jakarta, TNP2K.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Worthen B, R, & Sanders, J, R., 1987, *Education Evaluation: Alternative approach and practical guidelines*, Longman
- Woodhall, M. 1987, *Cost Analysis in Education*, Oxford: Oxford University Press.

- 
- World Bank. 2008. Poverty Data: A Supplement to World Development Indicators. Washington DC: The World Bank
- Wrihatnolo, Randy R; & Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.